



Suradi
29/4/2023

LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM

PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

PEMBIMBING:

Drs. Suradi, M.Si

Oleh:

YOHANDI FAHRUL FAUJI

NRP 20.03.101

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

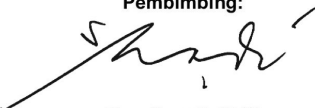
BANDUNG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL
Nama Mahasiswa : Yohandi Fahrul Fauji
NRP : 20.03.101
Program : Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Program Sarjana Terapan

Pembimbing:



Drs. Suradi, M.Si

Mengetahui:

Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Program Sarjana Terapan

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung



Lina Favourita Sutia Putri, Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur praktikan panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya praktikan dapat menyelesaikan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Tahun 2023. Dalam tulisan ini, praktikan menyusun laporan praktikum laboratorium yang diselenggarakan di Kelurahan Kebon Kangkung dengan menjelaskan tentang analisis lapangan dan rencana intervensi mengenai isu masalah yang berkaitan dengan capaian profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

Keberhasilan dari proses dan penyusunan laporan Praktikum Laboratorium ini tidak terlepas dari doa dan dukungan orang tua, serta berbagai pihak yang telah membantu praktikan selama berlangsungnya Praktikum Laboratorium. Oleh karena itu pada kesempatan ini praktikan menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Marjuki, M.Sc selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang menyelenggarakan Praktikum Laboratorium.
2. Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang sudah memberikan arahan dan masukan demi kelancaran kegiatan Praktikum Laboratorium.
3. Dra. Atirista Nainggolan, MP selaku Kepala Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada praktikan selama pelaksanaan dan penyusunan laporan Praktikum Laboratorium.
4. Drs. Suradi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Kelompok 5 Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada praktikan dengan penuh kesabaran dan pengorbanan waktu selama kegiatan Praktikum Laboratorium.
5. Rakhmat Taufiq, S.T., MM selaku Lurah Kelurahan Kebon Kangkung yang telah memberikan izin dan fasilitasi dalam pelaksanaan Praktikum Laboratorium.
6. Andika Maulana Pratama selaku pembimbing lapangan praktikum di Kelurahan Kebon Kangkung yang telah membantu praktikan dalam memperoleh informasi dan data selama proses Praktikum Laboratorium.
7. Rekan-rekan anggota kelompok 5 yang telah bekerja sama dan memberikan motivasi, bantuan serta afeksi selama pelaksanaan Praktikum Laboratorium dan penyusunan laporan Praktikum Laboratorium.
8. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama pelaksanaan Praktikum Laboratorium.

Semoga keikhlasan dan kebaikan pihak-pihak tersebut mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Praktikan pun berharap semoga laporan Praktikum Laboratorium ini dapat memberikan manfaat bagi praktikan khususnya dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta praktik Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

Bandung, April 2023

Praktikan

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	1
C. Waktu dan Lokasi Praktikum	3
D. Proses Praktikum	3
1. Tahap Persiapan	3
2. Tahap Lapangan	4
3. Tahap Pasca Lapangan	6
E. Sistematika Laporan	6
BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM	7
A. Profil Analisis Jaminan Sosial	7
1. Gambaran Umum Masalah	7
2. Tinjauan Konsep	8
3. Asesmen	17
4. Rencana Intervensi	23
B. Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial	31
1. Gambaran Umum Masalah	31
2. Tinjauan Konsep	32
3. Asesmen	36
4. Rencana Intervensi	42
C. Profil Analisis Pemberdayaan Sosial	51
1. Gambaran Umum Masalah	52
2. Tinjauan Konsep	53
3. Asesmen	59
4. Rencana Intervensi	64
D. Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial	78
1. Gambaran Umum Masalah	78
2. Tinjauan Konsep	79
3. Asesmen	82
4. Rencana Intervensi	88
E. Profil Analisis Penanggulangan Bencana	98
1. Gambaran Umum Masalah	98
2. Tinjauan Konsep	99

3. Asesmen	110
4. Rencana Intervensi	115
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	124
A. Kesimpulan	124
B. Rekomendasi	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	129

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Besaran Iuran Jaminan Hari Tua	13
2.2 Rencana Anggaran Biaya Program “Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian Pemberi Kerja dalam Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”	26
2.3 Rincian Peralatan Program “Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian Pemberi kerja dalam Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”	27
2.4 Analisis Kelayakan Program “Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian Pemberi kerja dalam Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”	27
2.5 Jadwal Kegiatan Program “Peningkatan Pemahaman Dan Kepedulian Pemberi Kerja Dalam Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”	29
2.6 Rencana Anggaran Biaya Program “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran)”	45
2.7 Peralatan Program “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran)”	46
2.8 Analisis Kelayakan Program Peralatan Program “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran)”	47
2.9 Jadwal Kegiatan Program Peralatan Program “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran)” Pertemuan Pertama	49
2.10 Jadwal Kegiatan Program Peralatan Program “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran)” Pertemuan Kedua	50
2.11 Jadwal Kegiatan Program Peralatan Program “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran)” Pertemuan Ketiga	50
2.12 Rencana Anggaran Biaya Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE”	69
2.13 Rincian Peralatan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE”	70
2.14 Analisis Kelayakan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE”	70
2.15 Jadwal Kegiatan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” Pertemuan Pertama	72
2.16 Jadwal Kegiatan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” Pertemuan Kedua	73

2.17	Jadwal Kegiatan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” Pertemuan Ketiga	73
2.18	Jadwal Kegiatan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” Pertemuan Keempat	74
2.19	Jadwal Kegiatan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” Pertemuan Kelima	75
2.20	Jadwal Kegiatan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” Pertemuan Keenam	76
2.21	Jadwal Kegiatan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” Pertemuan Ketujuh	76
2.22	Jadwal Kegiatan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” Pertemuan Kedelapan	77
2.23	Rencana Anggaran Biaya Program “Trolover”	92
2.24	Peralatan Program “Trolover”	93
2.25	Analisis Kelayakan Program”Trolover”	93
2.26	Jadwal Kegiatan Program “Trolover” Pertemuan Pertama	95
2.27	Jadwal Kegiatan Program “Trolover” Pertemuan Kedua	96
2.28	Jadwal Kegiatan Program “Trolover” Pertemuan Ketiga	97
2.29	Indikator Kesiapsiagaan Bencana	105
2.30	Rencana Anggaran Biaya Program “MANCARAN (Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran)”	118
2.31	Peralatan Program “MANCARAN (Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran)”	119
2.32	Analisis Kelayakan Program “MANCARAN (Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran)”	119
2.33	Jadwal Kegiatan Program “MANCARAN (Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran)”	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Analisis Pohon Masalah Jaminan Sosial	19
2.2	Analisis Pohon Masalah Bantuan Set Top Box	37
2.3	Analisis Pohon Masalah Pemberdayaan Buruan SAE	61
2.4	Analisis Pohon Masalah Penataan Lingkungan Trotoar	79
2.5	Bagan Manajemen Bencana	100
2.6	Analisis Pohon Masalah Penanggulangan Bencana	111

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Surat Izin Praktikum Laboratorium	123
2	Surat Izin Memperoleh Data dan Informasi BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung	124
3	Kegiatan Pembekalan Praktikum Laboratorium	125
4	Kegiatan Lapangan Praktikum Laboratorium	126

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada proses pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran dalam kelas (*classroom teaching*), tetapi juga melalui praktikum laboratorium (*laboratory practicum*) indoor dan outdoor. Kegiatan praktikum menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan khusus dalam proses intervensi pekerjaan sosial. Dengan demikian mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam praktik aras mikro, meso, dan makro, baik dalam bekerja dengan individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial. Praktikum Laboratorium disamping dilaksanakan dalam ruangan laboratorium, juga mahasiswa diberikan kesempatan melakukan aktivitas di masyarakat dan/atau organisasi sosial untuk memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran melalui aktivitas di dalam laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Demikian pula dalam praktikum ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial. Kegiatan praktikum laboratorium berfokus pada penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan organisasi sosial.

B. Tujuan dan Manfaat Praktikum

Pelaksanaan praktikum laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki:

1. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang

keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

2. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
3. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
4. Kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
5. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
 - a. Pendekatan Awal
 - b. Asesmen
 - c. Perencanaan Intervensi

Manfaat dari pelaksanaan praktikum adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
 - b. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
 - c. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
 - d. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan keterampilan-keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
 - e. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
 - f. Mahasiswa memiliki keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang meliputi tahapan :
 - 1) Pendekatan awal
 - 2) Asesmen

- 3) Rencana Intervensi
2. Bagi Lembaga
 - a. Meningkatkan kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
 - b. Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

C. Waktu dan Lokasi Praktikum

Lokasi praktikum di Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

1. Pra Lapangan
 - a. Pembekalan : 25 Januari – 3 Februari 2023
 - b. Pelepasan Praktikan : 3 Februari 2023
2. Lapangan (Indoor) : 6 Februari – 15 April 2023
3. Pasca Lapangan :
 - a. Bimbingan Penyusunan Laporan : 16 – 26 April 2023
 - b. Pendaftaran Ujian : 27 – 29 April 2023
 - c. Ujian Lisan Praktikum : 2 – 3 Mei 2023
 - d. Perbaikan dan Penyerahan Laporan : 3 – 10 Mei 2023

D. Proses Praktikum

Proses Praktikum Laboratorium memiliki 3 (tiga) tahapan berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap pra lapangan yang dilaksanakan untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami mekanisme kegiatan praktikum laboratorium. Tahap pra lapangan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembekalan Umum

Pembekalan umum dilaksanakan dengan pemberian materi tentang mekanisme praktikum Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial oleh narasumber Lina Favuorita Sutiaputri, Ph.D
- b. Bimbingan pra lapangan oleh dosen pembimbing praktikum:
 - 1) Review tentang materi pembekalan umum dan penugasan melalui *Google Classroom*
 - 2) Bimbingan teori/konsep dan keterampilan yang akan diterapkan
 - 3) Melakukan Praktik, demonstrasi, *role playing* tentang kegiatan dan teknologi Perlindungan dan pemberdayaan sosial dengan menggunakan data sekunder, dalam hal :
 - a) Mengetahui populasi kelompok sasaran (*population target group*) dan lingkungan sosialnya.

- b) Mengidentifikasi dan memahami program-program : Sistem Jaminan Sosial, Sumber Dana Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penataan Lingkungan Sosial, Penanggulangan Bencana
- c) Mempelajari isu-isu masalah perlindungan dan pemberdayaan sosial yang terkait dengan 5 (lima) profil Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.
- d) Mengidentifikasi kebijakan dan program/kegiatan penanganan masalah Perlindungan dan Pemberdayaan sosial sesuai dengan 5 (lima) profil Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.
- e) Membuat matriks rencana kerja dan desain teknologi yang sesuai dengan kegiatan praktikum laboratorium
- f) Serah terima praktikan dari Program Studi kepada Dosen Pembimbing Praktikum Serah terima praktikan, dilaksanakan secara luring dengan upacara pelepasan yang dilakukan oleh Kepala Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial kepada Dosen Poltekkes Bandung yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing praktikum.

2. Tahap Lapangan

Tahap lapangan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu praktik sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Setiap sesi dilaksanakan selama 14 hari kalender, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial
 - 1) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn, MSE dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Februari 2023. Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola pelaksanaan program jaminan sosial, yang meliputi:
 - a) Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia beserta programnya
 - b) Kelembagaan utama penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia
 - c) Kebijakan dan penguatan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional
 - d) Strategi dan target jaminan sosial
 - e) Tantangan program jaminan sosial di Indonesia khususnya pada pekerja informal
 - f) Berbagai isu pelaksanaan program jaminan sosial
 - g) Potensi kontribusi lulusan jaminan sosial

- b. Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial
 - 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh Tonton Heryanto dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Februari 2023. Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola sumber dana bantuan sosial, yang meliputi:
 - a) Berbagai isu dan masalah dalam implementasi pengelolaan dana bantuan sosial
 - b) Manajemen sumber dana bantuan sosial
 - c) Komponen dalam membangun jaringan sumber dana bantuan sosial
 - d) Mekanisme penggalangan dana bantuan sosial
 - e) Penyusunan anggaran dalam bantuan sosial
 - f) Kompetensi yang harus dimiliki dalam mengelola dana bantuan sosial
 - g) Peluang dan potensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial
- c. Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial
 - 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh Samsul Maarif dilaksanakan pada hari Rabu 8 Maret 2023. Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Pemberdayaan Sosial, yang meliputi:
 - a) Berbagai isu dan masalah dalam implementasi program pemberdayaan sosial
 - b) Aktor dalam pemberdayaan masyarakat
 - c) Tahapan proses pemberdayaan
 - d) Bentuk-bentuk pemberdayaan
 - e) Permasalahan dan solusi dalam pemberdayaan
 - f) Peran dan keterampilan pekerja sosial dalam pemberdayaan
- d. Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial
 - 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Penata Lingkungan Sosial oleh Ade Reno Sudiarmo, A.KS, MSW. Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Penataan Lingkungan Sosial, yang meliputi:
 - a) Gambaran umum penataan lingkungan sosial
 - b) Hubungan profesi pekerjaan sosial dengan lingkungan sosial
 - c) Berbagai isu dan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia
 - d) Tahapan kerja penataan lingkungan sosial
 - e) Kompetensi yang dibutuhkan dalam praktik penataan lingkungan sosial
- e. Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana
 - 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana oleh Mohd Robi Amri. Membahas tentang pengalaman praktisi dalam penanggulangan bencana, yang meliputi:

- a) Konsepsi bencana di Indonesia
- b) Penyelenggaraan penanggulangan bencana
- c) Berbagai perspektif bencana
- d) Stakeholder dalam penanggulangan bencana
- e) Tantangan umum dalam penanggulangan bencana

3. Tahap Pasca Lapangan

- a. Finalisasi penyusunan laporan akhir praktikum
- b. Ujian Lisan Praktikum
- c. Perbaikan dan penyerahan laporan

E. Sistematika Laporan

Laporan ini disusun dengan sistematika praktikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, sasaran kegiatan praktikum, waktu dan lokasi praktikum, proses praktikum dan sistematika laporan.

BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM, memuat pembahasan tentang Profil Analis Jaminan Sosial, Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Profil Analis Pemberdayaan Sosial, Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Profil Analis Penanggulangan Bencana. Masing-masing profil membahas mengenai gambaran umum masalah, tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih, asesmen, dan beserta rencana intervensi.

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, memuat kesimpulan hasil pelaksanaan praktikum dan rekomendasi yang ditujukan kepada Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dan civitas akademika Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

BAB II

PRAKTIK LABORATORIUM

A. Profil Analisis Jaminan Sosial

Pada profil Analisis Jaminan Sosial, praktikan menemukan isu yang ada di wilayah Kelurahan Kebon Kangkung mengenai terdapatnya salah satu yayasan sebagai pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam prosesnya praktikan menggunakan metode pengumpulan analisis data sekunder, baik berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, data statistik, dan studi literatur dalam penyusunan laporan praktikum pada profil Analisis Jaminan Sosial.

1. Gambaran Umum Masalah

Sebagai negara yang menganut *Welfare State* atau negara kesejahteraan, Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh warga negaranya. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 hadir sebagai bentuk upaya negara Indonesia membentuk program untuk melindungi warga negaranya dari berbagai kerentanan yang diakibatkan oleh risiko sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan salah satu program turunan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berfokus pada pemberian jaminan sosial bagi pekerja. Program yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kepesertaan dari program BPJS Ketenagakerjaan dibagi menjadi dua kategori yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) yang sering disebut sebagai pekerja sektor formal akan dibayarkan preminya oleh pemberi kerja, dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang sering disebut sebagai pekerja sektor informal akan membayarkan preminya secara mandiri melalui metode pembayaran yang sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama Pusat Data Kementerian Ketenagakerjaan, sejak dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2014 sampai tahun 2022 terdapat 51.01 juta pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta dari program BPJS Ketenagakerjaan, dengan komposisi 60.59% sebagai tenaga kerja aktif, dan 39.41% sebagai tenaga kerja non aktif. Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja sektor formal menyentuh angka 57% sedangkan pekerja sektor informal hanya berkisar 14% dari total pekerja yang ada di Indonesia.

Implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang melaksanakan aktivitas kerjanya di Kelurahan Kebon Kangkung masih belum optimal. Salah satunya untuk pekerja pada Yayasan Rumah Yatim. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari lapangan melalui wawancara dengan pengurus yayasan tersebut terdapat pekerja yang berjumlah 20 orang belum terdaftar dalam program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini terjadi didasarkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan yayasan tersebut belum mendaftarkan para pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

2. Tinjauan Konsep

a. Konsep Jaminan Sosial

Jaminan Sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan publik terhadap tekanan ekonomi sosial bahwa jika tidak diadakan sistem Jaminan Sosial akan menimbulkan hilangnya sebagian pendapatan sebagai akibat sakit, persalinan, kecelakaan kerja, sementara tidak bekerja, cacat, hari tua dan kematian dini, perawatan medis termasuk pemberian subsidi bagi anggota keluarga yang membutuhkan (ILO, 1998).

Sedangkan menurut MHLW (1999) Sistem Jaminan Sosial berarti sistem untuk memungkinkan setiap warga negara menjalani kehidupan yang layak sebagai anggota masyarakat yang berbudaya. Sistem Jaminan Sosial memberikan tindakan pencegahan terhadap penyebab keadaan yang membutuhkan termasuk penyakit, cedera, persalinan, cacat, kematian, usia tua, pengangguran dan memiliki banyak anak dengan menerapkan langkah-langkah jaminan ekonomi melalui asuransi atau dengan pengeluaran publik langsung.

Secara garis besar Jaminan Sosial memiliki tiga pilar utama yang terdiri dari:

1) Bantuan/Pelayanan Sosial

Sistem ini didanai oleh negara yang bersumber dari pajak atau sumbangan dari pihak yang mempunyai strata ekonomi yang kuat.

2) Tabungan Wajib

Setiap peserta diwajibkan menabung untuk dirinya sendiri (*provident fund*) sebagaimana yang dilaksanakan dalam program Jaminan Hari Tua pada Jamsostek atau sebagian Jaminan Pensiun pada Taspen.

3) Asuransi Sosial

Setiap peserta berkontribusi atau membayar premi yang bersifat wajib. Premi yang dibayarkan oleh pihak lain atau oleh pemerintah, bagi mereka yang miskin dengan mekanisme subsidi silang.

b. Sistem Jaminan Sosial Nasional

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tatacara penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh beberapa badan penyelenggara. Pada dasarnya Sistem Jaminan Sosial Nasional ini merupakan program negara yang memiliki tujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya program ini, setiap penduduk diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak apabila dikemudian hari terjadi berbagai risiko seperti hilang atau berkurangnya pendapatan yang disebabkan oleh sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau memasuki masa pensiun dari bekerja.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Kebutuhan dasar hidup yang layak yang dimaksud dalam peraturan SJSN ini adalah kebutuhan esensial setiap individu agar dapat menjalankan kehidupannya dengan layak demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme asuransi sosial dengan pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran peserta agar dapat memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1) Jaminan Kesehatan (JK)

Program yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian jaminan di bidang kesehatan secara komprehensif bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera melalui pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis.

2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian jaminan pelayanan beserta santunan apabila pekerja mengalami kecelakaan saat menuju, menjalankan dan selesai menjalankan tugas pekerjaannya dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan proses pekerjaan.

3) Jaminan Hari Tua (JHT)

Program yang memiliki tujuan untuk memberikan bekal berupa uang tunai kepada peserta yang telah memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

4) Jaminan Pensiun (JP)

Program yang memiliki tujuan untuk menjamin kebutuhan hidup minimum yang layak bagi peserta yang menjalani masa pensiun

atau mengalami cacat total tetap sehingga tidak dapat bekerja yang dibayarkan secara berkala.

5) Jaminan Kematian (JKM)

Program yang memiliki tujuan untuk memberikan santunan kematian berdasarkan asuransi sosial yang dibayarkan kepada keluarga ahli waris dari peserta yang meninggal dunia.

6) Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Program yang memiliki tujuan memberikan jaminan kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hak Kerja (PHK) berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Salah satu tanggung jawab dan kewajiban dari negara adalah memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada warga negaranya melalui program Jaminan Sosial sesuai dengan kondisi keuangan negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia mengembangkan program Jaminan Sosial berdasarkan funded social security atau yang berarti Jaminan Sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat yang bekerja pada sektor formal.

Dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban tersebut Indonesia mendirikan badan khusus yang menyelenggarakan Jaminan Sosial kepada seluruh warga negaranya yang bekerja pada sektor formal maupun informal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) yang merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja. BPJS Ketenagakerjaan sendiri merupakan hasil transformasi dari PT Jamsostek yang sebelumnya mengurus terkait dengan proteksi dan Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

Peraturan yang mendasari pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional telah mengatur tugas dari BPJS antara lain:

- 1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
- 2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
- 3) Menerima Bantuan Iuran dari pemerintah;
- 4) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;
- 5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program Jaminan Sosial;
- 6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial;
- 7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan meliputi pendaftaran kepesertaan dan pengumpulan data kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk menerima bantuan iuran dari pemerintah, pengelola dana dari Jaminan Sosial dan pembayaran manfaat atau membiayai pelayanan kesehatan dan tugas penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program Jaminan Sosial dan keterbukaan informasi.

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, BPJS memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Menagih pembayaran iuran;
- 2) Menempatkan dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
- 3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi pengawasan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Jaminan Sosial nasional;
- 4) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 5) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
- 6) Menganakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
- 7) Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidapatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial

d. Jaminan Hari Tua (JHT)

Menurut Sentanoe Kertonegoro dalam Agus (2014), Jaminan Hari Tua merupakan kegiatan memberikan santunan pada saat tenaga kerja mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat tetap dan total, meninggalkan Indonesia untuk tidak kembali lagi, dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan masa kepesertaan sekurang-kurangnya lima tahun.

Program Jaminan Hari Tua disingkat Program JHT menurut naskah akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program Jaminan Sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan untuk menjamin peserta program menerima uang tunai apabila memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Jaminan Hari Tua (JHT) dapat diklaim atau dicairkan secara sekaligus berupa akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tertulis bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh Jaminan Sosial tenaga kerja. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Terdiri dari:

- 1) Peserta penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, meliputi:
 - a) Pekerja pada perusahaan;
 - b) Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c) Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- 2) Peserta bukan penerima upah:
 - a) Pemberi kerja;
 - b) Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c) Pekerja yang tidak termasuk pekerja mandiri yang bukan menerima upah.

Peserta penerima upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial bidang ketenagakerjaan termasuk JHT yang didaftarkan secara kolektif oleh pemberi kerja. Sementara untuk peserta bukan penerima upah dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta. Peserta bukan penerima upah juga dapat mendaftar sendiri langsung ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah/kelompok/Mitra/*Payment Point* (Aggregator/Perbankan) yang telah melakukan Ikatan Kerja Sama (IKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Persyarat administrasi pada saat pendaftaran pada program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut:

- 1) Fotokopi dan aslinya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).

- 2) Fotokopi dan aslinya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan/Pemberi kerja.
- 3) Fotokopi dan aslinya Akta Perdagangan Perusahaan/Pemberi kerja.
- 4) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing karyawan.
- 5) Fotokopi KK (Kartu Keluarga) karyawan/pekerja yang akan didaftarkan.
- 6) Pas foto berwarna karyawan/pekerja ukuran 2×3 sebanyak 1 lembar.

Besaran iuran JHT yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya yang disesuaikan dengan upah yang diterima oleh pekerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabel Besaran Iuran Jaminan Hari Tua

Upah/Penghasilan (Rp)	Dasar Penghasilan Penetapan Manfaat (Rp)	2% Iuran JHT Peserta (Rp)
sampai 1.099.000	1.000.000	20.000
1.100.000-1.299.000	1.200.000	24.000
1.300.000-1.499.000	1.400.000	28.000
1.500.000-1.699.000	1.600.000	32.000
1.700.000-1.899.000	1.800.000	36.000
1.900.000-2.099.000	2.000.000	40.000
2.100.000-2.299.000	2.200.000	44.000
2.300.000-2.499.000	2.400.000	48.000
2.500.000-2.699.000	2.600.000	52.000
2.700.000-3.199.000	2.950.000	59.000
3.200.000-3.699.000	3.450.000	69.000
3.700.000-4.199.000	3.950.000	79.000
4.200.000-4.699.000	4.450.000	89.000
4.700.000-5.199.000	4.950.000	99.000
5.200.000-5.699.000	5.450.000	109.000

5.700.000-6.199.000	5.950.000	119.000
6.200.000-6.699.000	6.450.000	129.000
6.700.000-7.199.000	7.150.000	139.000
7.200.000-7.699.000	7.450.000	149.000
7.700.000-8.199.000	7.950.000	159.000
8.200.000-9.199.000	8.700.000	174.000
9.200.000-10.199.000	9.700.000	194.000
10.200.000-11.199.000	10.700.000	214.000
11.200.000-12.199.000	11.700.000	234.000
12.200.000-13.199.000	12.700.000	254.000
13.200.000-14.199.000	13.700.000	274.000
14.200.000-15.199.000	14.700.000	294.000
15.200.000-16.199.000	15.700.000	314.000
16.200.000-17.199.000	16.700.000	334.000
17.200.000-18.199.000	17.700.000	354.000
18.200.000-19.199.000	18.700.000	374.000
19.200.000-20.199.000	19.700.000	394.000
20.200.000-dst	20.700.000	414.000

Dalam pengajuan klaim Jaminan Hari Tua terdapat beberapa persyaratan berikut:

- 1) Untuk kepesertaan 10 tahun bisa mencairkan 10 atau 30 persen dari saldo JHT.
- 2) Untuk peserta yang sudah pensiun, di PHK, atau mengundurkan diri bisa mencairkan 100 persen dari saldo JHT.
- 3) Saldo JHT tidak bisa dicairkan sejak 1 bulan dinyatakan non-aktif bekerja.

- 4) Dokumen yang dibutuhkan:
- a) Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
 - b) Kartu identitas diri, bisa KTP bisa Paspor
 - c) Kartu Keluarga
 - d) Paklaring atau surat keterangan pernah bekerja di suatu perusahaan (bagi pekerja formal)
 - e) Buku rekening bank peserta
 - f) Pas foto 4×6 dan 3×4
 - g) NPWP

Sedangkan dalam tahap pencairan JHT terdapat tiga cara berikut:

- 1) Klaim Jaminan Hari Tua Melalui Lapak Asik
- Sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) sebagai salah satu cara klaim JHT. Lapak Asik memungkinkan nasabah untuk mengajukan klaim JHT secara online. Berikut ini cara klaim JHT melalui Lapak Asik:
- a) Kunjungi situs antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau klik "*Antiran Online*" yang tertera pada aplikasi BPJSTK;
 - b) Dari situ kamu akan mendapatkan nomor antrian. Kemudian isi data sesuai yang muncul pada layar;
 - c) Download form pengajuan JHT dan pilih "*Simpan*";
 - d) Isi form yang telah diunduh secara lengkap dan ikuti petunjuk pada layar;
 - e) Kemudian kamu akan mendapatkan kode verifikasi atau PIN yang dikirim melalui SMS atau email;
 - f) Masukkan PIN verifikasi dan diikuti permintaan data rekening bank, seperti no rekening, nama bank, dan nama pemilik rekening;
 - g) Upload atau unggah file dokumen seperti petunjuk yang diberikan;
 - h) Jika disetujui, akan menerima konfirmasi yang diinformasikan melalui email, WhatsApp, SMS, atau telepon;
 - i) Kemudian usang JHT akan dikirim via transfer ke rekening.
- 2) Klaim Jaminan Hari Tua Melalui Laman Resmi BPJS Ketenagakerjaan
- Dengan layanan e-klaim ini, bisa mengajukan permohonan pencairan dari mana saja dan kapan saja. Berikut ini tata cara e-klaim BPJS Ketenagakerjaan laman situs resmi:
- a) Buka situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id
 - b) Masuk menggunakan email yang telah didaftarkan. Jika belum mendaftar bisa lakukan proses registrasi terlebih dahulu;

- c) Setelah itu, masuk ke halaman depan dan pilih menu “*Klaim Saldo JHT*”;
- d) Isi informasi yang diminta, kolom “*KPJ*” diisi dengan nomor kartu BPJS Ketenagakerjaan, kolom “*keperluan*” diisi dengan “*pengajuan klaim*”, lalu kolom “*keperluan*” diisi dengan kondisi status pekerjaanmu saat ini;
- e) Setelah itu, kamu bakal diminta untuk mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan;
- f) Jika e-klaim BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa, cek kembali dokumen yang diserahkan apakah sudah lengkap;
- g) Tunggu email konfirmasi dari BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu 1×24 jam. Dalam email tersebut diinformasikan mengenai tanggal dan kantor cabang BPJS yang harus didatangi untuk melanjutkan ke proses pengecekan berkas;
- h) Saat datang ke kantor BPJS yang diminta, jangan lupa membawa dokumen-dokumen asli yang menjadi persyaratan;
- i) Menunggu proses pencairan yang umumnya memakan waktu kurang lebih 10 hari kerja.

3) Klaim Jaminan Hari Tua di Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Klaim yang paling tradisional adalah dengan mendatangi langsung ke kantor BPJS terdekat. Tapi usahakan kamu datang pagi hari, biar dapat nomor antrean awal. Berikut ini cara klaim JHT di kantor BPJS:

- a) Datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dari rumah;
- b) Ambil nomor pada loket antrean;
- c) Mengisi formulir pengajuan untuk pencairan dana;
- d) Menyerahkan dan menunjukkan dokumen persyaratan yang diminta, Kartu BPJS, KTP, KK, rekening tabungan. Jangan lupa membawa fotokopiannya untuk diserahkan ke petugas dan aslinya untuk ditunjukkan;
- e) Setelah berkas diberikan ke petugas akan mendapatkan nomor antrean untuk wawancara;
- f) Dalam wawancara dengan petugas itu nantinya berkas-berkas akan dilakukan pengecekan. Bila terdapat dokumen yang kurang maka akan diminta untuk melengkapinya;
- g) Langkah terakhir yaitu tunggu konfirmasi apakah klaim disetujui atau tidak. Jika disetujui, petugas akan memberikan informasi mengenai kapan waktu pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan.

e. Kesejahteraan Pekerja

Penyediaan program kesejahteraan pekerja merupakan salah satu bagian dari upaya yang digunakan oleh pemberi kerja dalam rangka meningkatkan motivasi kerjanya sehingga dapat meningkatkan

produktifitas dari pekerja. Berbagai program kesejahteraan pekerja seperti pemberian fasilitas dan tunjangan dalam bentuk tertentu kepada pekerja diluar gaji yang dapat dilaksanakan oleh pemberi kerja diantaranya dapat berupa cuti, uang lembur, uang bonus, transportasi, asuransi, dan sebagainya.

Yoder dalam Hasibuan dalam Creatormedia (2022) menerangkan bahwa kesejahteraan pekerja dapat dipandang sebagai uang bantuan lebih lanjut bagi pekerja. Terutama bantuan pembiayaan bagi pekerja yang sakit, uang bantuan tabungan pekerja, asuransi, dan pensiun. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa keberadaan program kesejahteraan bagi pekerja sangat mendorong kemajuan kinerja dari pekerja dalam sebuah perusahaan atau pemberi kerja lainnya.

Perhatian terhadap kesejahteraan pekerja tidak hanya mencakup upah yang layak, tetapi juga meliputi kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan pengembangan karir, hak-hak kerja, serta perlindungan hak asasi manusia dan adanya jaminan sosial yang diberikan. Kesejahteraan pekerja juga mempengaruhi aspek lain dari kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Jika kesejahteraan pekerja diabaikan, maka produktivitas perusahaan akan menurun, dan ini akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Asesmen

Praktikum laboratorium pada profil Analis Jaminan Sosial dilakukan pada tanggal 8 hingga 18 Februari 2023. Praktikan melakukan asesmen dengan pendalaman data primer melalui metode wawancara dengan pekerja Yayasan Rumah Yatim dan Sekretaris BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung. Selain itu praktikan melakukan pendalaman data sekunder melalui laman BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Teknik yang digunakan dalam proses asesmen antara lain teknik analisis pohon masalah, dan penelitian kepustakaan.

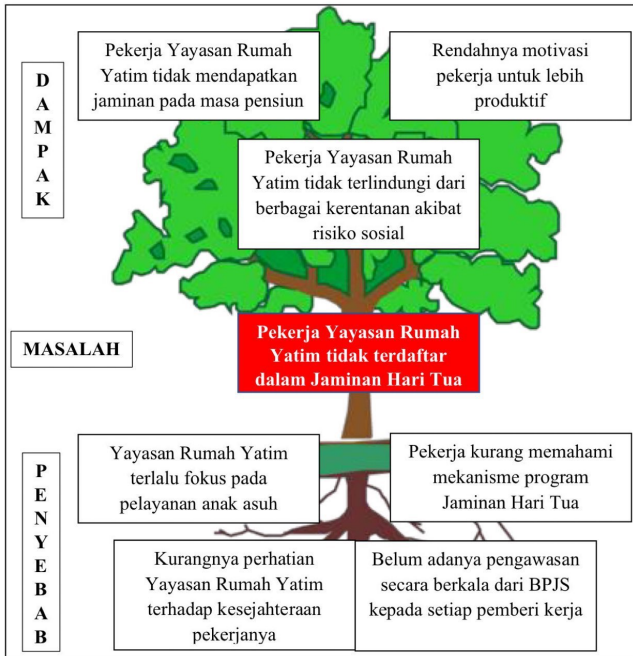
a. Identifikasi Masalah

Yayasan Rumah Yatim adalah Lembaga Amil Zakat sekaligus lembaga sosial tingkat nasional yang didirikan pada bulan Mei di Bandung dengan berkhidmat secara profesional dalam membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi produktif. Dengan salah satu misi yang dimiliki oleh Rumah Yatim yaitu “Menjadi Lembaga Amil Zakat terunggul dalam penerimaan, pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAHIB” maka Rumah Yatim harus memiliki produktivitas tinggi dari para pekerjanya untuk mewujudkan misi tersebut. Untuk saat ini Rumah Yatim yang berlokasi di RW 7 Kelurahan Kebon Kangkung memiliki dua puluh orang pekerja. Tetapi untuk mendukung dari produktivitas pekerjanya pihak Rumah Yatim

tidak mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya dalam program Jaminan Hari Tua (JHT).

Pada UU No. 24 Tahun 2011 sudah dijelaskan mengenai kewajiban dari setiap pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya beserta pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah minimal pekerja sepuluh orang. Dengan mengacu pada peraturan tersebut maka Yayasan Rumah Yatim belum melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi kerja dalam memberikan jaminan dari risiko sosial yang terjadi bagi pekerjanya. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan situasi ini terjadi dari mulai kurangnya perhatian pemberi kerja kepada pekerjanya tentang program BPJS Ketenagakerjaan, hingga kurangnya jangkauan sosialisasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan kewajiban mendaftarkan pekerja sebagai peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Disisi lain metode pengawasan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi para pemberi kerja pada organisasi nirlaba yang belum mendaftarkan pekerjanya dinilai masih kurang efektif sehingga masih banyak pemberi kerja kurang peduli terhadap kesepertaan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan deskripsi latar masalah yang terjadi, praktikan menggunakan metode analisis pohon masalah dalam menentukan fokus masalah yang terjadi pada Jaminan Sosial sebagai berikut:



Gambar 2.1 Gambar Analisis Pohon Masalah Jaminan Sosial

1) Penyebab Masalah

- a) Yayasan Rumah Yatim Terlalu Fokus Pada Pelayanan Anak Asuh

Sebagai organisasi nirlaba yang berupaya menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak menyebabkan pihak internal dari Yayasan Rumah Yatim terlalu fokus dalam pelayanan anak asuh sehingga sumber daya finansial yang dimiliki lebih banyak dimanfaatkan untuk keperluan anak asuh.

- b) Tidak Adanya Pengawasan Secara Berkala Dari BPJS Kepada Setiap Pemberi Kerja

Proses pengawasan terhadap pemberi kerja dalam pemenuhan kewajibannya untuk mengiutsertakan dirinya dan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan tidak terlaksana dengan efektif. Ketika BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukan pengawasan secara berkala kepada setiap pemberi kerja, hal

tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah. Beberapa masalah yang dapat terjadi antara lain adalah adanya pemberi kerja yang tidak membayar iuran BPJS dengan tepat, bahkan ada yang tidak membayar sama sekali. Selain itu, jika pemberi kerja tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, maka peserta Jaminan Ketenagakerjaan yang tergabung dalam perusahaan tersebut juga tidak akan mendapatkan manfaat jaminan ketenagakerjaan yang seharusnya mereka dapatkan.

c) Kurangnya Perhatian Yayasan Rumah Yatim Terhadap Kesejahteraan Pkerjanya

Yayasan Rumah Yatim sebagai pemberi kerja belum memiliki perhatian lebih akan kesejahteraan pkerjanya dalam upaya menghindari kerentanan pada pkerja dari risiko sosial yang terjadi. Kurangnya perhatian pemberi kerja terhadap kesejahteraan pkerjanya dapat menyebabkan berbagai masalah bagi para pkerja. Beberapa masalah yang dapat terjadi antara lain buruknya kondisi tempat kerja, tidak adanya program kesehatan kerja, serta minimnya upah dan tunjangan bagi para pkerja. Hal ini dapat mengakibatkan para pkerja tidak merasa nyaman dalam bekerja, bahkan dapat berdampak pada kesehatan mereka. Selain itu, para pkerja juga mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan, karena pemberi kerja tidak membayar iuran dengan tepat.

d) Pkerja Kurang Memahami Mekanisme Program Jaminan Hari Tua

Keterbatasan pengetahuan dari pkerja tentang jaminan hari tua yang menyebabkan pkerja Yayasan Rumah Yatim menganggap bahwa program jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk pkerja dari perusahaan. beberapa pkerja juga tidak memahami persyaratan dan tata cara pengajuan klaim jaminan hari tua, sehingga seringkali terjadi penolakan klaim atau keterlambatan dalam proses pengajuan klaim. Akibatnya, banyak pkerja yang tidak mendapatkan manfaat dari program jaminan hari tua yang seharusnya mereka dapatkan.

2) Dampak Masalah

a) Pkerja Yayasan Rumah Yatim Tidak Mendapatkan Jaminan Pada Masa Pensiun

Pkerja Yayasan Rumah Yatim apabila telah memasuki usia pensiun tidak akan mendapatkan uang jaminan sebagai dana persiapan dalam menjalankan kehidupan diusia lanjut. Terkadang pkerja mungkin memilih untuk bekerja di yayasan karena alasan

sosial atau kecintaan terhadap pekerjaan tersebut, tanpa mempertimbangkan jaminan sosial dan kesejahteraan masa depan mereka.

b) Rendahnya Motivasi Pekerja Untuk Lebih Produktif

Dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kerja, pekerja Yayasan Rumah Yatim tidak memiliki motivasi tambahan selain gaji dalam meningkatkan produktifitasnya dalam bekerja. Rendahnya motivasi pekerja untuk lebih produktif adalah kondisi di mana karyawan kurang termotivasi untuk bekerja secara maksimal dan menghasilkan kinerja yang baik. Pekerja yang tidak termotivasi cenderung kurang bersemangat dan tidak terlibat sepenuhnya dalam tugas mereka, yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan.

c) Pekerja Yayasan Rumah Yatim Tidak Terlindungi dari Berbagai Kerentanan Akibat Risiko Sosial

Dalam menjalankan kehidupan di usia lanjut, pekerja Yayasan Rumah Yatim tidak akan mendapatkan perlindungan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Risiko sosial dapat memberikan dampak yang serius terhadap kehidupan pekerja, terutama jika mereka tidak terlindungi dengan baik. Dalam hal ini, kerentanan terhadap risiko sosial dapat berupa ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan layanan kesehatan, atau kerentanan terhadap kekerasan, pelecehan atau diskriminasi di tempat kerja. Selain itu, pekerja yang tidak terlindungi juga dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak sosial dan ekonomi, seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan jaminan hari tua.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan analisis masalah diatas, praktikan mengambil fokus masalah pada Profil Analisis Jaminan Sosial ini adalah Pekerja Yayasan Rumah Yatim tidak terdaftar dalam Jaminan Hari Tua.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan fokus masalah diatas terdapat beberapa kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Meningkatkan kesadaran Yayasan Rumah Yatim terhadap pentingnya Jaminan Sosial bagi setiap tenaga kerja
- 2) Penyampaian informasi terkait regulasi kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja pada program Jaminan Sosial ketenagakerjaan
- 3) Penyampaian informasi tentang berbagai hak yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja kepada setiap tenaga kerja

- 4) Penyampaian informasi kepada pemberi kerja dan tenaga kerja tentang mekanisme dan manfaat jaminan hari tua bagi pekerja

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam usaha kesejahteraan sosial atau praktik pekerjaan sosial, selain itu sistem sumber pekerjaan sosial merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan suatu masalah. Pincus dan Minahan (1973) dalam Yurika Maha (2016) mengklasifikasikan sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi tiga jenis yaitu sistem sumber informal atau alamiah, sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan. Sistem sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan Pekerja Yayasan Rumah Yatim Tidak Terdaftar dalam Jaminan Hari Tua adalah sebagai berikut:

1) Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini adalah sebagai berikut:

a) Serikat Pekerja Nasional Kota Bandung

Dalam permasalahan ini pelibatan Serikat Pekerja Nasional dimanfaatkan sebagai upaya integrasi pemenuhan hak pekerja yang melaksanakan aktivitas kerjanya di Kota Bandung. Selain itu Serikat Pekerja Nasional Kota Bandung dapat menjadi fasilitator dalam mempermudah Yayasan Rumah Yatim dalam mengakses BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjanya.

2) Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini adalah sebagai berikut:

a) Pekerja Sosial

Dalam permasalahan ini Pekerja Sosial memerankan tugas sebagai inisiator dari program alternatif penyelesaian masalah Pekerja Yayasan Rumah Yatim Tidak Terdaftar dalam Jaminan Hari Tua. Pekerja sosial bertugas merencanakan program bersama stakeholder serta menjembatani antara sistem sasaran dengan sistem sumber.

b) Ketua RW 7

Dalam permasalahan ini ketua RW 7 memiliki kewenangan dalam memberikan perizinan kegiatan karena Yayasan Rumah Yatim terletak di RW 7. Selain itu ketua RW juga dapat berperan sebagai sistem pengontrol dalam kegiatan.

3) Sistem Sumber Kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini adalah sebagai berikut:

- a) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bandung
Sebagai penyelenggara program Jaminan Sosial diharapkan BPJS Ketenagakerjaan melalui agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) dapat memberikan sosialisasi terkait kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu dapat pula melaksanakan pengawasan melalui kebijakan tentang program BPJS Ketenagakerjaan yang harus didapatkan oleh pekerja.
- b) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Dengan kewenangan atas aktivitas ketenagakerjaan di Kota Bandung, Dinas Tenaga Kerja memiliki kewajiban untuk memberikan perumusan kebijakan, pengawasan, dan pembinaan ketenagakerjaan kepada seluruh pemberi kerja dan tenaga kerja yang ada di Kota Bandung. Dalam hal ini pihak dinas berperan dalam penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program kegiatan.

4. Rencana Intervensi

Rencana intervensi merupakan rancangan tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh inisiator bersama klien atas dasar asesmen. Berdasarkan hasil asesmen dan analisis permasalahan yang muncul di Kelurahan Kebon Kangkung pada profil Analisis Jaminan Sosial yang akan dirancang oleh praktikan adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial yang diselenggarakan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dalam UU No. 24 Tahun 2011 sudah ditegaskan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Jaminan Hari Tua dimaksudkan untuk memberikan jaminan para peserta agar ketika memasuki masa pensiun peserta tersebut mendapatkan uang tunai sebagai bekal penghidupan masa tua ketika sudah tidak bisa lagi bekerja. Dengan pembagian pembayaran premi antara pihak pemberi kerja dan pekerjanya menunjukkan bahwa pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memperhatikan pula kesejahteraan dari pekerjanya. Namun padafaktanya, masih banyak pemberi kerja formal yang belum mendaftarkan kepesertaan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan khususnya Jaminan Hari Tua. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sanksi dan pengawasan dari pihak BPJS kepada setiap pemberi kerja terkait dengan keikutsertaannya dalam program BPJS. Maka untuk menangani permasalahan tersebut diperlukan Program Peningkatan

Pengetahuan Organisasi Nirlaba dalam keikutsertaan pekerjaannya Pada Program BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya pemecahan masalahnya.

b. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

1) Tujuan Umum

Tujuan umum dari Program Peningkatan Pengetahuan Organisasi Nirlaba dalam keikutsertaan Pekerjaannya Pada Program BPJS Ketenagakerjaan adalah meningkatkan pemahaman yayasan tentang BPJS Ketenagakerjaan dan kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja dan produktivitas pihak yayasan.

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Program Peningkatan Pengetahuan Organisasi Nirlaba dalam keikutsertaan Pekerjaannya Pada Program BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pemahaman tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjaannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan
- b) Meningkatkan kepedulian yayasan terhadap kesejahteraan pekerjaannya
- c) Meningkatkan pemahaman yayasan dan pekerjaannya tentang program BPJS Ketenagakerjaan dan cara mengaksesnya
- d) Meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja di organisasi nirlaba

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Dalam upaya menangani permasalahan tentang Jaminan Sosial yang terjadi di Kelurahan Kebon Kangkung, maka program yang akan dilaksanakan adalah “Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian Pemberi Kerja dalam Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”. Dalam program ini akan dilaksanakan kegiatan berupa sosialisasi tentang kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjaannya pada BPJS Ketenagakerjaan pada program Jaminan Hari Tua (JHT).

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1) Sistem Inisiator

Sistem inisiator merupakan individu-individu yang pertama kali melihat adanya masalah. Sistem inisiator dalam program ini adalah pekerja sosial

2) Sistem Agen Perubahan

Sistem agen perubahan merupakan individu-individu yang akan memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinir perubahan. Sistem agen perubahan dalam program ini adalah pekerja sosial dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bandung.

3) Sistem Klien

Sistem klien merupakan sekelompok orang yang akan menerima pelayanan atau sasaran perubahan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sistem klien dalam program ini adalah pekerja dan pemberi kerja di Yayasan Rumah Yatim Kiaracondong.

4) Sistem Pendukung

Sistem pendukung merupakan orang-orang yang memberikan dukungan atau masyarakat yang memiliki perhatian akan keberhasilan perubahan. Sistem pendukung dalam program ini adalah Serikat Pekerja Nasional Kota Bandung.

5) Sistem Pengontrol

Sistem pengontrol merupakan orang-orang yang memiliki otoritas formal atau kekuasaan untuk menerima atau menolak serta mengarahkan implementasi perubahan.

6) Sistem Pelaksana

Sistem pelaksana merupakan orang-orang yang memiliki tugas rutin melaksanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan. Sistem pelaksana dalam program ini adalah pekerja Yayasan Rumah Yatim Kiaracondong, pekerja sosial masyarakat, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bandung

7) Sistem Sasaran

Sistem sasaran merupakan orang, struktur, atau kebijakan yang perlu dirubah agar menerima manfaat perubahan seperti yang diharapkan. Sistem sasaran terdiri dari Yayasan Rumah Yatim

8) Sistem Aksi

Sistem aksi merupakan orang-orang dari berbagai sistem yang memiliki peran aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana perubahan. Sistem aksi dalam program ini terdiri dari pekerja sosial, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bandung.

e. Metode dan Teknik

Metode yang akan digunakan praktikan dalam melaksanakan program “Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian Pemberi kerja dalam Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” adalah dengan metode *Community Organization and Community Development (COCD)* atau pengorganisasian dan pengembangan komunitas. Sedangkan teknik yang akan digunakan adalah dengan dua teknik kampanye diantaranya penyuluhan sosial, kampanye edukasi dan kampanye persuasi. Penyuluhan sosial bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh masyarakat dalam memperbaiki kondisi sosial yang ada di lingkungannya. Kampanye edukasi merupakan upaya untuk memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang suatu isu atau masalah yang penting. bertujuan meyakinkan sistem sasaran untuk

mengubah cara berpikir dan bertindak yang selama ini kurang sejalan dengan hal yang seharusnya terjadi. Kampanye persuasi adalah bentuk kampanye yang bertujuan untuk mempengaruhi keyakinan, pandangan, atau perilaku seseorang atau kelompok orang dengan cara menyampaikan pesan persuasif. Pesan persuasif dalam kampanye ini dapat berupa ajakan, imbauan untuk mengubah pandangan atau perilaku orang yang menjadi target kampanye, sehingga meyakinkan sistem sasaran merasa teryakinkan untuk menerima dan mendukung berbagai pandangan terkait dengan masalah yang sedang terjadi.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

Untuk melaksanakan program “Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian Pemberi Kerja dalam Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” diperlukan biaya sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tabel Rencana Anggaran Biaya Program “Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian Pemberi Kerja dalam Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”

No	Jenis Kebutuhan	Volume	Satuan	Harga Satuan (RP)	Jumlah (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Logistik					
	Alat Tulis Kantor (ATK)	2	Paket	75.000	150.000
	Banner Kegiatan	1	Lembar	75.000	75.000
	Brosur BPJS Ketenagakerjaan	25	Unit	5.000	125.000
	Hadiah Sembako	3	Paket	75.000	225.000
Jumlah I					575.000
2. Honorarium					
	BPJS Ketenagakerjaan	2	Orang/Kegiatan	1.000.000	2.000.000
Jumlah II					2.000.000
3. Konsumsi					
	Snack Peserta	32	Box	10.000	320.000
	Snack Panitia	5	Box	10.000	50.000
	Snack Narasumber	2	Box	10.000	20.000
Jumlah III					390.000
Jumlah Keseluruhan					2.965.000

Rincian peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rincian Peralatan Program “Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian Pemberi Kerja dalam Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”

No	Nama Alat	Jumlah
1.	Sound system	3
2.	Microfon	5
3.	Laptop	2
4.	Proyektor	1
5.	Layar proyektor	1
6.	Kursi	40
7.	Meja	5

g. Analisis Kelayakan Program

Analisis kelayakan dari program “Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian Pemberi kerja dalam Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Analisis Kelayakan Program “Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian Pemberi Kerja dalam Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”

Faktor Internal	Strength: 1. Terdapatnya narasumber yang ahli dibidangnya 2. Kegiatan sejalan dengan tujuan pemerintah	Weakness: 1. Terdapat kemungkinan sasaran tidak memahami materi dengan maksimal
Faktor Eksternal		
Opportunities: 1. Meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja organisasi nirlaba 2. Pekerja memperoleh perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan	Strategi SO: 1. Berkordinasi dengan lembaga pemerintah 2. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan pada program JHT bagi pekerja organisasi nirlaba	Strategi WO: 1. Penyusunan kegiatan sosialisasi yang menarik dengan melibatkan peserta dalam sesi diskusi 2. Penyampaian informasi pada sosialisasi dengan menghindari

		penggunaan istilah bahasa asing
<p>Treats:</p> <p>1. Seruluh sasaran tidak bisa mengikuti sosialisasi dengan khidmat</p>	<p>Strategi ST:</p> <p>1. Menyediakan hadiah bagi peserta terbaik</p> <p>2. Menyediakan tempat yang nyaman dan strategis</p>	<p>Strategi WT:</p> <p>1. Melaksanakan forum di waktu pagi agar lebih bersemangat</p> <p>2. Meningkatkan intensitas pembinaan kepada yayasan terkait</p> <p>3. Melakukan penilaian monitoring dan evaluasi kegiatan</p>

h. Jadwal dan Langkah-Langkah

Langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program “Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian Pemberi Kerja dalam Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan program yang memiliki tujuan mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan program. Tahap persiapan terdiri dari:

a) Penyusunan Kepanitiaan

Penyusunan kepanitiaan dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam penyusunan panitia seluruh sumber daya manusia diberikan tugas dan fungsi sesuai bidangnya masing-masing agar memudahkan keberlangsungan pelaksanaan program.

b) Penyusunan Rencana Kegiatan

Setelah didapatkannya susunan panitia maka seluruh unsur kepanitiaan mengadakan pertemuan untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal-hal yang akan dibahas pada tahap ini mencakup diskusi terkait dengan bentuk kegiatan, penyusunan jadwal kegiatan, tempat kegiatan, indikator keberhasilan kegiatan dan hal penting lainnya yang diperlukan selama kegiatan inti berlangsung.

c) Penyusunan Proposal dan Undangan Kegiatan

Penyusunan proposal bertujuan untuk mempermudah dalam proses izin pelaksanaan program dari berbagai pihak yang akan

dilibatkan dalam pelaksanaan program kegiatan. Untuk mendukung keberhasilan program maka diperlukan penyebaran undangan kepada lembaga-lembaga ataupun orang yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam upaya mewujudkan keberhasilan berjalannya kegiatan.

d) Rapat Panitia

Untuk memastikan segala hal yang diperlukan sudah siap maka diperlukan pertemuan panitia sebagai media koordinasi terakhir sebelum program dilaksanakan. Dengan adanya pertemuan ini panitia dapat menyamakan persepsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan meminimalisir kesalahan ketika program sedang berlangsung.

2) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan program “Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian Pemberi Kerja dalam Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” terdapat kegiatan sosialisasi tentang program BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan agar pekerja dan pihak Yayasan Rumah Yatim memahami pentingnya Jaminan Sosial bagi setiap pekerja dan kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan di Yayasan Rumah Yatim agar semua pihak internalnya mampu mengikuti keberjalanannya kegiatan sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan ini.

Untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan maka dalam kegiatan ini melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagai pengawas serta BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung sebagai penyedia narasumber dalam kegiatan sosialisasi untuk memaparkan hal-hal penting tentang regulasi pemberi kerja dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjanya dan berbagai program di BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diikutinya.

Adapun susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Tabel Jadwal Kegiatan Program “Peningkatan Pemahaman Dan Kepedulian Pemberi Kerja Dalam Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”

No	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Panitia	07.00 – 07.30	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.00 – 08.15	15 Menit	Master of Ceremony

4.	Sambutan	08.15 – 08.35	20 Menit	Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Lurah Kebon Kangkung
5.	Pembacaan Doa	08.35 – 08.40	5 Menit	Panitia
6.	Penyampaian Materi tentang Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian Pemberi kerja dalam Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	08.40 – 10.10	90 Menit	BPJS Ketenagakerjaan
7.	Sesi Tanya Jawab	10.10 – 10.30	20 Menit	Peserta dan Pemateri
8.	Kuis Berhadiah	10.30 – 10.45	15 Menit	Peserta dan Pemateri
9.	Dokumentasi	10.45 – 10.50	5 Menit	Panitia
10.	Penutupan	10.50 – 10.55	5 Menit	Master of Ceremony

3) Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran merupakan tahapan terakhir dalam rangkaian kegiatan dalam sebuah program. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi evaluasi kegiatan dan pelaporan kegiatan.

a) Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan refleksi atau peninjauan antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan berlangsung. Tujuan dilakukannya evaluasi proses ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses berlangsungnya kegiatan dan proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi hasil merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan atau program. Tujuan dilakukannya evaluasi hasil adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan terhadap indikator keberhasilan setelah pelaksanaan program.

b) Pelaporan Program

Pelaporan Program Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian Pemberi kerja dalam Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dari pelaksanaan program kepada pihak yang memiliki otoritas dan yang sudah terlibat dalam pelaksanaan program, yaitu Pemerintahan Kelurahan Kebon Kangkung dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung. Pelaporan pertanggungjawaban kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk menyusun program-program yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.

B. Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

Pada profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, praktikan menemukan isu terdapatnya pendistribusian bantuan sosial yang kurang merata di Kelurahan Kebon Kangkung. Dalam prosesnya praktikan menggunakan metode pengumpulan analisis data sekunder, baik berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, data statistik, dan studi literatur dalam penyusunan laporan praktikum pada profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial.

1. Gambaran Umum Masalah

Penyelenggaraan bantuan sosial merupakan upaya pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan sosial ini dapat berupa bantuan tunai, sembako, bantuan pangan, bantuan perumahan, bantuan kesehatan, dan lain-lain. Penyaluran bantuan sosial dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga yang ditunjuk, seperti Dinas Sosial, Baznas, dan lain-lain. Proses penyelenggaraan bantuan sosial dimulai dengan pengidentifikasian penerima bantuan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Setelah itu, penerima bantuan akan didata dan diverifikasi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat dan layak menerima bantuan tersebut. Setelah proses verifikasi selesai, bantuan sosial akan disalurkan ke penerima bantuan melalui mekanisme yang telah ditentukan, seperti transfer tunai, pengiriman sembako, atau penyerahan langsung di lokasi.

Namun, dalam pelaksanaannya, terkadang masih terdapat masalah seperti ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan, pemilihan penerima bantuan yang tidak tepat, serta terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan bantuan sosial. Beberapa warga di Kota Bandung mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan sosial meskipun memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan kriteria penerima bantuan dan minimnya sosialisasi mengenai bantuan sosial. Selain itu, beberapa warga juga mengeluhkan bahwa bantuan sosial didistribusikan

tidak merata, sehingga ada warga yang mendapatkan bantuan sosial berkali-kali, sedangkan warga lain tidak mendapatkan sama sekali.

Selain itu, terdapat dugaan praktik korupsi dan nepotisme dalam pendistribusian bantuan sosial di Kota Bandung. Beberapa kasus dugaan korupsi dalam pendistribusian bantuan sosial pernah terjadi, seperti penerimaan suap untuk memasukkan nama calon penerima bantuan sosial, serta penggunaan data palsu untuk memperoleh bantuan sosial. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.

Salah satu masalah yang ditemui di Kelurahan Kebon Kangkung adalah pendistribusian bantuan Set Top Box dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung. Menurut data Diskominfo terdapat kurang lebih 100.000 rumah tangga layak menerima bantuan Set Top Box. Untuk jumlah penerima manfaat di Kelurahan Kebon Kangkung sendiri terdapat 100 rumah tangga yang tercatat sebagai penerima bantuan Set Top Box. Tetapi dari jumlah tersebut masih terdapat penerima bantuan yang sudah beralih domisili dan sebagian lainnya sudah tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan.

Kurangnya koordinasi antar instansi terkait juga menjadi faktor penyebab penyaluran bantuan Set Top Box kurang merata di Kota Bandung khususnya di Kelurahan Kebon Kangkung. Terkadang terdapat dua instansi yang memberikan bantuan sosial yang sama kepada warga yang berbeda, sehingga ada warga yang mendapatkan bantuan sosial berkali-kali, sedangkan warga lain tidak mendapatkan sama sekali.

2. Tinjauan Konsep

a. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan Sosial merupakan instrumen kebijakan utama pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta membangun dan melindungi individu, keluarga, dan komunitas yang paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya, menurut Barrientos (2019) dalam Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI. (2022).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial..

Sedangkan pengertian Bantuan Sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan

terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

b. Sumber Dana Bantuan Sosial

Terdapat tiga sumber dana bantuan sosial yaitu:

1) Negara

Sumber dana bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun oleh pemerintah bersama dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR).

2) Hibah

Sumber dana bantuan sosial yang berasal dari pemberian pemerintah dalam negeri ataupun luar negeri untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesejahteraan sosial.

3) Masyarakat/Swasta

Sumber dana bantuan sosial yang berasal dari swadaya masyarakat yang dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat dalam wilayah tertentu. Selain itu ada yang bersumber dari dana swasta yang berasal dari dana tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya.

c. Jenis dan Bentuk Bantuan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial telah mengatur jenis-jenis dari bantuan sosial adalah sebagai berikut:

1) Bantuan Langsung

Bantuan sosial langsung adalah bentuk bantuan sosial yang diberikan langsung kepada individu atau keluarga penerima manfaat dengan tujuan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

2) Penyediaan Aksesibilitas

Bantuan sosial yang didistribusikan kepada penerima yang manfaatnya dapat dirasakan melalui penyediaan akses pelayanan publik bagi penerima manfaatnya yang memiliki keterbatasan fisik atau cacat. Tujuan dari bantuan sosial ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendorong inklusi sosial bagi orang-orang yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas, layanan, informasi, dan lingkungan yang dibutuhkan

3) Penguatan Kelembagaan

Bantuan sosial penguatan kelembagaan adalah bentuk bantuan sosial yang diberikan untuk memperkuat kemampuan lembaga atau organisasi dalam memberikan pelayanan publik dan memajukan kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga dalam menyediakan layanan publik,

memajukan pengembangan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

d. Prinsip-Prinsip Pemberian Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam pemberian bantuan sosial setidaknya harus memenuhi empat kriteria berikut:

1) Selektif;

Diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari risiko sosial.

2) Memenuhi Persyaratan Penerima Bantuan;

Kriteria persyaratan penerima meliputi:

- a) memiliki identitas yang jelas; dan
- b) berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

3) Bersifat Sementara dan Tidak Terus Menerus, Kecuali dalam Keadaan Tertentu Dapat Berkelanjutan;

Dapat diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk kriteria kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. Selain itu dapat diartikan juga sebagai bantuan yang diberikan secara terus-menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

4) Sesuai Tujuan Penggunaan.

Pemberian bantuan sosial ditujukan pada hal sebagai berikut:

a) Rehabilitas Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

b) Perlindungan Sosial

Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

c) Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

d) Jaminan Sosial

Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

e) Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

f) Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian supaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

e. Set Top Box

Set Top Box atau sering disebut juga STB adalah alat berisikan perangkat dekoder, dimana berguna mengatur saluran TV yang akan diterima untuk selanjutnya dipilih sesuai kebutuhan serta memeriksa hak akses pengguna atas saluran tersebut lalu selanjutnya akan menghasilkan keluaran berupa gambar, suara dan layanan lainnya. Dekoder bisa dikatakan sebagai salah satu perangkat teknologi informasi, sebab jika dilihat dari cara kerjanya Dekoder bekerja satu arah serta dapat juga bekerja tanpa campur tangan manusia.

Cara Kerja Set Top Box terbagi menjadi dua yaitu kerja pada perangkat keras dan juga pada perangkat lunak. Berikut ini penjelasan masing-masingnya.

1) Perangkat Keras

Sebenarnya prinsip kerja STB mirip dengan penerima sinyal televisi biasa pada TV analog. Dilihat prinsip kerjanya, Dekoder berfungsi juga untuk mengubah sinyal digital dari satelit, kabel, maupun internet kedalam format analog supaya bisa ditampilkan pada layar TV analog maupun perangkat analog lainnya. Dekoder biasanya digunakan pada sistem kabel, satelit, IPTV serta TV digital terrestrial. Dalam penggunaannya, umumnya dekoder membutuhkan kartu akses dari penyedia layanan TV digital yang bersangkutan. Kartu akses ini fungsinya adalah untuk menyaring saluran televisi yang diterima lalu selanjutnya disesuaikan dengan tayangan yang dibayar penonton. Untuk saluran atau channel biasanya berbeda-beda, tergantung kebijakan dari penyedia layanan televisi berbayar.

2) Perangkat Lunak

Pada sebuah perangkat Set Top Box juga terdapat perangkat lunak, dimana berfungsi atau berperan untuk mengatur setelan, seperti pengaturan bahasa, pengaturan penerimaan sinyal, pengaturan gambar dan lain sebagainya.

3. Asesmen

Praktikum laboratorium pada profil Analisis Jaminan Sosial dilakukan pada tanggal 22 Februari hingga 4 Maret 2023. Praktikan melakukan asesmen dengan pendalaman data primer melalui metode wawancara dengan beberapa warga beserta ketua RW dan RT setempat. Selain itu praktikan melakukan pendalaman data sekunder melalui laman Dinas Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai pemberi bantuan. Teknik yang digunakan dalam proses asesmen antara lain teknik analisis pohon masalah, dan penelitian kepustakaan.

a. Identifikasi Masalah

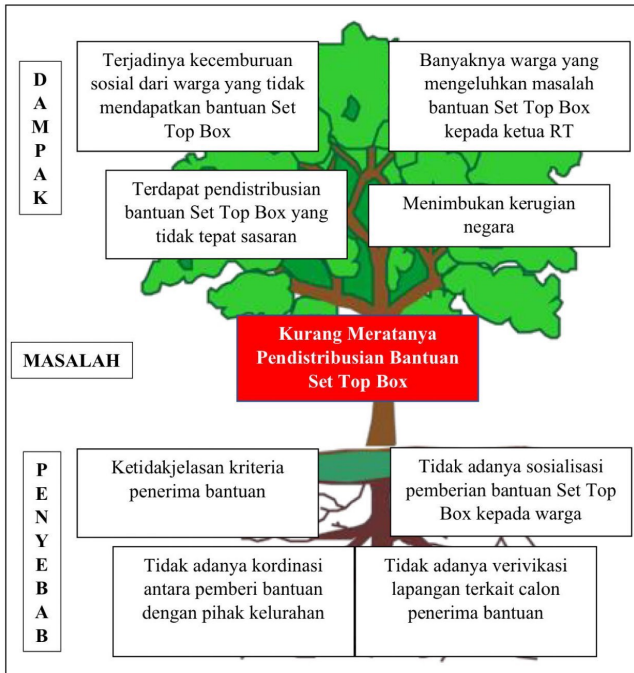
Bantuan set top box adalah program pemerintah yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menonton televisi secara digital. Kebijakan siaran digital untuk wilayah Kota Bandung dimulai pada Bulan Desember 2023. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung melalui Diskominfo menyelenggarakan bantuan Set Top Box bagi warga yang termasuk pada desil I dan desil II agar tetap bisa menikmati hiburan siaran televisi. Namun, sayangnya dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan Set Top Box di Kota Bandung kurang merata. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga yang mengeluh karena belum menerima bantuan tersebut atau terlambat mendapatkannya. Warga yang belum menerima bantuan tersebut merasa kecewa karena telah menunggu lama namun tidak kunjung mendapatkannya.

Sementara itu, di beberapa wilayah, bantuan tersebut telah didistribusikan dengan cepat dan tepat sasaran. Hal ini tentunya membuat warga yang telah menerima bantuan merasa senang dan terbantu. Namun, di wilayah lain, penyaluran bantuan masih terkendala, baik karena terbatasnya stok bantuan maupun karena kurangnya koordinasi dalam penyalurannya. Di wilayah Kelurahan Kebon Kangkung sendiri dengan jumlah 100 Set Top Box yang disalurkan, terdapat beberapa Set Top Box diterima oleh masyarakat yang tidak masuk kriteria penerima manfaat. Selain itu dari hasil wawancara praktikan bersama pengurus RT dan RW terdapat bantuan yang disalurkan kepada warganya yang sudah beralih domisili. Hal tersebut mengundang kecurigaan bahwa data yang digunakan adalah data yang belum mendapatkan pembaharuan sehingga bantuan Set Top Box di Kelurahan Kebon Kangkung kurang merata.

Dampak dari kurang meratanya penyaluran bantuan set top box dapat menyebabkan ketidakpuasan warga dan menimbulkan ketidakpercayaan

terhadap program pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperbaiki penyaluran bantuan agar lebih merata dan tepat sasaran.

Berdasarkan deskripsi latar masalah yang terjadi, praktikan menggunakan metode analisis pohon masalah dalam menentukan fokus masalah yang terjadi pada Jaminan Sosial sebagai berikut:



Gambar 2.2 Gambar Analisis Pohon Masalah Bantuan Sosial Set Top Box

1) Penyebab Masalah

a) Ketidakjelasan Kriteria Penerima Bantuan Set Top Box

Kriteria calon penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Diskominfo masih bersifat multitafsir dan tidak ada indikator prioritas penerima bantuan. Ketidakjelasan kriteria penerima bantuan sosial dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya transparansi dalam proses seleksi penerima bantuan sosial, tidak adanya mekanisme pengawasan yang memadai, atau

tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan penerima bantuan sosial. Dampak dari ketidakjelasan kriteria penerima bantuan Set Top Box adalah masyarakat yang berhak dan membutuhkan bantuan sosial tidak mendapatkan akses yang sama dengan masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan sosial. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga penyelenggara bantuan sosial.

- b) Tidak Adanya Sosialisasi Pemberian Bantuan Set Top Box
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung sebagai pemberi bantuan tidak mengadakan sosialisasi terkait pemberian bantuan sosial menjadi masalah yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap bantuan Set Top Box yang seharusnya mereka dapatkan. Sosialisasi yang kurang atau tidak dilakukan dengan baik dapat membuat masyarakat tidak mengetahui adanya program bantuan sosial yang tersedia, kriteria penerima, jenis bantuan yang diberikan, atau proses pendaftaran yang harus diikuti. Akibatnya, masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial mungkin tidak menyadari bahwa mereka berhak menerima bantuan, atau tidak mengetahui cara untuk mendaftar dan mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat tentang program bantuan sosial juga dapat menyebabkan masyarakat yang tidak membutuhkan bantuan sosial ikut mendaftar, sehingga mengakibatkan alokasi bantuan yang tidak merata.

- c) Tidak Adanya Koordinasi Antara Pemberi Bantuan dengan Pihak Kelurahan

Tidak adanya koordinasi sebelum dilaksanakannya pendistribusian bantuan kepada warga antara Diskominfo dengan pihak kelurahan terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan Set Top Box. Tidak adanya koordinasi antara pemberi bantuan dengan pihak kelurahan menjadi masalah serius dalam distribusi bantuan Set Top Box kepada penerima manfaat. Ketika pihak pemberi bantuan tidak berkoordinasi dengan pihak kelurahan atau desa, maka distribusi bantuan sosial yang dilakukan mungkin tidak merata dan terdapat *overlap* dalam pemberian bantuan. Pihak kelurahan memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi masyarakat di wilayahnya, sehingga mereka dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kebutuhan dan prioritas bantuan sosial yang harus diberikan. Tanpa koordinasi yang baik antara pemberi bantuan dengan pihak kelurahan, maka risiko terjadinya pemilihan penerima bantuan

yang tidak tepat atau masyarakat yang sebenarnya membutuhkan tidak tercakup dalam daftar penerima bantuan akan semakin besar.

d) Tidak Adanya Verifikasi Lapangan Terkait Calon Penerima Bantuan Set Top Box

Pihak penyalur dalam menentukan calon penerima bantuan tidak disertai verifikasi dan validasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi dari setiap calon penerima bantuan apakah layak diberikan bantuan atau tidak. Verifikasi lapangan sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersebut benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Tanpa verifikasi lapangan yang baik, risiko terjadinya kecurangan dalam pemberian bantuan sosial semakin besar. Banyak kasus di mana bantuan sosial diberikan kepada orang-orang yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, bahkan terkadang ada pula pihak-pihak yang sengaja memanipulasi data atau membuat daftar fiktif agar dapat menerima bantuan sosial.

2) Dampak Masalah

a) Terdapat Pendistribusian Bantuan Set Top Box yang Tidak Tepat Sasaran

Pada beberapa RW terdapat bantuan sosial yang diterima oleh warga yang secara kondisi ekonominya tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Selain itu terdapat juga bantuan sosial yang diterima oleh warga yang telah berpindah domisili. Pendistribusian bantuan Set Top Box (STB) yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan masalah dalam pemanfaatan teknologi digital terutama bagi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tersebut. Dalam hal ini, jika bantuan STB tidak tepat sasaran, maka orang yang seharusnya memperoleh bantuan tersebut tidak bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik. Hal ini tentunya akan mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut.

b) Terjadinya Kecemburuan Sosial Dari Warga yang Tidak Mendapatkan Bantuan Set Top Box

Kecemburuan sosial merupakan perasaan tidak puas atau tidak adil terhadap orang lain yang dianggap lebih beruntung atau mendapatkan keuntungan lebih banyak daripada dirinya sendiri. Kecemburuan sosial terjadi disebabkan oleh terdapatnya pendistribusian bantuan Set Top Box yang tidak tepat sasaran mengakibatkan beberapa warga yang layak dan berhak kemudian tidak mendapatkan bantuan. Kecemburuan sosial ini bila tidak

ditangani akan mengakibatkan konflik horizontal antar warga dan kurangnya kepercayaan warga kepada pemerintah sebagai pemberi bantuan. Terjadinya kecemburuan sosial dari warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial adalah suatu hal yang dapat terjadi dalam proses pendistribusian bantuan Set Top Box.

c) Banyaknya Warga yang Mengeluhkan Masalah Bantuan Set Top Box Kepada Ketua RT

Banyaknya warga yang mengeluhkan masalah bantuan sosial kepada ketua RT dapat menunjukkan adanya masalah dalam proses pendistribusian bantuan Set Top Box. Warga yang merasa tidak mendapatkan bantuan sosial yang seharusnya dapat mereka tidak puas atau tidak adil, sehingga mencari jalan keluar dengan mengeluhkan masalah tersebut kepada ketua RT sebagai wakil dari pemerintah setempat. Ketua RT sebagai pemimpin yang paling dekat dengan warga mendapatkan imbas dari permasalahan pendistribusian bantuan sosial ini. Warga yang merasa dirinya berhak menerima bantuan mengeluhkan alasan tidak tersalurkannya bantuan Set Top Box kepada mereka sedangkan dari segi kriteria warga tersebut layak mendapatkan bantuan.

d) Menimbulkan Kerugian Bagi Negara

Dengan adanya ketidakmerataan distribusi bantuan sosial, hal ini menyebabkan kerugian bagi negara karena bantuan sosial yang diturunkan seharusnya ditujukan kepada masyarakat miskin tidak dijalankan sesuai rencana dan tujuan yang ditetapkan, sehingga upaya pemerintah dalam membantu kelompok miskin menjadi kurang efektif dan efisien.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, praktikan mengambil fokus masalah pada profil Analisis Sumber Dana Bantuan sosial ini adalah Kurang Meratanya Pendistribusian Bantuan Set Top Box di Kelurahan Kebon Kangkung.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan analisis masalah diatas, dapat ditentukan bahwa kebutuhan yang sesuai dengan permasalahan ketidakmerataan distribusi bantuan Set Top Box di Kelurahan Kebon Kangkung adalah sebagai berikut:

- 1) Media kordinasi pendistribusian bantuan sosial
- 2) Pembaharuan data daftar penerima bantuan sosial
- 3) Penentuan indikator kemiskinan wilayah Kelurahan Kebon Kangkung
- 4) Penentuan prioritas penerima bantuan sosial wilayah Kebon Kangkung
- 5) Sistem penyaluran bantuan sosial secara satu pintu

- 6) Sosialisasi penyaluran bantuan sosial yang akan diterima warga

c. Identifikasi Potensi Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam usaha kesejahteraan sosial atau praktik pekerjaan sosial, selain itu sistem sumber pekerjaan sosial merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan suatu masalah. Pincus dan Minahan (1973) dalam Yurika Maha (2016) mengklasifikasikan sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi tiga jenis yaitu sistem sumber informal atau alamiah, sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan. Sistem sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan ketidakmerataan distribusi bantuan Set Top Box di Kelurahan Kebon Kangkung adalah sebagai berikut:

1) Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal yang dimanfaatkan dalam upaya pemecahan permasalahan ini adalah:

a) Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat yang dimaksudkan adalah orang-orang yang dapat memberikan pengaruh di lingkungan Kelurahan Kebon Kangkung, seperti tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh politik. Tokoh masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai pemberi nasihat dan masukan mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.

b) Ketua RT dan RW di Wilayah Kelurahan Kebon Kangkung

Ketua RT dan RW sebagai aparat pemerintahan yang paling dekat dengan warga dapat dimanfaatkan sebagai penengah dalam perbedaan proses pelaksanaan program. Selain itu Ketua RW dan RT juga dapat dimanfaatkan sebagai sistem pengontrol dalam kegiatan.

c) Pekerja Sosial

Pekerja sosial dalam hal ini akan berperan sebagai inisiator dan mediator. Pekerja sosial bertugas untuk menjembatani atau menjadi penghubung antara pihak pengelola penyaluran bantuan sosial. Pekerja sosial juga menentukan perencanaan intervensi yang dapat mendukung pelaksanaan program pemerataan distribusi bantuan sosial

2) Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal yang dimanfaatkan dalam upaya pemecahan permasalahan ini adalah:

a) Karang Taruna Kelurahan Kebon Kangkung

Pengetahuan dan wawasan dari anggota Karang Taruna dapat membantu pencapaian keberhasilan program dalam menangani

permasalahan pada bantuan sosial ini. Karang Taruna dapat memberikan berbagai informasi dan pengetahuannya tentang pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial yang ideal dan sesuai dengan perkembangan zaman.

- b) Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kebon Kangkung
Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan sebagai struktur yang terdapat dalam pemerintahan Kelurahan Kebon Kangkung memiliki peran memfasilitasi forum kegiatan karena sesuai dengan tugas dan fungsi kerjanya dalam pemerintahan kelurahan.

3) Sistem Sumber Kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan yang dimanfaatkan dalam upaya pemecahan permasalahan ini adalah:

- a) Dinas Sosial Kota Bandung

Dinas Sosial berperan dalam pengelolaan bantuan sosial dengan melakukan supervisi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan program bantuan sosial. Dalam penanganan masalah ini Dinas Sosial berperan membantu dalam penyusunan indikator kemiskinan yang akan diterapkan di wilayah Kelurahan Kebon Kangkung.

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Banyaknya warga yang mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan sosial yang seharusnya, juga menjadi latar belakang pentingnya adanya program ini. Masalah ketidakmerataan distribusi bantuan Set Top Box dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi mengenai bantuan sosial, ketidakjelasan kriteria penerima bantuan, praktik korupsi dan nepotisme, serta minimnya pengawasan dan koordinasi antar instansi terkait. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat, di mana warga yang membutuhkan bantuan sosial tidak mendapatkan bantuan tersebut, sedangkan warga yang seharusnya tidak memenuhi kriteria penerima bantuan justru mendapatkan bantuan.

Dari beberapa kejadian yang ditemui di Kelurahan Kebon Kangkung mengenai pendistribusian bantuan sosial masih kurang merata yang disebabkan kurangnya koordinasi antara pihak pemberi bantuan dengan penerima bantuan, maka diperlukan sebuah program yang mampu menjembatani secara lebih profesional dalam pendistribusian bantuan sosial. Program Bantuan Sosial Tepat Sasaran atau “Bantaran” dirancang dengan bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan identifikasi terhadap warga yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial, melalui verifikasi data dan koordinasi antar instansi terkait. Dengan adanya program ini, diharapkan bantuan sosial dapat didistribusikan secara tepat

sasaran, sehingga warga yang membutuhkan bantuan sosial dapat terlayani dengan baik oleh pemerintah setempat. Selain itu, program Bantuan Sosial Tepat Sasaran juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendistribusian bantuan sosial, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya praktik korupsi dan nepotisme. Dengan begitu, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan bantuan sosial di Kelurahan Kebon Kangkung.

b. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum

Tujuan umum dari Program “Bantuan Sosial Tepat Sasaran (Bantaran)” adalah untuk menciptakan pemerataan pada setiap pendistribusian bantuan sosial bagi masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung.

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Program Bantuan Sosial Tepat Sasaran (Bantaran) di Kelurahan Kebon Kangkung adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan sarana kordinasi dalam pendistribusian bantuan sosial
- b) Menciptakan pendistribusian bantuan sosial dari satu pintu
- c) Menciptakan pendistribusian bantuan sosial secara tepat sasaran
- d) Pengelolaan bantuan sosial yang lebih transparan

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Dalam upaya menangani permasalahan tentang Bantuan Sosial yang terjadi di Kelurahan Kebon Kangkung, maka program yang akan dilaksanakan adalah “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran)” yang berisi kegiatan berikut:

1) Kegiatan Pembentukan Badan Kordinasi Penerima Manfaat

Pembentukan Badan Kordinasi Penerima Manfaat dilaksanakan secara musyawarah resmi di Kantor Kelurahan dengan peserta pengurus RW, RT dan perwakilannya. Perwakilan tersebut akan menjadi anggota dari Badan Kordinasi Penerima Manfaat yang akan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendistribusian bantuan sosial di Kelurahan Kebon Kangkung.

2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Kordinasi Penerima Manfaat

Dengan adanya badan organisasi baru dalam pemerintahan Kelurahan Kebon Kangkung maka diperlukan pelatihan kepada seluruh anggota Badan Kordinasi Penerima Manfaat agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya.

- 3) Penyusunan Indikator Kemiskinan dan Prioritas Penerima Manfaat Wilayah Kelurahan

Kebutuhan dalam upaya pemerataan penyaluran bantuan sosial diantaranya adalah diperlukannya indikator kemiskinan yang sesuai dengan kondisi Kelurahan Kebon Kangkung. Indikator tersebut akan dijadikan dasar dalam menentukan skala prioritas orang-orang yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Inisiator

Sistem inisiator merupakan individu-individu yang pertama kali melihat adanya masalah. Sistem inisiator dalam program ini adalah Pekerja Sosial

- 2) Sistem Agen Perubahan

Sistem agen perubahan merupakan individu-individu yang akan memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinir perubahan. Sistem agen perubahan dalam program ini adalah pekerja sosial dan Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kebon Kangkung

- 3) Sistem Klien

Sistem klien merupakan sekelompok orang yang akan menerima pelayanan atau sasaran perubahan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sistem klien dalam program ini adalah masyarakat dan aparat pemerintahan Kelurahan Kebon Kangkung.

- 4) Sistem Pendukung

Sistem pendukung merupakan orang-orang yang memberikan dukungan atau masyarakat yang memiliki perhatian akan keberhasilan perubahan. Sistem pendukung dalam program ini adalah tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan setempat

- 5) Sistem Pengontrol

Sistem pengontrol merupakan orang-orang yang memiliki otoritas formal atau kekuasaan untuk menerima atau menolak serta mengarahkan implementasi perubahan. Sistem pengontrol dalam program ini adalah Dinas Sosial Kota Bandung.

- 6) Sistem Pelaksana

Sistem pelaksana merupakan orang-orang yang memiliki tugas rutin melaksanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan. Sistem pelaksana dalam program ini adalah Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kebon Kangkung, Pekerja Sosial, dan Dinas Sosial Kota Bandung.

7) Sistem Sasaran

Sistem sasaran merupakan orang, struktur, atau kebijakan yang perlu dirubah agar menerima manfaat perubahan seperti yang diharapkan. Sistem sasaran terdiri dari Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan dan pengurus RW setempat.

8) Sistem Aksi

Sistem aksi merupakan orang-orang dari berbagai sistem yang memiliki peran aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana perubahan. Sistem aksi dalam program ini terdiri dari pekerja sosial, dan Dinas Sosial Kota Bandung.

e. Metode dan Teknik

Metode yang akan digunakan praktikan dalam melaksanakan program “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran)” adalah dengan metode *Community Organization and Community Development* (COCD) atau perngorganisasin dan pengembangan komunitas. Dalam pengimplementasiannya digunakan strategi kolaborasi dengan menciptakan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan kegiatannya. Strategi kolaborasi pun didukung dengan penerapan taktik pelatihan yaitu dengan peningkatan keterampilan melalui perluasan partisipasi atau pemberdayaan kelompok-kelompok yang memerlukan peningkatan keterampilan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini akan menggunakan teknik *Focus Group Discussion* (FGD). Penerapan teknik ini memungkinkan pencapaian tujuan dan kesepakatan melalui diskusi. Dalam FGD ini akan dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan indikator kemiskinan wilayah kelurahan yang akan dijadikan acuan dalam penentuan skala prioritas penerima manfaat bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat wilayah Kelurahan Kebon Kangkung.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

Untuk melaksanakan program “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran)” diperlukan biaya sebagai berikut:

Tabel 2.6 Tabel Rencana Anggaran Biaya Program “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran)”

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (RP)	Jumlah (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Logistik				
	Alat Tulis Kantor	3	Paket	75.000	225.000

	Banner kegiatan	2	Lembar	75.000	150.000
	Jumlah I				375.000
2.	Honorarium				
	Dinas Sosial Kota Bandung	2	Orang/Kegiatan	1.000.000	2.000.000
	Jumlah II				2.000.000
3.	Konsumsi				
	Snack Peserta	40	Box	10.000	400.000
	Snack Panitia	5	Box	10.000	50.000
	Snack Narasumber	2	Box	10.000	20.000
	Jumlah III				470.000
	Jumlah Keseluruhan				2.845.000

Rincian peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Tabel Peralatan Program “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran)”

No	Nama Alat	Jumlah
1.	Sound system	3
2.	Microfon	5
3.	Laptop	2
4.	Proyektor	1
5.	Layar proyektor	1
6.	Kursi	50
7.	Meja	5

g. Analisis Kelayakan Program

Analisis kelayakan dari program “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran)” di Kelurahan Kebon Kangkung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Tabel Analisis Kelayakan Program “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran)”

<p>Faktor Internal</p>	<p>Strength:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan melibatkan pihak ahli dibidangnya 2. Kegiatan sejalan dengan tujuan pemerintah 3. Kegiatan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat 	<p>Weakness:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kemungkinan peserta tidak memahami materi yang dibahas
<p>Faktor Eksternal</p> <p>Opportunities:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan distribusi bantuan sosial yang merata 2. Memperoleh indikator kemiskinan yang sesuai dengan kondisi wilayah setempat 	<p>Strategi SO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkordinasi dengan lembaga pemerintah 2. Pelaksanaan program memanfaatkan sikap gotong-royong dan penggabungan kearifan lokal yang dimiliki wilayah setempat 3. Menggunakan teknologi sesuai perkembangan zaman 	<p>Strategi WO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kegiatan yang menarik dengan pelibatan peserta dalam sesi diskusi 2. Penyampaian informasi pada sosialisasi dengan menghindari penggunaan istilah bahasa asing
<p>Treats:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran program memiliki perbedaan pendapat 	<p>Strategi ST:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong sikap gotong-royong dan mendahulukan kepentingan masyarakat 2. Menyediakan tempat yang nyaman dan strategis 	<p>Strategi WT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan forum diskusi pada waktu pagi agar lebih bersemangat 2. Melibatkan Dinas sebagai fasilitator dalam proses diskusi

h. Jadwal dan Langkah-langkah

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam program “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran)” adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan program yang memiliki tujuan mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan program. Tahap persiapan dalam program ini terdiri dari:

a) Penyusunan Kepanitiaan

Penyusunan kepanitiaan dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam penyusunan panitia seluruh sumber daya manusia diberikan tugas dan fungsi sesuai bidangnya masing-masing agar memudahkan keberlangsungan pelaksanaan program.

b) Penyusunan Rencana Kegiatan

Setelah didapatkannya susunan panitia maka seluruh unsur kepanitiaan mengadakan pertemuan untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal-hal yang akan dibahas pada tahap ini mencakup diskusi terkait dengan bentuk kegiatan, penyusunan jadwal kegiatan, tempat kegiatan, indikator keberhasilan kegiatan dan hal penting lainnya yang diperlukan selama kegiatan ini berlangsung.

c) Penyusunan Proposal dan Undangan Kegiatan

Penyusunan proposal bertujuan untuk mempermudah dalam proses izin pelaksanaan program dari berbagai pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program kegiatan. Untuk mendukung keberhasilan program maka diperlukan penyebaran undangan kepada lembaga-lembaga ataupun orang yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam upaya mewujudkan keberhasilan berjalannya kegiatan.

d) Rapat Panitia

Untuk memastikan segala hal yang diperlukan sudah siap maka diperlukan pertemuan panitia sebagai media koordinasi terakhir sebelum program dilaksanakan. Dengan adanya pertemuan ini panitia dapat menyamakan persepsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan meminimalisir kesalahan ketika program sedang berlangsung.

2) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan program “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran)” terdapat kegiatan pembentukan

Badan Kordinasi Penerima Manfaat pada pertemuan pertama yang bertujuan agar terbentuknya wadah kordinasi dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat dan musyawarah penentuan indikator prioritas penerima manfaat pada pertemuan kedua di Kelurahan Kebon Kangkung.

Untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan maka dalam kegiatan ini melibatkan Dinas Sosial Kota Bandung sebagai penyedia narasumber dalam kegiatan sosialisasi.

Adapun susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pembentukan Badan Kordinasi Penerima Manfaat

Tabel 2.9 Tabel Jadwal Kegiatan Program “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran)” Pertemuan Pertama

Pertemuan Pertama				
No	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Panitia	07.00 – 07.30	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.00 – 08.15	15 Menit	Master of Ceremony
4.	Sambutan	08.15 – 08.35	20 Menit	Dinas Sosial Kota Bandung, Lurah Kebon Kangkung
5.	Pembacaan Doa	08.35 – 08.40	5 Menit	Panitia
6.	Pembentukan Pengurus Badan Kordinasi Penerima Manfaat beserta peraturan dasarnya	08.40 – 10.10	90 Menit	Dinas Sosia Kota Bandung
7.	Dokumentasi	10.10 – 10.15	5 Menit	Panitia
8.	Penutupan	10.15 – 10.20	5 Menit	Master of Ceremony

b) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Kordinasi Penerima Manfaat

Tabel 2.10 Tabel Jadwal Kegiatan “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran) Pertemuan Kedua

Pertemuan Kedua				
No	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Panitia	07.00 – 07.30	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.00 – 08.15	15 Menit	Master of Ceremony
4.	Peningkatan kapasitas pengurus Badan Kordinasi Penerima Manfaat	08.40 – 10.10	90 Menit	Dinas Sosia Kota Bandung
5.	Dokumentasi	10.10 – 10.15	5 Menit	Panitia
6.	Penutupan	10.15 – 10.20	5 Menit	Master of Ceremony

c) Kegiatan Penyusunan Indikator Kemiskinan dan Prioritas Penerima Manfaat

Tabel 2.11 Tabel Jadwal Kegiatan Program “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran)” Pertemuan Ketiga

Pertemuan Ketiga				
No	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Panitia	07.00 – 07.30	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.00 – 08.15	15 Menit	Master of Ceremony
4.	Musyawarah penentuan indikator kemiskinan dan penentuan skala prioritas penerima manfaat bantuan sosial	08.40 – 10.10	90 Menit	Dinas Sosia Kota Bandung
5.	Dokumentasi	10.10 – 10.15	5 Menit	Panitia

6.	Penutupan	10.15 – 10.20	5 Menit	Master of Ceremony
----	-----------	---------------	---------	--------------------

3) Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran merupakan tahapan terakhir dalam rangkaian kegiatan dalam sebuah program. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi evaluasi kegiatan dan pelaporan kegiatan.

a) Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan refleksi atau peninjauan antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan berlangsung. Tujuan dilakukannya evaluasi proses ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses berlangsungnya kegiatan dan proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi hasil merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan atau program. Tujuan dilakukannya evaluasi hasil adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan terhadap indikator keberhasilan setelah pelaksanaan program.

b) Pelaporan Program

Pelaporan Program Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran) merupakan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dari pelaksanaan program kepada pihak yang memiliki otoritas dan yang sudah terlibat dalam pelaksanaan program, yaitu Pemerintahan Kelurahan Kebon Kangkung dan Dinas Sosial Kota Bandung. Pelaporan pertanggungjawaban kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk menyusun program-program yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.

C. Profil Analis Pemberdayaan Sosial

Pada profil Analis Pemberdayaan Sosial, praktikan menemukan isu yang ada di wilayah Kelurahan Kebon Kangkung mengenai terdapatnya salah satu titik program pemberdayaan Buruan SAE yang belum optimal secara hasil panennya. Dalam prosesnya praktikan menggunakan metode pengumpulan analisis data sekunder, baik berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, data statistik, dan studi literatur dalam penyusunan laporan praktikum pada profil Analis Pemberdayaan Sosial.

1. Gambaran Umum Masalah

Kota Bandung yang semakin padat dengan jumlah penduduk sebanyak 2.510.103 jiwa pada akhir tahun 2020 membuat warga kesulitan dalam membuka lahan pertanian (BPS, 2020). Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam. Wali kota Bandung saat itu, Bapak Oded M Danial, membuat program Buruan SAE (Pekarangan Sehat, Alami, dan Ekonomis) melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung. Selain sektor pertanian, Buruan SAE memiliki fokus pemberdayaan lain yaitu pada sektor peternakan. Tujuan dari program tersebut adalah untuk membangun ketahanan pangan berbasis keluarga, terutama selama pandemi Covid-19. Buruan SAE juga diperkuat dengan beberapa kelompok tani yang memiliki andil dalam membantu masyarakat dalam bercocok tanam dan mengelola peternakan serta mendapatkan manfaat dari hasil tanam maupun ternaknya. Manfaat tersebut bisa dinikmati oleh warga sekitar sebagai bahan pangan atau apabila hasilnya melimpah bisa juga dijadikan sebagai produk untuk dijual kepada konsumen sehingga akan memberikan keuntungan secara materiil yang bisa digunakan untuk keperluan pengelolaan Buruan SAE.

Saat ini terdapat 190 Kelompok tani di Kota Bandung yang tersebar di 151 kelurahan (Lantu, 2021). Kelompok tani ini didirikan pada tahun 2019 dan *screen house* yang dimiliki mitra bermula dari pengajuan anggaran untuk kegiatan aktivasi PKK yang menjadi program kerja Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bandung. Selanjutnya atas arahan ketua TP PKK saat itu yakni Ibu Siti Muntamah mitra menjalankan program Buruan SAE. Akhirnya beberapa halaman PKK Kota Bandung ditunjuk menjadi salah satu titik Buruan SAE. Pada Kelurahan Kebon Kangkung sendiri saat ini telah ada dua titik Buruan SAE yaitu yang berkedudukan di RW 08 dan RW 06 Kelurahan Kebon Kangkung Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung.

Kelompok pengurus Buruan SAE RW 08 memiliki potensi untuk bisa memberdayakan warga sekitar kebun dan peternakan agar bisa membangun ketahanan pangan dan sekaligus dapat membantu aktivitas perekonomian warga sekitar dari hasil panen kebun dan panen peternakannya. Sejak didirikan hingga saat ini, kelompok pengurus Buruan SAE berupaya menciptakan ketahanan pangan mandiri di wilayah RW 08, namun terdapat beberapa kendala yang menyebabkan produktivitas dari program Buruan SAE mengalami hambatan. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari observasi lapangan melalui teknik wawancara dan studi literatur, hambatan tersebut berasal dari internal pengurus Buruan SAE dan kondisi kewilayahan Kelurahan Kebon Kangkung.

2. Tinjauan konsep

a) Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Edi Suharto, 2010)

Jim Ife (1997) dalam Edi Suharto (2010) menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah upaya dalam memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep daya (*power*) dan konsep ketimpangan (*disadvantaged*). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan empat perspektif: pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.

Menurut Zubaedi (2013) dalam Edi Suharto (2010), penjelasan dari empat perspektif itu masing-masing adalah sebagai berikut:

1) Perspektif Pluralis

Perspektif Pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses dalam menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah.

2) Perspektif Elitis

Perspektif Elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elit. Upaya ini dilakukan mengingat

masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya *power* dan kontrol yang kuat dari para elit.

3) Perspektif Strukturalis

Perspektif Strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural.

4) Perspektif Post-Strukturalis

Perspektif Post-Strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat.

Sedangkan Edi Suharto (2010) dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* menyimpulkan bahwa pemberdayaan dapat dipandang sebagai sebuah proses dan tujuan sebagai berikut:

“Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses”

b) Prinsip Pemberdayaan

Dalam menjalankan proses pemberdayaan terdapat prinsip-prinsip yang terkandung menurut perspektif pekerjaan sosial (Suharto:1997) dalam buku Edi Suharto (2010) antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Pemberdayaan disebut sebagai proses kolaboratif dikarenakan pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.

- 2) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- 3) Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- 4) Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
- 5) Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- 6) Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- 7) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- 8) Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- 9) Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- 10) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- 11) Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

c) Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi SP, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 1997) dalam buku Edi Suharto (2010):

1) Pemungkinan

Pemungkinan yang dimaksud adalah upaya dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

2) Penguatan

Penguatan ditujukan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

3) Perlindungan

Perlindungan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan tidak sehat antara kelompok yang kuat dan kelompok lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4) Penyokongan

Penyokongan dilakukan dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5) Pemeliharaan

Pemeliharaan dilakukan dengan cara memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

d) Teknik Pemberdayaan

Dubois dan Miley (1992) dalam buku Edi Suharto (2010) memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat di lakukan dalam pemberdayaan masyarakat:

- 1) Membangun relasi pertolongan dengan cara berikut:
 - a) merefleksikan respon empati;
 - b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*);
 - c) menghargai perbedaan dan keunikan individu;
 - d) menekankan kerjasama klien (*client partnerships*).
- 2) Membangun komunikasi dengan cara berikut:
 - a) menghormati martabat dan harga diri klien;
 - b) mempertimbangkan keragaman individu;
 - c) berfokus pada klien;
 - d) menjaga kerahasiaan klien.
- 3) Terlibat dalam pemecahan masalah dengan cara berikut:
 - a) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah;
 - b) menghargai hak-hak klien;
 - c) merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar;
 - d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.

- 4) Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui:
 - a) ketaatan terhadap kode etik profesi;
 - b) keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan;
 - c) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik;
 - d) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

e) Tugas Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan

Schwartz (1961) mengemukakan 5 (lima) dalam buku Edi Suharto (2010) tugas yang dapat dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam melaksanakan program pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka.
- 2) Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustrasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh (*significant others*) terhadap mereka.
- 3) Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak dimiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka.
- 4) Membagi visi kepada masyarakat; harapan dan aspirasi pekerja sosial merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan bagi kesejahteraan individu dan sosial.
- 5) Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk. Aturan-aturan tersebut membentuk konteks bagi 'kontrak kerja' yang mengikat masyarakat dan lembaga. Batasan-batasan tersebut juga mampu menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakat dan pekerja sosial menjalankan fungsinya masing-masing.

f) Buruan SAE

Buruan SAE (Sehat, Alami, dan Ekonomis) adalah suatu program pemberdayaan pertanian perkotaan atau *urban farming* terintegrasi yang memadukan komponen pertanian, seperti pembibitan, tanaman sayuran, buah, toga, perikanan, peternakan, pengolahan sampah organik, dan pengolahan produk hasil Buruan SAE dalam kesatuan yang utuh. Program ini digagas oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

- 1) Kriteria Kelompok Buruan SAE
 - a) Kelompok tani sudah berjalan dan aktif minimal selama 2 bulan,
 - b) Lahan bukan milik pribadi,

- c) Lahan memungkinkan untuk Buruan SAE,
 - d) Adanya dukungan dan rekomendasi dari aparat kewilayahan (Kelurahan/Kecamatan).
- 2) Tahapan Pelaksanaan Program Buruan SAE
- a) Adanya surat Permohonan Bantuan Program Urban Farming Terintegrasi Buruan SAE atau adanya rekomendasi dari Petugas Penyuluh Lapangan;
 - b) Adanya intruksi pimpinan untuk menindaklanjuti permohonan dan rekomendasi Buruan SAE tersebut.
 - c) Tim Teknis Buruan SAE melaksanakan :
 - (1) Mempelajari dan menelaah permohonan tersebut;
 - (2) Melakukan koordinasi dengan kelurahan setempat, dilanjutkan survey ke lokasi yang diusulkan bersama dengan pihak Kelurahan/Kecamatan dan warga masyarakat pemohon.
 - (3) Mengevaluasi potensi calon lokasi dan kelompok pengelolanya berdasarkan kriteri kelompok Buruan SAE;
 - (4) Menyusun administrasi kelompok Buruan SAE (Berita Acara Pembentukan Kelompok, Surat Domisili Kelompok, Surat Keputusan Kelompok dari Kelurahan, Surat Pengukuhan dari Dinas dll);
 - (5) Melakukan Pendampingan Kelompok;
 - (6) Rapat Koordinasi dengan kelompok Buruan SAE;
 - (7) Penyerahan bantuan sarana prasarana Buruan SAE;
 - (8) Melakukan pelatihan *Urban Farming* terintegrasi Buruan SAE;
 - (9) Melakukan monitoring kegiatan kelompok Buruan SAE
 - (10) Menganalisa dan mengevaluasi hasil kegiatan Buruan SAE;
 - d) Dinas menyerahkan sepenuhnya aktivitas kegiatan Buruan SAE kepada kelompok pemohon.
- 3) Penyerahan Bantuan Sarana Prasaran Buruan SAE
- Penyerahan bantuan sarana prasarana Buruan SAE terbagi dalam 3 tahap, yaitu :
- a) Penyerahan tahap pertama berupa media tanam (tanah lembang, sekam bakar, pupuk kandang, NPK dan polibag), Benih Sayuran, OTEGE, Budikdamber (ember plastik 80 liter, kran dan pot plastik), Kandang ayam dan tanaman produktif (jeruk nipis, jeruk purut dan jambu kristal);
 - b) Penyerahan tahap kedua bibit sayuran buah;
 - c) Penyerahan tahap ketiga berupa benih lele, pakan lele, benih kangkung, ayam, pakan ayam dan bibit sayuran daun;

- 4) Monitoring Kegiatan Kelompok Buruan SAE
 - a) Monitoring kegiatan Buruan SAE akan dilakukan oleh Tim Teknis dan aparat kewilayahan;
 - b) Monitoring dilakukan setiap bulan selama minimal 6 bulan ke depan;
 - c) Hasil monitoring berupa laporan bulanan dari kelompok dengan mengisi format laporan yang sudah ditentukan;
 - d) Hasil monitoring harus dilengkapi dengan dokumentasi/foto kegiatan;
 - e) Setiap 3 bulan akan dilakukan evaluasi kegiatan Buruan SAE;
 - f) Evaluasi dilakukan oleh Dinas;
- 5) Analisis dan Evaluasi Hasil Kegiatan Buruan SAE
 - a) Evaluasi hasil monitoring akan dilakukan oleh Dinas;
 - b) Evaluasi dilakukan minimal selama 3 bulan ke depan;
 - c) Setelah dievaluasi kemudian Dinas akan menyerahkan sepenuhnya aktivitas kegiatan Buruan SAE kepada kelompok pemohon dan selanjutnya dilakukan pendampingan oleh Penyuluh dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas kelompok dan produktivitas hasil kegiatan Buruan SAE dengan melakukan kelas belajar, kelas unit kerjasama dan kelas usaha.

3. Asesmen

Praktikum laboratorium pada profil Analis Jaminan Sosial dilakukan pada tanggal 8 hingga 18 Maret 2023. Praktikan melakukan asesmen dengan pendalaman data primer melalui metode wawancara dengan pengurus Buruan SAE RW 06 dan RW 08. Selain itu praktikan melakukan pendalaman data sekunder melalui laman Buruan SAE dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Teknik yang digunakan dalam proses asesmen antara lain teknik analisis pohon masalah, dan penelitian kepustakaan.

a. Identifikasi Masalah

Program Buruan SAE (Sehat, Alami, dan Ekonomis) merupakan program pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dalam rangka swasembada pangan. Buruan SAE Kota Bandung adalah program dari Pemerintah Kota Bandung yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan peternakan di wilayah kota Bandung. Program Buruan SAE memberikan bantuan berupa bibit, pakan, obat-obatan, dan pelatihan teknis kepada petani dan peternak di Kota Bandung untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen untuk menciptakan ketahanan pangan secara mandiri ke lingkup wilayah RT, RW, dan Kelurahan.

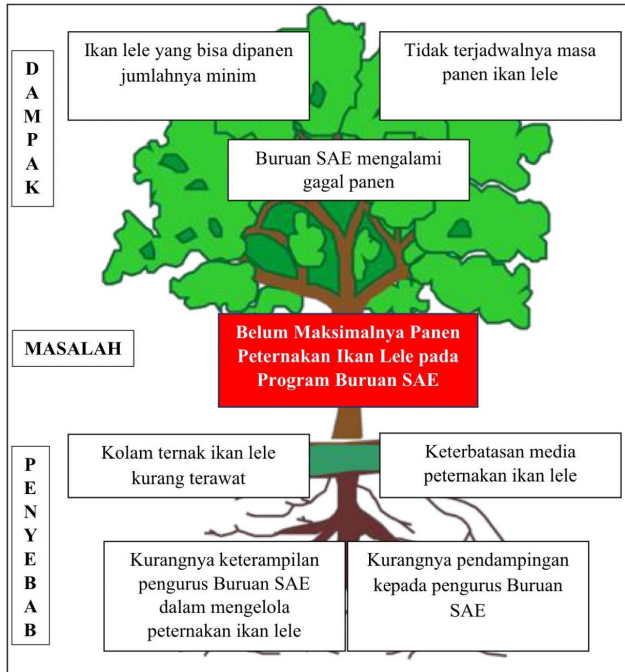
Setelah praktikan melakukan observasi ke titik lokasi Buruan SAE yang berada di RW 06 dan RW 08 Kelurahan Kebon Kangkung dengan didampingi oleh dua orang pengurusnya, didapatkan beberapa informasi yaitu terdapat masalah sering dihadapi oleh pengurus Buruan SAE

peternakan lele adalah kematian ikan lele yang tinggi selama masa pembesaran, sehingga mengakibatkan hasil panen yang tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemeliharaan kualitas air, pemberian pakan yang tidak sesuai, serta penggunaan bibit yang kurang berkualitas.

Selain itu, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi produktivitas peternakan lele. Kondisi lingkungan yang tidak bersih atau tercemar dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan menurunkan kualitas air, sehingga menghambat pertumbuhan ikan lele. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam melakukan manajemen peternakan juga menjadi kendala dalam program ini. Peternak yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola peternakan lele tidak mampu mengoptimalkan produksi dan merawat ikan dengan baik.

Akibat dari masalah-masalah tersebut, produksi lele dalam program Buruan SAE cenderung tidak maksimal. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintah dan pihak terkait untuk memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada peternak agar program ini dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat maksimal.

Berdasarkan deskripsi latar masalah yang terjadi, praktikan menggunakan metode analisis pohon masalah dalam menentukan fokus masalah yang terjadi pada Pemberdayaan Sosial sebagai berikut:



Gambar 2.3 Gambar Analisis Pohon Masalah Pemberdayaan Buruan SAE

1) Penyebab Masalah

- a) Kurangnya Pendampingan Kepada Pengurus Buruan SAE
Pendampingan yang dilaksanakan oleh dinas hanya diberikan kepada beberapa pengurus saja karena terbatas kuota pendampingan. Sedangkan seluruh pengurus Buruan SAE sangat memerlukan pendampingan tersebut untuk peningkatan keterampilan dan produktivitas dari program Buruan SAE.
- b) Keterbatasan Media Peternakan Ikan Lele
Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh RW 08 maka pengurus memilih media terpal dan ember dalam mengelola ikan lele. Tetapi disisi lain media tersebut masih minim jumlahnya sehingga pengurus hanya bisa memanfaatkan media terpal dan ember yang jumlahnya terbatas.

- c) Kurangnya Keterampilan Pengurus Buruan SAE dalam Mengelola Buruan SAE

Beberapa pengurus Buruan SAE kurang maksimal dalam mengelola peternakan ikan lele dikarenakan keterampilan yang dimiliki oleh pengurus tentang pengelolaan ikan lele masih minim. Sehingga produktivitas dari program masih rendah.

- d) Kolam Ternak Ikan Lele Kurang Terawat

Kondisi terpal untuk kolam lele yang dimiliki oleh pengurus Buruan SAE sangat memprihatinkan. Terdapat beberapa bagian dari terpal yang digunakan sebagai kolam tersebut mengalami kebocoran karena tidak dilakukannya perawatan yang optimal untuk media kolam ikan lele.

2) Dampak Masalah

- a) Ikan Lele Yang Bisa Dipanen Jumlahnya Minim

Pada saat memasuki masa panen jumlah lele yang bisa dipanen jumlahnya masih sedikit dan jauh dari jumlah benih yang dilepas pada tahap awal. Beberapa ikan mengalami mati di kolam sebelum memasuki masa panen, ikan tidak bisa bertumbuh dengan maksimal dan ada beberapa ikan yang dicuri oleh oknum warga.

- b) Tidak Terjadwalnya Masa Panen Ikan Lele

Peternakan lele pada Buruan SAE RW 08 belum memiliki jadwal panen yang teratur. Kondisi tersebut disebabkan oleh tidak meratanya pertumbuhan dari ikan lele. Pemilihan pakan dan perawatan pun bisa menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi pemerataan pertumbuhan ikan lele dan jadwal panen dari ikan lele tersebut.

- c) Buruan SAE Mengalami Gagal Panen

Kondisi paling parah yang dialami oleh Buruan SAE RW 08 adalah mengalami gagal panen pada peternakan ikan lele. Peristiwa ini terjadi pada bulan Februari karena kondisi kesehatan, jumlah dan ukuran lele yang tidak memungkinkan untuk dilakukan panen.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan analisis masalah diatas, praktikan mengambil fokus masalah pada Profil Analisis Pembedayaan Sosial ini adalah "Belum Maksimalnya Panen Peternakan Ikan Lele pada Program Buruan SAE".

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan fokus masalah diatas terdapat beberapa kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas keterampilan pengurus Buruan SAE

- 2) Penyediaan kemudahan pengurus dalam mengakses bibit unggul dan pakan terbaik
- 3) Penyediaan media ternak lele yang memadai

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam usaha kesejahteraan sosial atau praktik pekerjaan sosial, selain itu sistem sumber pekerjaan sosial merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan suatu masalah. Pincus dan Minahan (1973) dalam Yurika Maha (2016) mengklasifikasikan sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi tiga jenis yaitu sistem sumber informal atau alamiah, sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan. Sistem sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan adalah Kurang Maksimalnya Panen Peternakan Ikan Lele pada Program Buruan SAE adalah sebagai berikut:

1) Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini adalah sebagai berikut:

a) Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung

Melalui Seksi Ekonomi dan Pembangunan, pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung dapat memasukan Buruan SAE kedalam program unggulan dan prioritas. Sehingga program ini bisa lebih dikembangkan melalui dukungan berupa motivasi, dana, fasilitasi pengembangan program dan fasilitasi perluasan produk agar lebih dikenal masyarakat luas.

2) Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini adalah sebagai berikut:

a) Pekerja Sosial

Dalam permasalahan ini Pekerja Sosial memerankan tugas sebagai inisiator dari program alternatif penyelesaian masalah adalah Kurang Maksimalnya Panen Peternakan Ikan Lele pada Program Buruan SAE. Pekerja sosial bertugas merencanakan program bersama stakeholder serta menjembatani antara sistem sasaran dengan sistem sumber yang bisa dilibatkan dalam alternatif penyelesaian masalah.

b) Ketua RW 06

Dalam permasalahan ini ketua RW 06 memiliki kewenangan dalam memberikan perizinan kegiatan dan penyediaan tempat pelatihan karena titik peternakan lele Buruan SAE terletak di RW 06. Selain itu ketua RW juga dapat berperan sebagai sistem pengontrol dalam kegiatan.

3) Sistem Sumber Kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini adalah sebagai berikut:

a) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung

Sebagai pemberi bantuan program pemberdayaan dari pemerintah Kota Bandung dalam upaya peningkatan produktivitas Buruan SAE, DKPP dapat memberikan pendampingan dan pelatihan kepada seluruh pengurus Buruan SAE Kelurahan Kebon Kangkung. Selain itu DKPP dapat pula memberikan dukungan dengan penyediaan media peternakan lele yang lebih berkualitas.

b) Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)

Kelurahan Kebon Kangkung

Dengan penggeran awal dari program Buruan SAE ini adalah TP PKK Kelurahan, maka dalam program peningkatan produktivitas pengurus TP PKK Kelurahan dapat memberikan dukungan secara moril dan materil dalam membantu proses berjalannya program pelatihan bagi pengurus Buruan SAE.

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Ternak lele merupakan salah satu jenis budidaya perikanan yang cukup populer di Indonesia karena memiliki potensi pasar yang besar dan permintaan yang tinggi. Dengan potensi tersebut program Buruan SAE memilih ikan lele sebagai komoditas peternakan untuk dikelola oleh pengurus Buruan SAE dalam rangka menciptakan ketahanan pangan mandiri.

Namun, dalam mengelola ternak lele, banyak peternak yang masih mengalami kendala, seperti kurangnya pengetahuan tentang teknik budidaya yang baik, kurangnya pemahaman tentang manajemen usaha, dan masalah-masalah lainnya seperti kualitas air dan pakan yang kurang baik. hal tersebut dialami oleh pengurus Buruan SAE RW 08. Pengurus Buruan SAE mengeluhkan tentang kesulitannya dalam menyesuaikan media ternak lele dengan kondisi kewilayahan Kelurahan Kebon Kangkung yang tidak memiliki lahan kosong untuk dijadikan kolam ikan. Selain itu pengurus merasa butuh pelatihan dalam mengelola peternakan ikan lele dengan metode yang modern agar hasil panen dari ikan lele bisa memuaskan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pihak pengelola program, peternak, dan ahli peternakan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan hasil panen lele pada program pemberdayaan peternakan.

Oleh karena itu, diperlukan program peningkatan kapasitas pengelolaan ternak lele agar para pengurus Buruan SAE dapat

memaksimalkan potensi usaha mereka. Program peningkatan kapasitas pengelolaan ternak lele dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan dan pendidikan, penyediaan informasi dan teknologi yang tepat, serta dukungan keuangan dan akses pasar. Dengan program yang tepat, pengurus Buruan SAE akan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi mereka, serta mengembangkan usaha ternak lele mereka dengan lebih baik dan berkelanjutan.

b. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum

Tujuan umum dari Program Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE adalah untuk meningkatkan produktivitas pada program Buruan SAE

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Program Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus Buruan SAE dalam mengelola peternakan lele
- b) Meningkatkan hasil panen lele
- c) Terciptanya panen ikan lele yang terjadwal
- d) Meningkatkan keuntungan materil dari hasil panen ikan lele

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Dalam menangani permasalahan tentang Pemberdayaan Sosial yang terjadi di Kelurahan Kebon Kangkung, maka program yang akan dilaksanakan sebagai upaya pemecahan masalahnya adalah program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE”. Dalam program ini akan dilaksanakan kegiatan pelatihan selama empat bulan bagi pengurus Buruan SAE agar memiliki keterampilan yang mumpuni dalam mengelola peternakan lele. Jenis-jenis kegiatan yang ada pada program ini antara lain:

1) Materi dan Praktik Tentang Pemilihan Bibit Ikan Lele Yang Berkualitas

Pelaksanaan kegiatan pemberian materi dan praktik tentang pemilihan bibit ikan lele bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepada pengurus Buruan SAE tentang jenis-jenis bibit ikan lele beserta cara pemeliharaannya. Pemilihan bibit ikan lele yang berkualitas merupakan langkah awal yang sangat penting dalam budidaya ikan lele. Hal ini dikarenakan kualitas bibit ikan lele yang dipilih akan mempengaruhi kualitas dan produktivitas ikan lele yang dihasilkan nantinya. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan juga Buruan SAE dapat melakukan pemeliharaan ikan lele dengan bibit unggul agar hasilnya lebih banyak dan menguntungkan.

2) Materi dan Praktik Tentang Media Peternakan Lele dan Perawatannya

Pelaksanaan kegiatan pemberian materi dan praktik tentang media peternakan lele dan perawatannya bertujuan agar pengurus Buruan SAE tidak lagi menggunakan media ternak yang kurang mendukung pertumbuhan dari ikan lele yang dipelihara. Media peternakan lele merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya ikan lele. Media peternakan lele yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas ikan lele yang dihasilkan. Dalam praktik tentang media peternakan lele dan perawatannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti tempat penyimpanan dan kondisi sekitar penyimpanan media ternak.

3) Materi dan Praktik Tentang Pengaturan Pengairan Kolam Lele

Pemberian materi dan praktik tentang pengaturan pengairan kolam lele diharapkan para pengurus mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan sistem pengairan yang sesuai dengan karakteristik habitat ikan lele seperti pengaturan pH air, dan suhu air.

4) Materi dan Praktik Tentang Pemilihan dan Pemberian Pakan Lele Yang Berkualitas

Pemberian materi dan praktik tentang pemilihan dan pemberian pakan lele yang berkualitas diharapkan pengurus dapat memberikan pakan yang sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan lele agar pertumbuhannya berjalan dengan maksimal. Pemilihan dan pemberian pakan yang tepat adalah faktor penting dalam budidaya ikan lele. Pemberian pakan yang tepat dapat mempengaruhi pertumbuhan, kesehatan, dan produktivitas ikan lele yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam materi dan praktik tentang pemilihan dan pemberian pakan lele yang berkualitas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain seperti pemilihan pakan, metode pemberian pakan, penggunaan suplemen pakan, dan pengendalian kualitas pakan

5) Materi dan Praktik Tentang Pencegahan dan Penanganan Hama Penyakit Ikan Lele

Pemberian materi dan praktik tentang pencegahan dan penanganan hama penyakit lele dimaksudkan untuk memberikan ilmu kepada pengurus Buruan SAE agar mengetahui hama dan penyakit apa saja yang memungkinkan menyerang ikan lele. Selain itu pengurus pun diberikan keterampilan untuk menangani ikan lele yang mengalami hama atau terkena penyakit. Dalam materi dan praktik tentang pencegahan dan penanganan hama penyakit pada ikan lele, perlu diperhatikan hal-hal memastikan kesehatan dan produktivitas ikan lele yang baik. Pencegahan yang tepat dapat mencegah terjadinya hama dan penyakit pada ikan lele, sedangkan penanganan yang efektif dapat meminimalkan kerugian yang ditimbulkan.

- 6) Materi dan Praktik Tentang Pengembangbiakan Ikan Lele
Pemberian materi dan praktik tentang pengembangbiakan ikan lele diharapkan pengurus Buruan SAE memiliki keterampilan untuk memproduksi bibit ikan lele yang berkualitas secara mandiri. Sehingga tidak bergantung pada pemasok bibit. Pengembangbiakan ikan lele dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui pemijahan, pembuahan buatan, dan metode induksi hormon.
- 7) Materi dan Praktik Tentang Sistem Dan Mekanisme Panen Ikan Lele
Pemberian materi dan praktik tentang sistem serta mekanisme panen ikan lele dimaksudkan agar pengurus Buruan SAE memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan prosedur panen ikan yang dapat memberikan keuntungan seperti dari mulai persiapan alat dan bahan, penggunaan alat, penanganan lele siap panen dan memilih ukuran ikan lele yang siap panen sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam materi dan praktik tentang sistem dan mekanisme panen ikan lele, perlu diperhatikan berbagai hal penting agar panen ikan lele dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan ikan lele yang berkualitas. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan mekanisme panen ikan lele
- 8) Materi dan Praktik Tentang Pengolahan Hasil Panen Ikan Lele
Pemberian materi dan praktik tentang pengolahan hasil panen ikan lele diharapkan para pengurus Buruan SAE memiliki keterampilan untuk menciptakan produk yang memiliki nilai ekonomis seperti berbagai olahan makanan yang bisa dihasilkan dari ikan lele. Setelah melakukan panen, ikan lele akan diproses menjadi berbagai jenis produk olahan. Pengolahan hasil panen ikan lele ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual ikan lele dan memperpanjang masa simpannya. Dalam materi dan praktik tentang pengolahan hasil panen ikan lele, perlu diperhatikan hal yang dapat berpengaruh pada produk olahan ikan lele yang dihasilkan agar berkualitas dan aman untuk dikonsumsi.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Inisiator
Sistem inisiator merupakan individu-individu yang pertama kali melihat adanya masalah. Sistem inisiator dalam program ini adalah pekerja sosial.
- 2) Sistem Agen Perubahan
Sistem agen perubahan merupakan individu-individu yang akan memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinir perubahan. Sistem

agen perubahan dalam program ini adalah pekerja sosial dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

3) Sistem Klien

Sistem klien merupakan sekelompok orang yang akan menerima pelayanan atau sasaran perubahan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sistem klien dalam program ini adalah pengurus Buruan SAE Kelurahan Kebon Kangkung.

4) Sistem Pendukung

Sistem pendukung merupakan orang-orang yang memberikan dukungan atau masyarakat yang memiliki perhatian akan keberhasilan perubahan. Sistem pendukung dari program ini adalah Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kebon Kangkung.

5) Sistem Pengontrol

Sistem pengontrol merupakan orang-orang yang memiliki otoritas formal atau kekuasaan untuk menerima atau menolak serta mengarahkan implementasi perubahan. Sistem pengontrol dalam program ini adalah Ketua RW, Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan dan TP-PKK Kelurahan Kebon Kangkung.

6) Sistem Pelaksana

Sistem pelaksana merupakan orang-orang yang memiliki tugas rutin melaksanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan. Sistem pelaksana dalam program ini adalah pekerja pengurus Buruan SAE, pekerja sosial masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

7) Sistem Sasaran

Sistem sasaran merupakan orang, struktur, atau kebijakan yang perlu dirubah agar menerima manfaat perubahan seperti yang diharapkan. Sistem sasaran terdiri dari pengurus Buruan SAE Kelurahan Kebon Kangkung.

8) Sistem Aksi

Sistem aksi merupakan orang-orang dari berbagai sistem yang memiliki peran aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana perubahan. Sistem aksi dalam program ini terdiri dari pekerja sosial, Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kebon Kangkung, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

e. Metode dan Teknik

Metode yang akan digunakan praktikan dalam melaksanakan program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” adalah dengan metode *Community Organization and Community Development* (COCD) atau pengorganisasian dan pengembangan komunitas. Sedangkan teknik yang akan digunakan adalah *Capacity Building* atau pengembangan kapasitas yang dapat dilakukan dengan teknik perluasan partisipasi atau

pemberdayaan kelompok-kelompok yang memerlukan peningkatan keterampilan.

Strategi-strategi yang akan dijalankan dalam pelaksanaan program ini adalah strategi kolaborasi dan pelatihan. Strategi kolaborasi dimaksudkan untuk menciptakan penggunaan sumber-sumber secara bersama dan berfokus pada *win-win solution*. Strategi pelatihan dimaksudkan untuk memberikan kegiatan yang mendukung peningkatan keterampilan dari sasaran program.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

Untuk melaksanakan program “Program Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” diperlukan biaya sebagai berikut:

Tabel 2.12 Tabel Rencana Anggaran Biaya Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE”

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (RP)	Jumlah (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Logistik				
	Alat peternakan lele	2	Paket	300.000	600.000
	Bibit lele	3	Kilogram	50.000	150.000
	Banner Kegiatan	1	Lembar	75.000	75.000
	Buku Modul	5	Unit	35.000	175.000
	Jumlah I				1.000.000
2.	Honorarium				
	Pelatih program	2	Orang/Kegiatan	1.000.000	2.000.000
	Jumlah II				2.000.000
3.	Konsumsi				
	Snack Peserta	15	Box	10.000	150.000
	Snack Panitia	5	Box	10.000	50.000
	Snack Narasumber	2	Box	10.000	20.000
	Jumlah III				220.000
	Jumlah Keseluruhan				3.220.000

Rincian peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Rincian Peralatan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE”

No	Nama Alat	Jumlah
1.	Sound system	3
2.	Microfon	5
3.	Laptop	2
4.	Proyektor	1
5.	Layar proyektor	1
6.	Kursi	30
7.	Meja	5

g. Analisis Kelayakan Program

Analisis kelayakan dari program “Program Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Tabel Analisis Kelayakan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE”

Faktor Internal	<p>Strength:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapatnya pemberi pelatihan yang ahli dibidangnya 2. Terdapat stakeholder yang mendukung program 3. Sasaran sangat membutuhkan program 	<p>Weakness:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kemungkinan sasaran tidak memahami pelatihan dengan maksimal
Faktor Eksternal	<p>Opportunities:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keterampilan pengurus Buruan SAE 2. Meningkatnya produktivitas program Buruan SAE 	<p>Strategi WO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kegiatan pelatihan yang menarik dengan pelibatan peserta dalam sesi diskusi dan tugas-tugas 2. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami

<p>Treats:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seruluh sasaran tidak bisa mengikuti sosialisasi dengan khidmat 	<p>Strategi ST:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan hadiah bagi peserta terbaik 2. Menyediakan tempat yang nyaman dan strategis 3. Menyediakan fasilitas pelatihan yang berkualitas 	<p>Strategi WT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelatihan di hari libur agar semua pengurus dapat hadir 2. Meningkatkan intensitas pembinaan kepada yayasan terkait 3. Melakukan penilaian monitoring dan evaluasi kegiatan
--	---	--

h. Jadwal dan Langkah-langkah

Langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan program yang memiliki tujuan mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan program. Tahap persiapan dalam program ini terdiri dari:

a) Penyusunan Kepanitiaan

Penyusunan kepanitiaan dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam penyusunan panitia seluruh sumber daya manusia diberikan tugas dan fungsi sesuai bidangnya masing-masing agar memudahkan keberlangsungan pelaksanaan program.

b) Penyusunan Rencana Kegiatan

Setelah didapatkannya susunan panitia maka seluruh unsur kepanitiaan mengadakan pertemuan untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal-hal yang akan dibahas pada tahap ini mencakup diskusi terkait dengan bentuk kegiatan, penyusunan jadwal kegiatan, tempat kegiatan, indikator keberhasilan kegiatan dan hal penting lainnya yang diperlukan selama kegiatan inti berlangsung.

c) Penyusunan Proposal dan Undangan Kegiatan

Penyusunan proposal bertujuan untuk mempermudah dalam proses izin pelaksanaan program dari berbagai pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program kegiatan. Untuk

mendukung keberhasilan program maka diperlukan penyebaran undangan kepada lembaga-lembaga ataupun orang yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam upaya mewujudkan keberhasilan berjalannya kegiatan.

d) Rapat Panitia

Untuk memastikan segala hal yang diperlukan sudah siap maka diperlukan pertemuan panitia sebagai media koordinasi terakhir sebelum program dilaksanakan. Dengan adanya pertemuan ini panitia dapat menyamakan persepsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan meminimalisir kesalahan ketika program sedang berlangsung.

2) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” terdapat kegiatan pelatihan kepada pengurus Buruan SAE dalam mengelola peternakan lele selama empat bulan dengan frekuensi pertemuan satu kali dalam dua minggu sehingga terdapat 8 pertemuan dalam program ini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus demi produktivitas program Buruan SAE sehingga peternakan lele Buruan SAE dapat memberikan berbagai keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat disekitar titik wilayah Buruan SAE.

Untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan maka dalam kegiatan ini melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung sebagai penyedia narasumber dalam kegiatan sosialisasi.

Adapun susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a) Materi dan Praktik Tentang Pemilihan Bibit Ikan Lele Yang Berkualitas

Tabel 2.15 Tabel Jadwal Kegiatan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” Pertemuan Pertama

Pertemuan Pertama				
No	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Panitia	07.00 – 07.30	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.00 – 08.15	15 Menit	Master of Ceremony
4.	Sambutan	08.15 – 08.35	20 Menit	Dinas Ketahanan Pangan dan

				Pertanian Kota Bandung, Lurah Kebon Kangkung
5.	Pembacaan Doa	08.35 – 08.40	5 Menit	Panitia
6.	Penyampaian Materi praktik tentang pemilihan bibit ikan lele yang berkualitas	08.40 – 10.10	90 Menit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7.	Sesi Tanya Jawab	10.10 – 10.30	20 Menit	Peserta dan Pemateri
8.	Kuis Berhadiah	10.30 – 10.45	15 Menit	Peserta dan Pemateri
9.	Dokumentasi	10.45 – 10.50	5 Menit	Panitia
10.	Penutupan	10.50 – 10.55	5 Menit	Master of Ceremony

b) Materi dan Praktik Tentang Media Peternakan Lele dan Perawatannya

Tabel 2.16 Tabel Jadwal Kegiatan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” Pertemuan Kedua

Pertemuan Kedua				
No	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Panitia	07.00 – 07.30	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.00 – 08.15	15 Menit	Master of Ceremony
4.	Penyampaian Materi dan praktik tentang media peternakan lele dan perawatannya	08.15 – 09.45	90 Menit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5.	Sesi Tanya Jawab	09.45 – 10.05	20 Menit	Peserta dan Pemateri
6.	Kuis Berhadiah	10.05 – 10.20	15 Menit	Peserta dan Pemateri
7.	Dokumentasi	10.20 – 10.25	5 Menit	Panitia
8.	Penutupan	10.25 – 10.30	5 Menit	Master of Ceremony

c) Materi dan Praktik Tentang Pengaturan Pengairan Kolam Lele

Tabel 2.17 Tabel Jadwal Kegiatan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” Pertemuan Ketiga

Pertemuan Ketiga				
No	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Panitia	07.00 – 07.30	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.00 – 08.15	15 Menit	Master of Ceremony
4.	Penyampaian Materi dan praktik tentang pengaturan pengairan kolam lele	08.15 – 09.45	90 Menit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5.	Sesi Tanya Jawab	09.45 – 10.05	20 Menit	Peserta dan Pemateri
6.	Kuis Berhadiah	10.05 – 10.20	15 Menit	Peserta dan Pemateri
7.	Dokumentasi	10.20 – 10.25	5 Menit	Panitia
8.	Penutupan	10.25 – 10.30	5 Menit	Master of Ceremony

d) Materi dan Praktik Tentang Pemilihan dan Pemberian Ikan Lele Yang Berkualitas

Tabel 2.18 Tabel Jadwal Kegiatan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” Pertemuan Keempat

Pertemuan Keempat				
No	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Panitia	07.00 – 07.30	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.00 – 08.15	15 Menit	Master of Ceremony
4.	Penyampaian Materi dan praktik tentang pemilihan dan pemberian	08.15 – 09.45	90 Menit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

	pakan lele yang berkualitas			
5.	Sesi Tanya Jawab	09.45 – 10.05	20 Menit	Peserta dan Pemateri
6.	Kuis Berhadiah	10.05 – 10.20	15 Menit	Peserta dan Pemateri
7.	Dokumentasi	10.20 – 10.25	5 Menit	Panitia
8.	Penutupan	10.25 – 10.30	5 Menit	Master of Ceremony

e) Materi dan Praktik Tentang Pencegahan dan Penanganan Hama Penyakit Ikan Lele

Tabel 2.19 Tabel Jadwal Kegiatan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” Pertemuan Kelima

Pertemuan Kelima				
No	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Panitia	07.00 – 07.30	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.00 – 08.15	15 Menit	Master of Ceremony
4.	Penyampaian Materi dan praktik tentang pencegahan dan penanganan hama penyakit ikan lele	08.15 – 09.45	90 Menit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5.	Sesi Tanya Jawab	09.45 – 10.05	20 Menit	Peserta dan Pemateri
6.	Kuis Berhadiah	10.05 – 10.20	15 Menit	Peserta dan Pemateri
7.	Dokumentasi	10.20 – 10.25	5 Menit	Panitia
8.	Penutupan	10.25 – 10.30	5 Menit	Master of Ceremony

f) Materi dan Praktik Tentang Pengembangbiakan Ikan Lele

Tabel 2.20 Tabel Jadwal Kegiatan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” Pertemuan Keenam

Pertemuan Keenam				
No	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Panitia	07.00 – 07.30	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.00 – 08.15	15 Menit	Master of Ceremony
4.	Penyampaian Materi dan praktik tentang pengembangbiakan ikan lele	08.15 – 09.45	90 Menit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5.	Sesi Tanya Jawab	09.45 – 10.05	20 Menit	Peserta dan Pemateri
6.	Kuis Berhadiah	10.05 – 10.20	15 Menit	Peserta dan Pemateri
7.	Dokumentasi	10.20 – 10.25	5 Menit	Panitia
8.	Penutupan	10.25 – 10.30	5 Menit	Master of Ceremony

g) Materi dan Praktik Tentang Sistem Dan Mekanisme Panen Ikan Lele

Tabel 2.21 Tabel Jadwal Kegiatan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” Pertemuan Ketujuh

Pertemuan Ketujuh				
No	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Panitia	07.00 – 07.30	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.00 – 08.15	15 Menit	Master of Ceremony
4.	Penyampaian Materi dan praktik tentang sistem dan mekanisme panen ikan lele	08.15 – 09.45	90 Menit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

5.	Sesi Tanya Jawab	09.45 – 10.05	20 Menit	Peserta dan Pemateri
6.	Kuis Berhadiah	10.05 – 10.20	15 Menit	Peserta dan Pemateri
7.	Dokumentasi	10.20 – 10.25	5 Menit	Panitia
8.	Penutupan	10.25 – 10.30	5 Menit	Master of Ceremony

h) Materi dan Praktik Tentang Pengolahan Hasil Panen Ikan Lele

Tabel 2.22 Tabel Jadwal Kegiatan Program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Bruan SAE” Pertemuan Kedelapan

Pertemuan Kedelapan				
No	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Panitia	07.00 – 07.30	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.00 – 08.15	15 Menit	Master of Ceremony
4.	Sambutan dan penutupan kegiatan secara resmi	08.15 – 08.35	20 Menit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Lurah Kebon Kangkung
6.	Penyampaian Materi dan praktik tentang pengolahan hasil panen ikan lele	08.40 – 10.10	90 Menit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8.	Pembacaan doa	10.30 – 10.35	5 Menit	Panitia
9.	Dokumentasi	10.35 – 10.40	5 Menit	Panitia
10.	Penutupan	10.40 – 10.45	5 Menit	Master of Ceremony

3) Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran merupakan tahapan terakhir dalam rangkaian kegiatan dalam sebuah program. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi evaluasi kegiatan dan pelaporan kegiatan.

a) Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan refleksi atau peninjauan antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang telah

dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan berlangsung. Tujuan dilakukannya evaluasi proses ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses berlangsungnya kegiatan dan proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi hasil merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan atau program. Tujuan dilakukannya evaluasi hasil adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan terhadap indikator keberhasilan setelah pelaksanaan program.

b) Pelaporan Program

Pelaporan Program Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE merupakan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dari pelaksanaan program kepada pihak yang memiliki otoritas dan yang sudah terlibat dalam pelaksanaan program, yaitu Pemerintahan Kelurahan Kebon Kangkung dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Pelaporan pertanggungjawaban kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk menyusun program-program yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.

D. Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

Pada profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, praktikan menemukan isu yang ada di wilayah Kelurahan Kebon Kangkung mengenai akses bagi pejalan kaki di Jalan Ibrahim Adjie yang terganggu oleh parkir liar dan pedagang kaki lima. Dalam prosesnya praktikan menggunakan metode pengumpulan analisis data sekunder, baik berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, data statistik, dan studi literatur dalam penyusunan laporan praktikum pada profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Penyediaan akses trotoar bagi pejalan kaki sangat penting untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki di jalan raya. Trotoar harus dirancang dan dibangun sedemikian rupa sehingga mudah diakses dan aman untuk digunakan oleh semua orang, termasuk orang dengan kebutuhan khusus. Di Indonesia, peraturan tentang pembangunan trotoar diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU ini menyatakan bahwa setiap pengguna jalan, termasuk pejalan kaki, berhak memperoleh akses jalan yang aman, nyaman, dan teratur. Pasal 54 ayat (1) juga menyebutkan bahwa setiap

pengguna jalan yang melintas di daerah permukiman, perkantoran, perdagangan, dan jasa wajib menggunakan trotoar atau jalan pejalan kaki.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Perencanaan dan Pembangunan Jalan di Daerah Permukiman. Peraturan ini mengatur tentang desain dan pengembangan trotoar yang harus memperhatikan aksesibilitas bagi pejalan kaki, termasuk orang dengan kebutuhan khusus. Selain itu, trotoar juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan meminimalisir dampak lingkungan yang merugikan.

Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia masih memiliki banyak tantangan dalam menciptakan kota yang ramah trotoar. Kondisi trotoar di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung masih belum optimal. Alih fungsi trotoar yang digunakan untuk keperluan parkir kendaraan dan berjualan bagi pedagang kaki lima masih sering terjadi di beberapa titik trotoar di wilayah tersebut. Selain itu, trotoar di Kelurahan Kebon Kangkung juga banyak yang rusak dan tidak terawat, sehingga membahayakan keselamatan pejalan kaki yang melintas di atasnya. Rintangan seperti tiang listrik, taman-taman kota, ataupun kendaraan yang parkir di atas trotoar juga menjadi kendala bagi pejalan kaki yang ingin melintasi trotoar dengan aman dan nyaman. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga trotoar agar tetap bersih dan berfungsi untuk kepentingan pejalan kaki, juga menjadi tantangan lain bagi Kota Bandung untuk menciptakan kota yang ramah trotoar.

Kondisi ini membuat pejalan kaki merasa tidak nyaman dan terancam keselamatannya ketika berjalan di atas trotoar Jalan Ibrahim Adjie. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan trotoar, penertiban parkir di atas trotoar, serta pengawasan ketat dari pihak berwenang agar trotoar dapat terjaga dan berfungsi dengan baik untuk kepentingan pejalan kaki. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan trotoar dan pengawasan ketat dari pihak berwenang, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga trotoar agar tetap bersih dan berfungsi untuk kepentingan pejalan kaki. Dengan begitu, diharapkan kondisi trotoar di Jalan Ibrahim Adjie Kelurahan Kebon Kangkung dapat membaik dan menciptakan kota yang lebih ramah bagi pejalan kaki.

2. Tinjauan Konsep

a. Penataan Lingkungan

Dalam buku "*Sustainable Urbanism: Urban Design with Nature*" oleh Douglas Farr (2007), penataan lingkungan didefinisikan sebagai "proses perancangan dan penataan ruang yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomi, serta memperbaiki kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan".

Dalam prosesnya, penataan lingkungan setidaknya memuat beberapa prinsip berikut:

- 1) Berkelanjutan: Penataan lingkungan harus didasarkan pada prinsip berkelanjutan, yaitu mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi dalam jangka panjang (Farr, D:2008).
- 2) Adaptif: Penataan lingkungan harus bersifat adaptif, artinya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang terjadi seiring waktu (Beatley, T. :2011).
- 3) Partisipatif: Penataan lingkungan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Healey, P:1997).
- 4) Multifungsional: Penataan lingkungan harus didesain untuk memiliki fungsi yang beragam, seperti untuk transportasi, rekreasi, dan pelestarian lingkungan (Calthorpe, P., & Fulton, W:2001).
- 5) Kontekstual: Penataan lingkungan harus disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan setempat (Ali, A:2011).
- 6) Berorientasi pada manusia: Penataan lingkungan harus mengutamakan kepentingan manusia, seperti kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan (Gehl, J:2010).
- 7) Kolaboratif: Penataan lingkungan harus melibatkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, seperti perencanaan wilayah, arsitektur, dan ilmu lingkungan (Hester, R. T:2012).
- 8) Responsif: Penataan lingkungan harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta perkembangan lingkungan dan teknologi yang terus berubah (Krieger, A:2013).

b. Trotoar

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, trotoar diartikan sebagai bagian pada jalan raya yang dikhususkan untuk pedestrian dan lebar jalan disesuaikan dengan kondisi dan disesuaikan dengan jumlah pedestrian yang memerlukan trotoar tersebut, di sekitar area lenggang ketinggian mencapai paling sedikit ialah 2,5 meter dalam bidang trotoar.

Menurut Mohamad Anas Aly (1995), yang dimaksud trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak pada Daerah Milik Jalan, diberi lapisan permukaan, diberi evelasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas. Trotoar memiliki fungsi utama sebagai layanan untuk pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, kemandirian dan kenyamanan pejalan kaki. Dengan adanya trotoar dapat memperlancar lalu lintas jalan utama karena tidak terganggu oleh pejalan kaki.

Trotoar dapat dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur lalu lintas. Trotoar hendaknya dibuat sejajar dengan jalan, akan tetapi trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan apabila keadaan topografi atau keadaan setempat tidak memungkinkan;
- 2) Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau diatas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat beton yang memenuhi syarat;
- 3) Trotoar pada pemberhentian bus harus ditempatkan berdampingan atau sejajar dengan jalur bus. Trotoar dapat ditempatkan di depan atau dibelakang halte bus.

c. Pedestrian

Menurut (Rubenstein, 1992) Pedestrian berasal dari bahasa Yunani pedos yang berarti kaki. Pedestrian juga berasal dari bahasa Latin pederpedestris yaitu orang yang berjalan kaki atau pejalan kaki, sehingga pedestrian dapat diartikan sebagai pejalan kaki atau orang yang berjalan kaki. Secara harafiah, pedestrian berarti "*person walking in the street*", yang berarti orang yang berjalan di jalan.

Fasilitas pejalan kaki harus direncanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pejalan kaki harus mencapai tujuan dengan jarak sedekat mungkin, aman dari lalu lintas yang lain dan lancar;
- 2) Terjadinya kontinuitas fasilitas pejalan kaki, yang menghubungkan daerah satu dengan yang lain;
- 3) Apabila jalur pejalan kaki memotong arus lalu lintas yang lain harus dilakukan pengaturan lalu lintas, baik dengan lampu pengatur ataupun dengan marka penyebrangan, atau tempat penyebrangan yang tidak sebidang. Jalur pejalan kaki yang memotong jalur lalu lintas berupa penyebrangan (*zebra cross*), marka jalan dengan lampu pengatur lalu lintas (*pelicia cross*), jembatan penyebrangan dan terowongan;
- 4) Fasilitas pejalan kaki harus dibuat pada ruas-ruas jalan di perkotaan atau pada tempat-tempat dimana volume pejalan kaki memenuhi syarat atau ketentuan-ketentuan untuk pembuatan fasilitas tersebut;
- 5) Jalur pejalan kaki sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa dari jalur yang lainnya, sehingga keamanan pejalan kaki lebih terjamin;
- 6) Dilengkapi dengan rambu atau pelengkap jalan lainnya, sehingga pejalan kaki leluasa untuk berjalan, terutama bagi pejalan kaki yang tuna daksa;
- 7) Perencanaan jalur pejalan kaki dapat sejajar, tidak sejajar atau memotong jalur lalu lintas yang ada;

- 8) Jalur pejalan kaki harus dibuat sedemikian rupa sehingga apabila hujan permukaannya tidak licin, tidak terjadi genangan air serta disarankan untuk dilengkapi dengan pohon-pohon peneduh;
- 9) Untuk menjaga keamanan dan keluasaan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan sehingga fasilitas pejalan kaki lebih tinggi dari permukaan jalan;

3. Asesmen

Praktikum laboratorium pada profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial dilakukan pada tanggal 22 Maret hingga 1 April 2023. Praktikan melakukan asesmen dengan pendalaman data primer melalui metode wawancara dengan Ketua RW yang wilayahnya dekat dengan trotoar Jalan Ibrahim Adjie. Teknik yang digunakan dalam proses asesmen antara lain teknik analisis pohon masalah, dan penelitian kepustakaan.

a. Identifikasi Masalah

Trotoar merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi pejalan kaki untuk berjalan dengan aman dan nyaman di sepanjang jalan. Trotoar juga merupakan hak pejalan kaki untuk dapat berjalan dengan aman dan nyaman di sepanjang jalan. Regulasi trotoar mengacu pada peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengatur penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan trotoar. Regulasi trotoar biasanya mencakup beberapa aspek, seperti:

Penentuan fungsi trotoar: Trotoar dapat memiliki fungsi beragam, seperti untuk pejalan kaki, pengguna sepeda, dan orang dengan kebutuhan khusus. Regulasi trotoar harus menentukan fungsi trotoar yang tepat dan memastikan bahwa trotoar tersebut dirancang dan dioperasikan sesuai dengan tujuannya.

Penetapan lebar minimum trotoar: Regulasi trotoar harus menetapkan lebar minimum trotoar yang dapat diakses dengan mudah oleh pejalan kaki dan pengguna sepeda. Lebar minimum trotoar juga harus memperhitungkan faktor keselamatan dan kenyamanan pengguna trotoar.

Penetapan aturan parkir: Regulasi trotoar juga harus mengatur parkir kendaraan di sekitar trotoar, termasuk aturan parkir di atas trotoar. Aturan parkir harus dirancang untuk memastikan bahwa trotoar tidak terhalang oleh kendaraan bermotor atau barang dagangan.

Pemeliharaan dan perawatan trotoar: Regulasi trotoar harus menetapkan kewajiban pemeliharaan dan perawatan trotoar untuk memastikan bahwa trotoar tetap dalam kondisi yang baik dan dapat diakses dengan mudah oleh pejalan kaki.

Penegakan hukum: Regulasi trotoar harus didukung oleh penegakan hukum yang tegas untuk mencegah pelanggaran aturan terkait trotoar. Hal ini termasuk sanksi yang diberikan kepada pengguna kendaraan yang melanggar aturan parkir atau merusak trotoar.

Masalah yang terjadi di Jalan Ibrahim Adjie adalah terganggunya akses trotoar bagi pejalan kaki. Trotoar yang seharusnya menjadi fasilitas yang diperuntukkan bagi pejalan kaki untuk berjalan dengan aman dan nyaman di sepanjang jalan, namun di Jalan Ibrahim Adjie, trotoar sering kali terhalang oleh kendaraan bermotor atau barang dagangan, sehingga menyulitkan pejalan kaki untuk berjalan di atas trotoar tersebut. Hal ini sangat berbahaya bagi pejalan kaki karena mereka terpaksa berjalan di jalan yang ramai kendaraan, yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu, terganggunya akses trotoar juga dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan pejalan kaki, karena mereka terpaksa berjalan di tempat yang tidak aman dan tidak sehat.

Berdasarkan deskripsi latar masalah yang terjadi, praktikan menggunakan metode analisis pohon masalah dalam menentukan fokus masalah yang terjadi pada Penataan Lingkungan Sosial sebagai berikut:



Gambar 2.4 Gambar Analisis Pohon Masalah Penataan Lingkungan Trotoar

1) Penyebab Masalah

- a) Belum Tertibnya Sistem Parkir Motor dan Mobil Pada Tepi Jalan Ibrahim Adjie

Belum tertibnya sistem parkir motor dan mobil pada tepi jalan raya Ibrahim Adjie menjadi masalah yang cukup umum di banyak kota di seluruh dunia. Banyak pengendara yang memilih untuk memarkir kendaraan mereka di tepi jalan karena tidak tersedianya fasilitas parkir yang memadai di tempat lain atau karena mereka ingin menghemat waktu dan uang. Namun, kebiasaan ini dapat menimbulkan beberapa masalah dan bahaya.

- b) Terdapatnya Pedagang Kaki Lima yang Berjualan Diatas Trotoar Jalan

Salah satu masalah yang sering terjadi di perkotaan adalah keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan. Meskipun pedagang kaki lima merupakan sumber mata

pencapaian bagi banyak orang, tetapi keberadaan mereka yang berjualan di atas trotoar jalan seringkali menimbulkan beberapa masalah. Keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan dapat mengganggu aksesibilitas trotoar. Karena trotoar jalan dirancang untuk digunakan sebagai jalur pejalan kaki, keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan dapat menyebabkan pejalan kaki terpaksa berjalan di jalan yang seharusnya digunakan oleh kendaraan

c) **Belum Adanya Tindakan Berbasis Masyarakat untuk Mengatasi Masalah Trotoar**

Masalah trotoar yang kurang baik di banyak kota di seluruh dunia menjadi salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Namun, masih banyak kota yang belum mengambil tindakan berbasis masyarakat untuk mengatasi masalah trotoar ini. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya trotoar sebagai tempat untuk berjalan kaki dan aksesibilitas bagi orang yang berkebutuhan khusus. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa trotoar adalah tempat untuk parkir kendaraan, berjualan atau bahkan sebagai tempat pembuangan sampah, sehingga mengganggu fungsi dan kenyamanan trotoar.

d) **Belum Adanya Efek Jera Dari Sanksi Bagi Pelanggar Akses Trotoar**

Salah satu masalah yang sering terjadi dalam mengatasi pelanggaran akses trotoar adalah belum adanya efek jera dari sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Beberapa alasan mengapa sanksi yang diberikan belum efektif dalam mencegah pelanggaran akses trotoar seperti sanksi yang diberikan terlalu ringan, kurangnya pengawasan, tidak adanya sosialisasi yang cukup.

2) **Akibat Masalah**

a) **Pejalan Kaki Terpaksa Harus Berjalan Dibahu Jalan Raya**

Dengan terganggunya akses trotoar, pejalan kaki terkadang terpaksa untuk berjalan di bahu jalan raya akibat trotoar terganggu atau tidak bisa digunakan. Kondisi tersebut sangat mengganggu kenyamanan dan keselamatan dari pejalan kaki di sekitar jalan Ibrahim Adjie.

b) **Pejalan Kaki Rentan Tertabrak Pengendara Motor Maupun Mobil**
Pejalan kaki sangat rentan untuk tertabrak oleh pengendara motor atau mobil di jalan raya. Seringkali terjadi pengendara kendaraan bermotor tidak memperhatikan keberadaan pejalan kaki di sekitar mereka, terutama saat melaju dengan kecepatan tinggi. Bahaya

ini terjadi karena pejalan kaki tidak memiliki perlindungan yang memadai seperti pengendara kendaraan bermotor. Trotoar yang tidak layak atau diganggu oleh kendaraan parkir juga dapat memaksa pejalan kaki untuk berjalan di jalan raya, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan.

- c) Terjadinya Alih Fungsi Dari Trotoar yang Melanggar Aturan Masalah terjadinya alih fungsi dari trotoar yang melanggar aturan adalah ketika trotoar yang seharusnya digunakan sebagai tempat bagi pejalan kaki untuk berjalan, namun digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan yang tidak semestinya. Contohnya adalah trotoar yang digunakan oleh para pedagang kaki lima untuk berjualan, atau digunakan oleh pengendara kendaraan bermotor untuk diparkir. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan bahaya bagi pejalan kaki, karena mereka terpaksa berjalan di jalanan yang berbahaya atau bahkan tidak memiliki tempat untuk berjalan sama sekali. Selain itu, penggunaan trotoar yang tidak semestinya juga melanggar aturan dan dapat mengganggu ketertiban di jalan raya.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan analisis masalah diatas, praktikan mengambil fokus masalah pada Profil Analisis Pembedayaan Sosial ini adalah "Terganggunya Akses Pejalan Kaki Pada Trotoar Jalan Ibrahim Adji".

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan fokus masalah diatas terdapat beberapa kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Pergerakan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam penggunaan akses trotoar bagi pejalan kaki
- 2) Penertiban parkir liar yang mengganggu trotoar
- 3) Penegakan sanksi bagi pelanggar akses trotoar oleh aparat keamanan seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian
- 4) Kerjasama setiap unsur masyarakat untuk menciptakan trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam usaha kesejahteraan sosial atau praktik pekerjaan sosial, selain itu sistem sumber pekerjaan sosial merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan suatu masalah. Pincus dan Minahan (1973) dalam Yurika Maha (2016) mengklasifikasikan sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi tiga jenis yaitu sistem sumber informal atau alamiah, sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan.

Sistem sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan adalah Terganggunya Akses Pejalan Kaki Pada Trotoar Jalan Ibrahim Adjie adalah sebagai berikut:

1) Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini adalah sebagai berikut:

a) Karang Taruna Kelurahan Kebon Kangkung

Pelibatan Karang Taruna dalam kesiapsiagaan kebakaran sangat penting karena mereka dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara mencegahnya. Karang Taruna dapat membantu dalam pembentukan tim kampanye dari kalangan pemuda di Kelurahan Kebon Kangkung.

b) Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah orang-orang yang memungkinkan dapat mempengaruhi ke arah positif yang sejalan dengan tujuan program di Kelurahan Kebon Kangkung. Tokoh masyarakat dapat menjadi faktor pendukung dan pemberi masukan mengenai pelaksanaan program.

2) Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini adalah sebagai berikut:

a) Pekerja Sosial

Dalam program ini Pekerja Sosial memerankan tugas sebagai inisiator dari program alternatif penyelesaian masalah adalah terganggunya akses pejalan kaki pada trotoar jalan Ibrahim Adjie. Pekerja sosial bertugas merencanakan program bersama stakeholder serta menjembatani antara sistem sasaran dengan sistem sumber yang bisa dilibatkan dalam alternatif penyelesaian masalah tersebut.

b) Ketua RT dan RW

Dalam Program ini ketua RT dan RW dapat berperan sebagai kordinator masyarakat dalam pelaksanaan kampanye sosial. Selain itu dukungan moril dan materil sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi warganya untuk berkontribusi dalam upaya penanganan masalah yang dialami oleh pejalan kaki pada trotoar jalan Ibrahim Adjie

3) Sistem Sumber Kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini adalah sebagai berikut:

- a) Dinas Perhubungan Kota Bandung
Sebagai bagian dari pelaksana Pemerintahan Kota Bandung, Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat mendukung program ini dengan memfasilitasi masyarakat dalam kampanye sosial peduli trotoar bagi pejalan kaki di wilayah Kelurahan Kebon Kangkung
- b) Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung
Melalui Seksi Ekonomi dan Pembangunan, pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung dapat memasukan program ini sebagai program kerja tahunan. Sehingga program ini bisa lebih dikembangkan melalui dukungan berupa motivasi, dana, dan fasilitasi pengembangan program.

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Trotoar dan pejalan kaki merupakan bagian penting dari infrastruktur jalan yang harus diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah. Namun, pada kenyataannya, seringkali trotoar tidak dapat digunakan dengan baik karena terhalang oleh kendaraan parkir atau material konstruksi yang tidak tertata. Hal ini mengakibatkan pejalan kaki terpaksa harus berjalan di tengah jalan, yang berpotensi menimbulkan bahaya lalu lintas.

Selain itu, kurangnya perhatian terhadap keselamatan pejalan kaki juga seringkali terjadi. Banyak pengendara motor atau mobil yang tidak memperhatikan hak pejalan kaki di jalan dan melanggar aturan lalu lintas, seperti menempuh jalan yang dituju oleh pejalan kaki atau tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan. Oleh karena itu, diperlukan program penertiban trotoar dan peduli pejalan kaki untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya keselamatan pejalan kaki di jalan raya. Program "Trotolover" hadir untuk menjawab persoalan trotoar di Kelurahan Kebon Kangkung. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan keserasian antara fasilitas trotoar dan fungsinya bagi pejalan kaki di Kelurahan Kebon Kangkung, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi pejalan kaki, serta meningkatkan kualitas infrastruktur jalan yang memadai.

Program ini akan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah dari mulai RT, RW, Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, kepolisian, komunitas masyarakat, serta institusi pendidikan. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga trotoar tetap bersih dan tidak digunakan untuk kepentingan parkir, serta memperhatikan hak pejalan kaki di jalan raya. Dengan demikian, keselamatan pejalan kaki di jalan raya dapat terjamin dan tercipta lingkungan jalan yang lebih baik dan aman untuk semua pengguna jalan.

b. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

1) Tujuan Umum

Tujuan umum dari program “Trotolover” adalah untuk menciptakan keserasian antara fasilitas trotoar dan fungsinya bagi pejalan kaki di Kelurahan Kebon Kangkung.

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari program “Trotolover” adalah sebagai berikut:

- a) Menciptakan kenyamanan akses pelayanan publik bagi pejalan kaki
- b) Menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua kalangan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik
- c) Menciptakan tata kelola parkir yang rapi
- d) Menciptakan kesadaran masyarakat dalam penggunaan trotoar sesuai dengan peruntukannya

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Dalam menangani permasalahan tentang Penataan Lingkungan Sosial yang terjadi di Kelurahan Kebon Kangkung, maka program yang akan dilaksanakan sebagai upaya pemecaha masalahnya adalah "Trotolover" yaitu program kampanye sosial yang mengajak masyarakat untuk mencintai dan menjaga trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki. Dalam program ini akan dilaksanakan kegiatan yang akan melibatkan masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan kesadaran untuk menggunakan trotoar sesuai dengan peruntukannya. Jenis-jenis kegiatan yang ada pada program ini antara lain:

1) Sosialisasi Regulasi dan Aturan Tentang Trotoar

Kegiatan sosialisasi regulasi dan aturan tentang trotoar adalah upaya untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang peraturan yang ada terkait penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan trotoar. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya trotoar sebagai fasilitas publik yang harus dijaga dan diakses dengan baik. Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan informasi secara terbuka dan jelas kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan trotoar, seperti tentang penggunaan trotoar oleh pejalan kaki, pengguna sepeda, dan orang dengan kebutuhan khusus, lebar minimum trotoar yang dapat diakses dengan mudah, aturan parkir di sekitar trotoar, kewajiban pemeliharaan dan perawatan trotoar, dan sanksi bagi pelanggar aturan.

2) Kegiatan Kampanye Sosial Peduli Pejalan Kaki

Kegiatan ini bertujuan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan pejalan kaki di jalan

raya, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan dan cedera yang disebabkan oleh tidak memperhatikan keselamatan pejalan kaki. Isi dari kegiatan ini adalah dengan mengorganisir patroli keselamatan yang dilakukan oleh sukarelawan atau pihak keamanan untuk memastikan bahwa pejalan kaki aman di jalan raya. Patroli ini juga dapat memberikan edukasi dan nasihat langsung kepada pengendara yang tidak mematuhi aturan lalu lintas.

3) Penyediaan Tempat Parkir pada Jalan Ibrahim Adjie

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya menyediakan tempat parkir yang aman dan tertata dengan baik pada Jalan Ibrahim Adjie dengan mendorong pemerintah dan organisasi terkait untuk membangun tempat parkir yang aman dan tertata di jalan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur lahan kosong atau membangun bangunan khusus yang berfungsi sebagai tempat parkir pada bahu jalan.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1) Sistem Inisiator

Sistem inisiator merupakan individu-individu yang pertama kali melihat adanya masalah. Sistem inisiator dalam program ini adalah pekerja sosial.

2) Sistem Agen Perubahan

Sistem agen perubahan merupakan individu-individu yang akan memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinir perubahan. Sistem agen perubahan dalam program ini adalah pekerja sosial dan Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

3) Sistem Klien

Sistem klien merupakan sekelompok orang yang akan menerima pelayanan atau sasaran perubahan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sistem klien dalam program ini adalah masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung.

4) Sistem Pendukung

Sistem pendukung merupakan orang-orang yang memberikan dukungan atau masyarakat yang memiliki perhatian akan keberhasilan perubahan. Sistem pendukung dari program ini adalah Pemerintah Kecamatan Kiaracondong.

5) Sistem Pengontrol

Sistem pengontrol merupakan orang-orang yang memiliki otoritas formal atau kekuasaan untuk menerima atau menolak serta

mengarahkan implementasi perubahan. Sistem pengontrol dalam program ini adalah ketua RT, ketua RW, dan Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung

6) Sistem Pelaksana

Sistem pelaksana merupakan orang-orang yang memiliki tugas rutin melaksanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan. Sistem pelaksana dalam program ini adalah pekerja sosial, dan Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung

7) Sistem Sasaran

Sistem sasaran merupakan orang, struktur, atau kebijakan yang perlu dirubah agar menerima manfaat perubahan seperti yang diharapkan. Sistem sasaran dalam program ini adalah masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung

8) Sistem Aksi

Sistem aksi merupakan orang-orang dari berbagai sistem yang memiliki peran aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana perubahan. Sistem aksi dalam program ini terdiri dari pekerja sosial, masyarakat, Karang Taruna, Pemerintahan Kelurahan Kebon Kangkung, Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

e. Metode dan Teknik

Metode yang akan digunakan praktikan dalam melaksanakan program “Trotolover” adalah dengan *metode Community Organization and Community Development (COCD)* atau pengorganisasian dan pengembangan komunitas. Pengembangan masyarakat dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dari yang paling miskin hingga yang paling makmur. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat daya saing masyarakat dalam menghadapi tantangan global.

Sedangkan teknik yang akan digunakan penyuluhan sosial, kampanye sosial persuasi dan *Focus Group Discussion*. Penyuluhan sosial bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh masyarakat dalam menghadapi masalah sosial atau memperbaiki kondisi sosial yang ada di lingkungannya. Kampanye sosial persuasi adalah bentuk kampanye yang bertujuan untuk mempengaruhi keyakinan, pandangan, atau perilaku seseorang atau kelompok orang dengan cara menyampaikan pesan persuasif. Pesan persuasif dalam kampanye ini dapat berupa ajakan, imbauan, atau ajakan untuk mengubah pandangan atau perilaku orang yang menjadi target kampanye, sehingga meyakinkan sistem sasaran merasa teryakinkan untuk menerima dan mendukung berbagai pandangan terkait dengan masalah yang sedang terjadi. Dalam penggunaan teknik *Forum*

Group Discussion akan memungkinkan pencapaian tujuan dilakukannya diskusi. Dalam FGD ini akan dilakukan dalam kegiatan pemecahan masalah terkait penentuan pembangunan lahan parkir pada bahu Jalan Ibrahim Adjie.

Strategi-strategi yang akan dijalankan dalam pelaksanaan program ini adalah strategi kolaborasi dan pelatihan. Strategi kolaborasi dimaksudkan untuk menciptakan penggunaan sumber-sumber secara bersama dan berfokus pada win-win solution. Strategi pelatihan dimaksudkan untuk memberikan kegiatan yang mendukung peningkatan keterampilan dari sasaran program.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

Untuk melaksanakan program “Trotolover” diperlukan biaya sebagai berikut:

Tabel 2.23 Tabel Rencana Anggaran Biaya Program “Trotolover”

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (RP)	Jumlah (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Logistik				
	Tali rafia	5	Buah	5.000	25.000
	Banner Kegiatan	1	Lembar	75.000	75.000
	Poster kampanye	30	Unit	5.000	150.000
	Jumlah I				250.000
2.	Honorarium				
	Dinas Perhubungan Kota Bandung	3	Orang/Kegiatan	1.000.000	3.000.000
	Jumlah II				3.000.000
3.	Konsumsi				
	Snack Peserta	50	Box	10.000	500.000
	Snack Panitia	5	Box	10.000	50.000
	Snack Narasumber	3	Box	10.000	30.000
	Jumlah III				580.000
	Jumlah Keseluruhan				3.830.000

Rincian peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24 Tabel Peralatan Program “Trotolover”

No	Nama Alat	Jumlah
1.	Sound system	3
2.	Microfon	5
3.	Laptop	2
4.	Proyektor	1
5.	Layar proyektor	1
6.	Kursi	40
7.	Meja	5
8.	Toa	5

g. Analisis Kelayakan Program

Analisis kelayakan dari pelaksanaan program “Trotolover” adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25 Tabel Analisis Kelayakan Program”Trolover”

Faktor Internal	Strength: 1. Program dapat meningkatkan kesadaran di antara masyarakat tentang pentingnya keselamatan pejalan kaki 2. Kegiatan sejalan dengan tujuan pemerintah	Weakness: 1. Mungkin ada resistensi dari beberapa segmen masyarakat, seperti pemilik mobil, atau motor yang mungkin tidak menerima kampanye.
Faktor Eksternal		
Opprtunities: 1. Program dapat berkolaborasi dengan organisasi lain yang bekerja untuk tujuan yang sama, seperti organisasi keselamatan jalan atau kelompok lingkungan	Strategi SO: 1. Program dapat melibatkan masyarakat lokal, termasuk LSM dan organisasi lainnya, untuk berpartisipasi dalam kampanye 2. Program dapat memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi atau	Strategi WO: 1. Penyusunan kegiatan sosialisasi yang menarik dengan pelibatan semua kalangan usia 2. Penyampaian informasi pada sosialisasi dengan menghindari

2. Program dapat memanfaatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh tambahan dana atau sumber daya	perangkat GPS, untuk memberikan informasi secara real-time kepada pejalan kaki dan pengemudi tentang keselamatan pejalan kaki.	penggunaan istilah bahasa asing
Treats: 1. Mungkin ada penentangan dari masyarakat yang dapat membatasi lingkup atau efektivitas program.	Strategi ST: 1. Menyediakan hadiah bagi peserta terbaik 2. Menyediakan tempat yang nyaman dan strategis	Strategi WT: 1. Melaksanakan kegiatan pada hari libur agar semua masyarakat menyempatkan waktunya 2. Meningkatkan intensitas pembinaan kepada yayasan terkait 3. Melakukan penilaian monitoring dan evaluasi kegiatan

h. Jadwal dan Langkah-Langkah

Langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program “Trotolover” adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan program yang memiliki tujuan mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan program. Tahap persiapan dalam program ini terdiri dari:

a) Penyusunan Kepanitiaan

Penyusunan kepanitiaan dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam penyusunan panitia seluruh sumber daya manusia diberikan tugas dan fungsi sesuai bidangnya masing-masing agar memudahkan keberlangsungan pelaksanaan program.

b) Penyusunan Rencana Kegiatan

Setelah didapatkannya susunan panitia maka seluruh unsur kepanitiaan mengadakan pertemuan untuk membahas rencana

kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal-hal yang akan dibahas pada tahap ini mencakup diskusi terkait dengan bentuk kegiatan, penyusunan jadwal kegiatan, tempat kegiatan, indikator keberhasilan kegiatan dan hal penting lainnya yang diperlukan selama kegiatan ini berlangsung.

c) Penyusunan Proposal dan Undangan Kegiatan

Penyusunan proposal bertujuan untuk mempermudah dalam proses izin pelaksanaan program dari berbagai pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program kegiatan. Untuk mendukung keberhasilan program maka diperlukan penyebaran undangan kepada lembaga-lembaga ataupun orang yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam upaya mewujudkan keberhasilan berjalannya kegiatan.

d) Rapat Panitia

Untuk memastikan segala hal yang diperlukan sudah siap maka diperlukan pertemuan panitia sebagai media koordinasi terakhir sebelum program dilaksanakan. Dengan adanya pertemuan ini panitia dapat menyamakan persepsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan meminimalisir kesalahan ketika program sedang berlangsung.

2) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan program “Trotolover” terdapat kegiatan sosialisasi tentang regulasi dan aturan trotoar kepada masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung. Selain itu kegiatan selanjutnya adalah kampanye sosial tentang peduli trotoar yang dilaksanakan dengan cara berjalan kaki pada trotoar Jalan Ibrahim Adjie. Untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan maka dalam kegiatan ini melibatkan Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyedia narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan pengamanan selama kegiatan berlangsung.

Adapun susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a) Sosialisasi Regulasi dan Aturan Tentang Trotoar

Tabel 2.26 Tabel Jadwal Kegiatan Program “Trolover” Pertemuan Pertama

Pertemuan Pertama				
No	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Panitia	07.00 – 07.30	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia

3.	Pembukaan	08.00 – 08.15	15 Menit	Master of Ceremony
4.	Sambutan	08.15 – 08.35	20 Menit	Lurah Kebon Kangkung, Dinas Perhubungan Kota Bandung
5.	Pembacaan Doa	08.35 – 08.40	5 Menit	Panitia
6.	Penyampaian Materi Sosialisasi Regulasi dan Aturan Tentang Trotoar	08.40 – 10.10	90 Menit	Dinas Perhubungan Kota Bandung
7.	Sesi Tanya Jawab	10.10 – 10.30	20 Menit	Peserta dan Pemateri
8.	Kuis Berhadiah	10.30 – 10.45	15 Menit	Peserta dan Pemateri
9.	Dokumentasi	10.45 – 10.50	5 Menit	Panitia
10.	Penutupan	10.50 – 10.55	5 Menit	Master of Ceremony

b) Kegiatan Kampanye Sosial Peduli Pejalan Kaki

Tabel 2.27 Tabel Jadwal Kegiatan Program “Trolover” Pertemuan Kedua

Pertemuan Kedua				
No	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Panitia	07.00 – 07.30	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.00 – 08.15	15 Menit	Master of Ceremony
4.	Penjelasan Rute Kampanye Sosial	08.15 – 08.30	15 Menit	Peserta dan Panitia
5.	Pembacaan Doa	08.35 – 08.40	5 Menit	Panitia
6.	Kampanye Sosial Peduli Pejalan Kaki	08.40 – 09.40	60 Menit	Peserta, Panitia, dan Dinas Perhubungan Kota Bandung
7.	Dokumentasi	09.40 – 09.45	5 Menit	Panitia
8.	Penutupan	09.45 – 09.50	5 Menit	Master of Ceremony

c) Musyawarah Penyediaan Tempat Parkir Pada Bahu Jalan
Ibrahim Adjie

Tabel 2.28 Tabel Jadwal Kegiatan Program “Trolover” Pertemuan Ketiga

Pertemuan Pertama				
No	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Panitia	07.00 – 07.30	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.00 – 08.15	15 Menit	Master of Ceremony
5.	Pembacaan Doa	08.15 – 08.20	5 Menit	Panitia
6.	Musyawarah Pembangunan Tempat Parkir Pada Bahu Jalan	08.20 – 09.40	90 Menit	Peserta, Ketua RT, Ketua RW, Lurah Kelurahan Kebon Kangkung, dan Dinas Perhubungan Kota Bandung
7.	Sesi Tanya Jawab	09.40 – 10.00	20 Menit	Peserta dan Pemateri
9.	Dokumentasi	10.00 – 10.05	5 Menit	Panitia
10.	Penutupan	10.05 – 10.10	5 Menit	Master of Ceremony

3) Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran merupakan tahapan terakhir dalam rangkaian kegiatan dalam sebuah program. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi evaluasi kegiatan dan pelaporan kegiatan.

a) Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan refleksi atau peninjauan antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan berlangsung. Tujuan dilakukannya evaluasi proses ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses berlangsungnya kegiatan dan proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi hasil merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan atau program. Tujuan dilakukannya evaluasi hasil adalah untuk

mengetahui tingkat pencapaian tujuan terhadap indikator keberhasilan setelah pelaksanaan program.

b) Pelaporan Program

Pelaporan program “Trotolover” merupakan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dari pelaksanaan program kepada pihak yang memiliki otoritas dan yang sudah terlibat dalam pelaksanaan program, yaitu Pemerintahan Kelurahan Kebon Kangkung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandung dan Dinas Perhubungan Kota Bandung Pelaporan pertanggungjawaban kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk menyusun program-program yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.

E. Profil Analisis Penanggulangan Bencana

Pada profil Analisis Penanggulangan Bencana, praktikan menemukan isu yang ada di wilayah Kelurahan Kebon Kangkung mengenai belum adanya fasilitas yang mendukung kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana kebakaran. Dalam prosesnya praktikan menggunakan metode pengumpulan analisis data sekunder, baik berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, data statistik, dan studi literatur dalam penyusunan laporan praktikum pada profil Analisis Penanggulangan Bencana.

1. Gambaran Umum Masalah

Kepadatan penduduk di Kota Bandung dapat digambarkan sebagai kondisi di mana jumlah penduduk yang tinggal di kota Bandung sangat besar dibandingkan dengan luas wilayah yang tersedia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Bandung mencapai sekitar 2,5 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 167,67 km². Hal ini menjadikan kepadatan penduduk di kota Bandung sekitar 14.910 jiwa per km². Kepadatan penduduk yang tinggi ini menyebabkan banyak masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di kota Bandung. Misalnya, kemacetan lalu lintas yang parah, keterbatasan lahan untuk pembangunan, kesulitan akses air bersih dan sanitasi, polusi udara, dan masalah kesehatan yang berkaitan dengan tingginya jumlah penduduk.

Salah satu wilayah di Kota Bandung yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi adalah Kelurahan Kebon Kangkung. Menurut tipologi Kelurahan Kebon Kangkung, pada tahun 2022 terdapat 12.899 jiwa dengan kepadatan penduduk 249 jiwa/Ha. Menurut Komandan Peleton Regu C Suku Dinas Kebakaran (dilansir pada merdeka.com), kondisi pemukiman yang padat apabila terjadi kebakaran maka risiko penyebaran api dari satu titik ke titik lainnya sangat tinggi. Dengan tidak adanya jarak dari setiap

bangunan, hal itu menjadi faktor utama yang membuat api cepat menjalar. Tidak hanya itu kondisi pemukiman yang padat seringkali menyulitkan pemadam kebakaran untuk mencapai akses sampai ke titik lokasi kebakaran.

2. Tinjauan Konsep

a. Definisi Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan menurut Asian Disaster Reduction Center (2003) yang dikutip Wijayanto, bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber yang ada.

b. Jenis-Jenis Bencana

Jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, antara lain:

1) Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;

2) Bencana Non Alam

Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit.

3) Bencana Sosial

Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.

4) Kegagalan Teknologi

Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan, manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri yang menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya.

c. Manajemen Bencana

Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi,

kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. (UU 24/2007). Manajemen bencana menurut Nurjanah (2012:42) sebagai Proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan.

Adapun tujuan manajemen bencana secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup;
- 2) Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban;
- 3) Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman;
- 4) Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana;
- 5) Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut;
- 6) Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

Secara umum manajemen bencana dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan dengan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan mulai dari pra bencana, pada saat tanggap darurat, dan pasca bencana.



Gambar 2.5 Gambar Bagan Manajemen bencana

- 1) Tahap Pra Bencana
 - a) Pencegahan (*prevention*)

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya). Misalnya : melarang

pembakaran hutan dalam perladangan; melarang penambangan batu di daerah yang curam, dan melarang membuang sampah sembarangan.

b) Mitigasi Bencana (*Mitigation*)

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui:

- (1) Pelaksanaan penataan ruang;
- (2) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
- (3) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

c) Kesiapsiagaan (*Preparedness*)

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Beberapa bentuk aktivitas kesiapsiagaan yang dapat dilakukan antara lain:

- (1) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- (2) Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- (3) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- (4) Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- (5) Penyiapan lokasi evakuasi;
- (6) Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tentang tanggap darurat bencana; dan
- (7) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana

d) Peringatan Dini (*Early Warning*)

Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU 24/2007) atau Upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini harus:

- (1) Menjangkau masyarakat (*accessible*),
- (2) Segera (*immediate*),
- (3) Tegas tidak membingungkan (*coherent*),
- (4) Bersifat resmi (*official*).

2) Tahap Saat Terjadi Bencana

yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan bantuan darurat dan pengungsian

a) Tanggap Darurat (*response*)

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Beberapa aktivitas yang dilakukan pada tahapan tanggap darurat antara lain:

- (1) pengkajian yang dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
- (2) penentuan status keadaan darurat bencana;
- (3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- (4) pemenuhan kebutuhan dasar;
- (5) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- (6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital (UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 48 tentang Penaangulangan Bencana).

b) Bantuan Darurat (*relief*)

Merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa : pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih

3) Tahap pasca bencana

yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

a) Pemulihan (*recovery*)

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan pemulihan adalah

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- (2) Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- (3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- (4) Pemulihan sosial psikologis;
- (5) Pelayanan kesehatan;
- (6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- (7) Pemulihan sosial ekonomi budaya, dan

(8) Pemulihan fungsi pelayanan publik.

b) Rehabilitasi (*rehabilitation*)

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan :

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana,
- (2) Perbaikan prasarana dan sarana umum,
- (3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat,
- (4) Pemulihan sosial psikologis,
- (5) Pelayanan kesehatan,
- (6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik,
- (7) Pemulihan sosial ekonomi budaya,
- (8) Pemulihan keamanan dan ketertiban,
- (9) Pemulihan fungsi pemerintahan, dan
- (10) Pemulihan fungsi pelayanan publik.

c) Rekonstruksi (*reconstruction*)

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta Langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

d. Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran

Menurut LIPI UNESCO/ISDR (2006) dalam Nurjanah (2012) kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan di dalam konsep pengelolaan bencana yang berkembang saat ini, peningkatan kesiapsiagaan merupakan elemen penting dari kegiatan pengurangan risiko bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya suatu bencana. Menurut Sutton dan Tierney dalam Dodon (2013) Kesiapsiagaan merupakan kegiatan yang sifatnya perlindungan aktif yang dilakukan pada saat bencana terjadi dan memberikan solusi jangka pendek untuk memberikan dukungan bagi pemulihan jangka panjang. Konsep kesiapsiagaan yang digunakan pada kajian penilaian kesiapsiagaan

masyarakat lebih ditekankan pada menyiapkan kemampuan untuk dapat melaksanakan kegiatan tanggap darurat secara tepat dan tepat..

Kebakaran bangunan merupakan salah satu jenis kebakaran yang sering terjadi, faktor utama penyebabnya adalah kondisi bangunan itu sendiri yang tidak memenuhi persyaratan umum keamanan, sehingga bangunan/hunian perlu dianalisis tingkat kerawannya. Maka dari itu perlu dilakukan survei lapangan sedapat mungkin secara sensus, artinya semua bangunan yang ada diperiksa. Namun apabila langkah ini tidak memungkinkan, dengan pertimbangan biaya dan waktu, maka dapat dilakukan survei dengan mengambil sampel-sampel bangunan yang dianggap mewakili (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003).

1) Tujuan Kesiapsiagaan

Menurut Gregg dalam Dodon (2013) kesiapsiagaan bertujuan untuk meminimalkan efek samping bahaya melalui tindakan pencegahan yang efektif, tepat waktu, memadai, efisiensi untuk tindakan tanggap darurat dan bantuan saat bencana. Upaya kesiapsiagaan juga bertujuan untuk memastikan bahwa sumberdaya yang diperlukan untuk tanggap dalam peristiwa bencana dapat digunakan secara efektif pada saat bencana dan tahu bagaimana menggunakannya (Sutton dan Tierney dalam Dodon:2013).

2) Sifat Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan suatu komunitas selalu tidak terlepas dari aspek-aspek lainnya dari kegiatan pengelolaan bencana (tanggap darurat, pemulihan dan rekonstruksi, pencegahan dan mitigasi). Untuk menjamin tercapainya suatu tingkat kesiapsiagaan tertentu, diperlukan berbagai langkah persiapan pra-bencana, sedangkan keefektifan dari kesiapsiagaan masyarakat dapat dilihat dari implementasi kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Pada saat pelaksanaan pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, harus dibangun juga mekanisme kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan bencana berikutnya.

Selain itu juga perlu diperhatikan sifat kedinamisan dari suatu kondisi kesiapsiagaan suatu komunitas. Tingkat kesiapsiagaan suatu komunitas dapat menurun setiap saat dengan berjalannya waktu dan dengan terjadinya perubahan-perubahan sosial-budaya, politik dan ekonomi dari suatu masyarakat. Karena itu sangat diperlukan untuk selalu memantau dan mengetahui kondisi kesiapsiagaan suatu masyarakat dan melakukan usaha-usaha untuk selalu menjaga dan meningkatkan tingkat kesiapsiagaan tersebut (LIPI-UNESCO/ISDR:2006 dalam Nurjanah, 2012).

3) Indikator Kesiapsiagaan

Indikator yang akan digunakan untuk menilai kesiapsiagaan masyarakat dalam penelitian ini berdasarkan LIPI UNESCO/ISDR yaitu:

a) Sikap Kesiapsiagaan

Sikap kesiapsiagaan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Sikap menentukan bagaimana individu membuat respon atau bereaksi terhadap suatu situasi bencana.

b) Rencana Tanggap Darurat

Rencana tanggap darurat menjadi bagian yang penting dalam kesiapsiagaan, terutama berkaitan dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan, agar korban bencana dapat diminimalkan. c. Sistem peringatan dini Sistem ini meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana. Melalui peringatan bencana ini, masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengarungi korban jiwa, harta benda dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan latihan dan simulasi, apa yang harus dilakukan apabila mendengar peringatan, kemana dan bagaimana harus menyelamatkan diri dalam waktu tertentu, sesuai dengan lokasi dimana masyarakat sedang berada saat terjadinya peringatan.

c) Mobilitas Sumberdaya

Sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia (SDM), maupun pendanaan dan sarana prasarana penting untuk keadaan darurat merupakan potensi yang dapat mendukung atau sebaliknya menjadi kendala dalam kesiapsiagaan bencana. Berikut ini adalah rincian dari indikator kesiapsiagaan menurut LIPI:

Tabel 2.29 Tabel Indikator Kesiapsiagaan Bencana

Parameter	Variabel	Indikator
Sikap	Sikap terhadap risiko bencana	<ul style="list-style-type: none">Memiliki motivasi untuk mengantisipasi bencana
Rencana Tanggap Darurat	Rencana merespon keadaan darurat	<ul style="list-style-type: none">Terdapat rencana penyelamatan (siapa melakukan apa) bila terjadi kondisi darurat (pembagian kerja)Terdapat anggota keluarga yang mengetahui apa yang harus dilakukan untuk evakuasi

	Rencana evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki pandangan kemana harus mengungsi ketika terjadi kebakaran Memahami jalur evakuasi (rute evakuasi) yang dipasang oleh pemerintah setempat Mengetahui tempat berkumpul sementara ketika terjadi kebakaran
	Pertolongan pertama	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan kotak p3k atau obat-obatan penting untuk pertolongan pertama Adanya anggota keluarga yang pernah mengikuti latihan dan ketrampilan evakuasi
	Pemenuhan kebutuhan dasar	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan makanan siap saji untuk keadaan darurat Menyediakan alat penerangan alternatif pada musim hujan (senter/lampu/genset) Menyediakan alat komunikasi alternatif antar keluarga (HP)
	Peralatan dan perlengkapan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kesediaan antar anggota keluarga untuk menyiapkan perlengkapan siaga bencana Menyiapkan perlengkapan siaga bencana dalam tas siap bawa / tas siaga bencana
Sistem Peringatan Dini	Latihan dan simulasi	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti latihan dan simulasi peringatan bencana kebakaran
	Peringatan dan mekanisme	<ul style="list-style-type: none"> Mengerti informasi (tanda peringatan) yang diberikan baik ketika alat pendeteksi kebakaran berbunyi ataupun kentongan yang dibunyikan
Mobilitas Sumber Daya	Sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> Adanya anggota keluarga yang terlibat dalam seminar/workshop/pertemuan/pelatihan kesiapsiagaan bencana Tersedianya jaringan sosial (keluarga/kerabat/teman) yang

		siap membantu pada saat darurat bencana
	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki tabungan atau asuransi untuk mengantisipasi kerusakan rumah atau dampak bencana lainnya

e. Bencana Kebakaran

Menurut Purbo dalam Salsabila 2021, kebakaran adalah bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia atau harta benda jika nyala api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi akibat adanya reaksi segitiga api (*fire triangle*) yaitu reaksi dari bahan yang mudah terbakar (*fuel*), oksigen dan panas (*heat*) (Januandari et al., 2017).

Kebakaran merupakan suatu kejadian dimana api bekerja tidak pada tempatnya dan berakibat terjadinya kerugian bagi beberap pihak. Kebakaran dapat memberikan ancaman bagi keselamatan jiwa, aset perusahaan dan lingkungan sekitar apabila tidak dikendalikan (Kuntoro et al., 2020 dalam Salsabila, 2021).

1) Klasifikasi Kebakaran

Klasifikasi kebakaran merupakan penggolongan atau pembagian kebakaran berdasarkan jenis bahan bakarnya. Pengklasifikasian kebakaran ini bertujuan untuk memudahkan upaya pencegahan dan digunakan dalam memilih media pemadam yang sesuai.

a) Klasifikasi Kebakaran Menurut NFPA

NFPA (*National Fire Protection Association*) adalah suatu lembaga swasta yang khusus menangani penanggulangan bahaya kebakaran di Amerika Serikat. Menurut NFPA, terdapat 4 klasifikasi kebakaran, yaitu (Fatmawati, 2009 dalam Salsabila 2021) :

(1) Kelas A,

Kebakaran Kelas A yaitu kebakaran dari bahan padat kecuali logam Kelas ini memiliki ciri jenis kebakaran yang meninggalkan abu dan arang. Unsur bahan yang terbakar biasanya mengandung karbon, misalnya kertas, plastik, karet, kayu, busa, tekstil, dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Adapun aplikasi media pemadam yang cocok untuk kelas ini ialah bahan jenis basah yaitu air. Hal itu dikarenakan prinsip kerja air dalam memadamkan api adalah menyerap kalor/panas serta dapat menembus sampai bagian yang dalam.

(2) Kelas B,

Kebakaran Kelas B yaitu kebakaran dari bahan cair dan gas yang mudah terbakar. Kelas ini terdiri dari unsur bahan yang mengandung *hidrokarbon* dari produk minyak bumi dan turunan kimianya, misalnya bensin, minyak, alkohol, aspal, gas LPG, dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Adapun aplikasi media pemadam yang cocok untuk bahan cair adalah jenis busa. Prinsip kerja busa dalam memadamkan api adalah dapat menutup permukaan cairan yang mengapung pada permukaan. Aplikasi media pemadam yang cocok untuk bahan gas adalah jenis bahan pemadam yang bekerja atas dasar substitusi oksigen dan atau memutuskan reaksi berantai yaitu jenis tepung kimia kering atau CO₂.

(3) Kelas C,

Kebakaran Kelas C yaitu kebakaran dari listrik yang bertegangan. Kelas ini terdiri dari unsur bahan yang mengandung listrik bertegangan, misalnya peralatan rumah tangga, televisi, radio, komputer, trafo, transmisi listrik, panel listrik, dan sebagainya. Aplikasi media pemadam yang cocok untuk kelas ini adalah jenis bahan kering yaitu tepung kimia atau CO₂.

(4) Kelas D,

Kebakaran Kelas D yaitu kebakaran dari bahan logam. Kelas ini memiliki ciri jenis kebakaran yang mengandung bahan logam. Pada prinsipnya, semua bahan dapat terbakar tak terkecuali benda dari jenis logam, hanya saja tergantung pada nilai titik nyalanya, misalnya *sodium, aluminium, magnesium, potassium, calcium, zinc*, dan sebagainya. Aplikasi media pemadam yang cocok untuk kelas ini tidak dapat menggunakan air dan bahan pemadam seperti pada umumnya, karena hal tersebut justru bisa menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, harus dirancang secara khusus media pemadam yang prinsip kerjanya adalah menutup permukaan bahan yang terbakar dengan cara menimbun. Diperlukan pemadam kebakaran khusus (misal *Metal-X, foam*) untuk memadamkan kebakaran jenis ini.

f. Teknik Pemadaman Kebakaran

Pemadaman kebakaran adalah suatu teknik menghentikan reaksi pembakaran atau nyala api. Memadamkan kebakaran bisa dilakukan dengan prinsip menghilangkan salah satu atau beberapa unsur dalam proses nyala api. Teknik pemadaman dilakukan dengan media yang sesuai dengan prinsip pemadaman tersebut (Depnakertrans, 2008 dalam Salsabila, 2021).

Pemadaman kebakaran dapat dilakukan dengan beberapa teknik/metode, yaitu:

1) Pendinginan (*Cooling*)

Pendinginan dengan menggunakan air adalah salah satu metode pemadaman kebakaran yang paling umum digunakan. Proses pemadaman ini bergantung pada turunnya temperatur bahan bakar sampai ke titik dimana bahan bakar tersebut tidak dapat menghasilkan uap/gas untuk pembakaran. Bahan bakar padat dan bahan bakar cair dengan titik nyala (flash point) tinggi bisa dipadamkan dengan pendinginan. Kebakaran yang mengandung cairan dan gas-gas yang mudah menyala yang rendah titik nyalanya tidak dapat dipadamkan dengan pendinginan menggunakan air, karena produksi uap tidak dapat cukup dikurangi. Penurunan temperatur bergantung pada penyemprotan aliran yang cukup dalam bentuk yang benar, agar dapat membangkitkan keseimbangan panas negative (Pusdiklatkar, 2006 dalam Salsabila 2021).

2) Pembatasan Oksigen (*Dilution*)

Membatasi atau mengurangi kandungan oksigen di area juga dapat memadamkan api. Teknik ini adalah satu cara yang paling mudah untuk memadamkan api. Pengurangan kandungan oksigen dapat dilakukan dengan membanjiri area tersebut dengan gas lembam, seperti karbondioksida yang menggantikan oksigen atau dapat juga dikurangi dengan cara memisahkan bahan bakar dari udara seperti dengan menyelimutinya menggunakan busa (Pusdiklatkar, 2006 dalam Salsabila, 2021).

3) Memindahkan/Menghentikan Sumber Bahan Bakar (*Starvation*)

Dalam beberapa kasus, kebakaran dapat dipadamkan dengan efektif dengan menyingkirkan sumber bahan bakar. Namun, pemindahan bahan bakar ini tidak selalu bisa dilakukan karena dalam prakteknya sulit dilakukan. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan menyiram bahan bakar yang terbakar dengan menggunakan air atau dengan membuat busa yang dapat menghentikan/memisahkan minyak dengan daerah pembakaran (Soehatman Ramli, 2005 dalam Salsabila, 2021).

4) Memutus Reaksi Rantai (*Breaking Chain Reaction*)

Cara yang terakhir untuk memadamkan api adalah dengan mencegah terjadinya reaksi rantai dalam proses pembakaran. Beberapa zat kimia mempunyai sifat memecah, sehingga dapat terjadi reaksi rantai oleh atom-atom yang dibutuhkan oleh nyala api untuk tetap terbakar. Selain itu, ada cara pemadaman yang dinilai efektif untuk dilakukan yaitu dengan menggunakan beberapa bahan pemadam seperti bahan kimia kering dan hidrokarbon terhalogenasi

(halon) yang akan menghentikan reaksi kimia yang dapat menimbulkan nyala api sehingga akan mematikan nyala api tersebut. Cara tersebut dinilai efektif untuk bahan bakar gas dan cair, karena keduanya akan menyala dahulu sebelum terbakar. Akan tetapi, bara api tidak mudah dipadamkan dengan cara ini, karena saat halon tertutup, udara mempunyai jalan masuk pada bahan bakar yang sedang membara dan berlanjut sampai membara. Pendinginan adalah salah satu cara yang mudah untuk memadamkan api yang membara (IFSTA, 1994 dalam Salsabila, 2021).

3. Asesmen

Praktikum laboratorium pada profil Analisis Penanggulangan Bencana dilakukan pada tanggal 5 hingga 14 April 2023. Praktikan melakukan asesmen dengan pendalaman data primer melalui metode wawancara dengan perangkat Kelurahan Kebon Kangkung Selain itu praktikan melakukan pendalaman data sekunder melalui laman Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Teknik yang digunakan dalam proses asesmen antara lain teknik analisis pohon masalah, dan penelitian kepustakaan.

a. Identifikasi Masalah

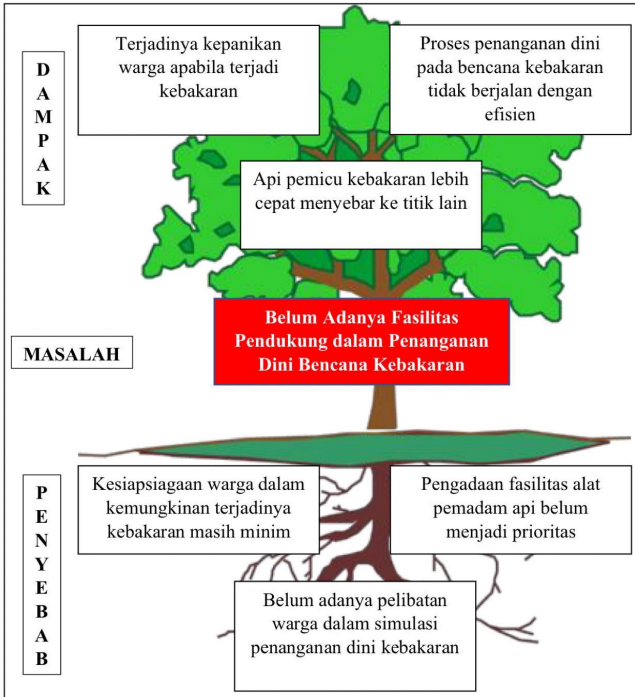
Bencana kebakaran di Kelurahan Kebon Kangkung telah terjadi sebanyak tiga kali dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dari ketiga peristiwa tersebut rumah hangus terbakar karena kemampuan masyarakat dalam menangani kebakaran masih minim dan cenderung tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara praktikan bersama salah satu ketua RW di Kelurahan Kebon Kangkung, minimnya kemampuan masyarakat dalam penanganan dini bencana kebakaran tersebut disebabkan masyarakat setempat belum pernah dilibatkan dalam simulasi upaya penanganan dini apabila terjadi kebakaran di pemukiman padat penduduk.

Dalam situasi darurat kebakaran, penanganan dini sangatlah penting untuk meminimalisir risiko terjadinya kebakaran yang lebih besar. Namun, jika tidak ada fasilitas penanganan dini yang memadai di pemukiman warga, maka masyarakat tidak dapat dengan cepat dan efektif menangani kebakaran pada tahap awal, sehingga dapat mengakibatkan kerugian material yang besar dan bahkan korban jiwa.

Masalah yang teridentifikasi adalah minimnya fasilitas penanganan dini bencana kebakaran di pemukiman warga. Hal ini dapat menjadi masalah serius karena kebakaran dapat dengan mudah terjadi di pemukiman warga, terutama jika kondisi lingkungan tidak terawat atau terdapat material yang mudah terbakar di sekitar pemukiman. Selain itu, minimnya fasilitas penanganan dini bencana kebakaran juga dapat menyebabkan keterlambatan tindakan petugas pemadam kebakaran dalam menangani kebakaran, karena mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh dari

stasiun pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Keterlambatan ini dapat menyebabkan api semakin besar dan sulit untuk dikendalikan.

Berdasarkan deskripsi latar masalah yang terjadi, praktikan menggunakan metode analisis pohon masalah dalam menentukan fokus masalah yang terjadi pada Penanggulangan Bencana sebagai berikut:



Gambar 2.6 Gambar Analisis Pohon Masalah Penanggulangan Bencana

1) Penyebab Masalah

- a) Kesiapsiagaan Warga dalam Kemungkinan Terjadinya Kebakaran Masih Minim

Di banyak pemukiman, minimnya kesiapsiagaan warga dalam menghadapi kebakaran menjadi masalah yang serius. Seringkali warga tidak memiliki atau bahkan tidak tahu cara menggunakannya. Hal ini membuat mereka tidak siap

untuk menghadapi kebakaran jika terjadi. Selain itu, tata letak rumah dan pemukiman yang kurang memperhatikan faktor keamanan juga menjadi masalah serius. Pemukiman yang padat dan memiliki jalan yang sempit membuat mobil pemadam kebakaran sulit untuk mencapai lokasi kebakaran.

b) **Pengadaan Fasilitas Pemadam Api Belum Menjadi Prioritas**

Masih banyak daerah yang minim fasilitas pemadam api, bahkan di beberapa daerah, pengadaan fasilitas pemadam api belum menjadi prioritas. Hal ini menjadi masalah serius, karena kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Masalah lainnya adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan fasilitas pemadam api. Kebanyakan pemerintah daerah lebih memprioritaskan penganggaran untuk pembangunan infrastruktur lainnya daripada pengadaan fasilitas pemadam api. Padahal, investasi dalam fasilitas pemadam api sangat penting untuk melindungi warga dan mencegah kerugian besar akibat kebakaran.

c) **Belum Adanya Pelibatan Warga Dalam Simulasi Penanganan Dini Kebakaran**

Masih banyak daerah di Indonesia yang belum melibatkan warga dalam simulasi penanganan dini kebakaran salah satunya di Kelurahan Kebon Kangkung. Hal ini menjadi masalah serius, karena penanganan dini kebakaran membutuhkan koordinasi yang baik antara petugas pemadam kebakaran dan warga sekitar. Salah satu penyebab minimnya pelibatan warga dalam simulasi penanganan dini kebakaran adalah minimnya kesadaran dan edukasi terkait bahaya kebakaran. Banyak warga yang tidak tahu cara mencegah kebakaran atau cara menggunakannya alat pemadam yang ada. Hal ini membuat mereka tidak siap dan sulit untuk mengambil tindakan yang tepat saat kebakaran terjadi.

2) **Akibat Masalah**

a) **Terjadinya Kepanikan Warga Apabila Terjadi Kebakaran**

Jika masyarakat tidak terlatih dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara menghadapi situasi darurat tersebut. Kebanyakan orang akan panik, merasa takut dan bingung saat terjadi kebakaran karena merasa tidak tahu harus berbuat apa. Kondisi ini dapat memperburuk situasi dan mempersulit upaya penanganan kebakaran, karena kepanikan dapat menyebabkan warga melakukan tindakan yang kurang tepat dan berbahaya, seperti berusaha memadamkan api dengan cara yang salah atau mengambil risiko yang tidak perlu.

b) Proses Penanganan Dini Pada Bencana Kebakaran Tidak Berjalan dengan Efisien

Proses penanganan dini pada bencana kebakaran yang tidak berjalan dengan efisien merupakan masalah yang sering terjadi di banyak daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai, minimnya pengetahuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran, serta minimnya koordinasi antara petugas pemadam kebakaran dengan instansi terkait dan warga sekitar. Ketidakmampuan dalam menangani kebakaran dengan cepat dan efektif dapat berdampak pada meningkatnya kerugian dan bahkan korban jiwa. Proses penanganan dini yang lambat juga dapat memperbesar risiko kebakaran semakin meluas dan sulit untuk dikendalikan.

c) Api Pemicu Kebakaran Lebih Cepat Menyebar Ke Titik Lain

Api pemicu kebakaran memiliki potensi untuk menyebar ke titik lain dengan sangat cepat, terutama jika tidak segera ditangani dengan tepat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya bahan atau material yang mudah terbakar di sekitar lokasi kebakaran, kondisi angin yang kencang, serta minimnya upaya penanganan dini. Apabila tidak segera ditangani, api dapat dengan mudah menjalar ke bahan atau material yang mudah terbakar lainnya, bahkan dapat menyebar ke bangunan atau area yang lebih luas. Api juga dapat dengan cepat menghasilkan asap yang berbahaya bagi kesehatan dan dapat mengganggu proses penanganan kebakaran.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan analisis masalah diatas, praktikan mengambil fokus masalah pada Profil Penanggulangan Bencana adalah “Belum Adanya Fasilitas Pendukung dalam Penanganan Dini Bencana Kebakaran”

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan fokus masalah diatas terdapat beberapa kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Fasilitas pendukung dalam penanganan dini bencana kebakaran
- 2) Pelibatan masyarakat dalam simulasi penanganan dini bencana kebakaran
- 3) Penyampaian informasi hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika terjadi kebakaran
- 4) Pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam usaha kesejahteraan sosial atau praktik pekerjaan sosial, selain itu sistem sumber pekerjaan sosial merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan suatu masalah. Pincus dan Minahan (1973) dalam Yurika Maha (2016) mengklasifikasikan sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi tiga jenis yaitu sistem sumber informal atau alamiah, sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan. Sistem sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan adalah Belum Adanya Fasilitas Pendukung dalam Penanganan Dini Bencana Kebakaran adalah sebagai berikut:

1) Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini adalah sebagai berikut:

a) Karang Taruna

Pelibatan Karang Taruna dalam kesiapsiagaan kebakaran sangat penting karena mereka dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara mencegahnya. Karang Taruna dapat membentuk tim kesiapsiagaan untuk menanggulangi kebakaran, seperti memiliki alat pemadam api ringan, mengadakan pelatihan dalam pemadaman kebakaran, dan bekerja sama dengan petugas pemadam kebakaran setempat.

2) Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini adalah sebagai berikut:

a) Pekerja Sosial

Dalam program ini Pekerja Sosial memerankan tugas sebagai inisiator dari program alternatif penyelesaian masalah adalah Belum Adanya Fasilitas Pendukung dalam Penanganan Dini Bencana Kebakaran. Pekerja sosial bertugas merencanakan program bersama stakeholder serta menjembatani antara sistem sasaran dengan sistem sumber yang bisa dilibatkan dalam alternatif penyelesaian masalah tersebut.

b) Ketua RT dan RW

Dalam Program ini ketua RW 06 memiliki kewenangan dalam memberikan perizinan kegiatan dan penyediaan tempat pelatihan karena titik peternakan lele Buruan SAE terletak di RW 06. Selain itu ketua RW juga dapat berperan sebagai sistem pengontrol dalam kegiatan.

3) Sistem Sumber Kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini adalah sebagai berikut:

a) Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Sebagai bagian dari pelaksana Pemerintahan Kota Bandung, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dapat mendukung program ini dengan memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan simulasi penanganan dini bencana kebakaran di wilayah Kelurahan Kebon Kangkung

b) Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung

Melalui Seksi Ekonomi dan Pembangunan, pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung dapat memasukan program ini sebagai program kerja tahunan. Sehingga program ini bisa lebih dikembangkan melalui dukungan berupa motivasi, dana, dan fasilitasi pengembangan program.

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kebakaran adalah salah satu jenis bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Setiap tahunnya, ribuan kejadian kebakaran terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, yang mengakibatkan kerugian material yang besar dan bahkan korban jiwa. Karakteristik kewilayahan yang dimiliki oleh Kelurahan Kebon Kangkung yang cukup padat, menyebabkan risiko kebakaran akan cepat menjalar dari satu titik ke titik lainnya.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan pengetahuan masyarakat tentang cara menghadapi dan mencegah kebakaran, serta meningkatkan kapasitas petugas pemadam kebakaran dan perlengkapan yang memadai sebagai respon dari risiko-risiko yang mungkin terjadi apabila terjadi kebakaran di Kelurahan Kebon Kangkung. Program Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran, serta meningkatkan kerja sama antara masyarakat dengan petugas pemadam kebakaran dan instansi terkait.

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran, serta mengurangi risiko bahaya bagi masyarakat. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi bencana kebakaran, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian dan bahaya bagi masyarakat. Program Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran dibuat sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran yang semakin sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Latar belakang pembuatan program

ini adalah minimnya kesiapsiagaan dan pengetahuan masyarakat tentang cara menghadapi dan mencegah kebakaran, yang menyebabkan kerugian dan bahkan korban jiwa yang tinggi akibat kebakaran.

b. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

1) Tujuan Umum

Tujuan umum dari program “MANCARAN (Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran)” adalah untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh bencana kebakaran.

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari program “MANCARAN (Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran)” adalah sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan fasilitas pendukung penanganan bencana kebakaran
- b) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana kebakaran
- c) Meningkatkan kegotongroyang antar warga

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Dalam upaya menangani permasalahan tentang Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kelurahan Kebon Kangkung, maka program yang akan dilaksanakan sebagai solusi dari masalahnya adalah Program “MANCARAN (Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran)”. Dalam program Mancaran ini terdapat dua kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanganan Dini Bencana Kebakaran)

Pada kegiatan ini akan melibatkan masyarakat untuk melakukan simulasi penanganan dini kebakaran yang akan didampingi oleh pihak Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Dalam prosesnya setiap RW akan memiliki jadwalnya masing-masing untuk melaksanakan simulasi tersebut.

2) Penyediaan Fasilitas Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Pada kegiatan akan melibatkan seluruh RT yang ada di Kelurahan Kebon Kangkung. Sebanyak 70 RT akan diberikan APAR sebagai fasilitas pendukung kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung dalam penanganan dini kebakaran.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1) Sistem Inisiator

Sistem inisiator merupakan individu-individu yang pertama kali melihat adanya masalah. Sistem inisiator dalam program ini adalah pekerja sosial.

2) Sistem Agen Perubahan

Sistem agen perubahan merupakan individu-individu yang akan memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinir perubahan. Sistem agen perubahan dalam program ini adalah pekerja sosial dan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

3) Sistem Klien

Sistem klien merupakan sekelompok orang yang akan menerima pelayanan atau sasaran perubahan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sistem klien dalam program ini adalah masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung.

4) Sistem Pendukung

Sistem pendukung merupakan orang-orang yang memberikan dukungan atau masyarakat yang memiliki perhatian akan keberhasilan perubahan. Sistem pendukung dari program ini adalah Pemerintah Kecamatan Kiaracondong.

5) Sistem Pengontrol

Sistem pengontrol merupakan orang-orang yang memiliki otoritas formal atau kekuasaan untuk menerima atau menolak serta mengarahkan implementasi perubahan. Sistem pengontrol dalam program ini adalah ketua RT, ketua RW, dan Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung.

6) Sistem Pelaksana

Sistem pelaksana merupakan orang-orang yang memiliki tugas rutin melaksanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan. Sistem pelaksana dalam program ini adalah pekerja sosial, dan Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung.

7) Sistem Sasaran

Sistem sasaran merupakan orang, struktur, atau kebijakan yang perlu diubah agar menerima manfaat perubahan seperti yang diharapkan. Sistem sasaran dalam program ini adalah masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung.

8) Sistem Aksi

Sistem aksi merupakan orang-orang dari berbagai sistem yang memiliki peran aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana perubahan. Sistem aksi dalam program ini terdiri dari pekerja sosial, Pemerintah Kelurahan Kebon Kangkung, dan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

e. Metode dan Teknik

Metode yang akan digunakan praktikan dalam melaksanakan program “MANCARAN (Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran)”. adalah dengan metode *Community Organization and Community Development (COCD)* atau pengorganisasian dan pengembangan komunitas. Sedangkan teknik

yang akan digunakan adalah *Capacity Building* atau pengembangan kapasitas yang dapat dilakukan dengan teknik perluasan partisipasi atau pemberdayaan kelompok-kelompok yang memerlukan peningkatan keterampilan.

Strategi-strategi yang akan dijalankan dalam pelaksanaan program ini adalah strategi kolaborasi dan pelatihan. Strategi kolaborasi dimaksudkan untuk menciptakan penggunaan sumber-sumber secara bersama dan berfokus pada *win-win solution*. Strategi pelatihan dimaksudkan untuk memberikan kegiatan yang mendukung peningkatan keterampilan dari sasaran program.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

Untuk melaksanakan program “MANCARAN (Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran)” diperlukan biaya sebagai berikut:

Tabel 2.30 Tabel Rencana Anggaran Biaya Program “MANCARAN (Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran)”

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (RP)	Jumlah (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Logistik					
	Alat Pemadam Api Ringan	70	Paket	250.000	17.500.000
	Banner Kegiatan	1	Lembar	75.000	75.000
	Buku Modul	70	Unit	35.000	2.450.000
Jumlah I					20.025.000
2. Honorarium					
	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	12	Orang/Kegiatan	1.000.000	12.000.000
Jumlah II					12.000.000
3. Konsumsi					
	Snack Peserta	150	Box	10.000	1.500.000
	Snack Panitia	5	Box	10.000	50.000
	Snack Narasumber	12	Box	10.000	120.000
Jumlah III					1.670.000
Jumlah Keseluruhan					33.695.000

Rincian peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31 Peralatan Program “MANCARAN (Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran”

No	Nama Alat	Jumlah
1.	Sound system	3
2.	Microfon	5
3.	Laptop	2
4.	Proyektor	1
5.	Layar proyektor	1
6.	Kursi	40
7.	Meja	5

g. Analisis Kelayakan Program

Analisis kelayakan dari program “MANCARAN (Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran” adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32 Tabel Analisis Kelayakan Program “MANCARAN (Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran”

Faktor Internal	<p>Strength:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapatnya narasumber yang ahli dibidangnya 2. Kegiatan sejalan dengan tujuan pemerintah 	<p>Weakness:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kemungkinan sasaran tidak bersemangat mengikuti simulasi
Faktor Eksternal		
<p>Opprtunities:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana kebakaran 2. Dapat meminimalisir kerugian apabila terjadi kebakaran 	<p>Strategi SO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkordinasi dengan lembaga pemerintah 2. Meningkatkan jalinan kerjasama antara masyarakat dengan pihak kelurahan dan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung 	<p>Strategi WO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kegiatan simulasi yang menarik dengan pelibatan semua kalangan masyarakat 2. Penyampaian informasi pada sosialisasi dengan menghindari penggunaan istilah bahasa asing

Treats:	Strategi ST:	Strategi WT:
1. Seruluh sasaran tidak bisa mengikuti sosialisasi dan simulasi dengan khidmat	1. Menyediakan hadiah bagi peserta terbaik 2. Menyediakan tempat yang nyaman dan strategis 3. Menyediakan alat yang dapat menunjang keterampilan masyarakat dalam penanganan kebakaran	1. Melaksanakan simulasi pada hari libur 2. Meningkatkan intensitas pelatihan simulasi kebakaran kepada masyarakat 3. Melakukan penilaian monitoring dan evaluasi kegiatan

h. Jadwal dan Langkah-Langkah

Langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program “MANCARAN (Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran)” adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan program yang memiliki tujuan mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan program. Tahap persiapan dalam program ini terdiri dari:

a) Penyusunan Kepanitiaan

Penyusunan kepanitiaan dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam penyusunan panitia seluruh sumber daya manusia diberikan tugas dan fungsi sesuai bidangnya masing-masing agar memudahkan keberlangsungan pelaksanaan program.

b) Penyusunan Rencana Kegiatan

Setelah didapatkannya susunan panitia maka seluruh unsur kepanitiaan mengadakan pertemuan untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal-hal yang akan dibahas pada tahap ini mencakup diskusi terkait dengan bentuk kegiatan, penyusunan jadwal kegiatan, tempat kegiatan, indikator keberhasilan kegiatan dan hal penting lainnya yang diperlukan selama kegiatan inti berlangsung.

c) Penyusunan Proposal dan Undangan Kegiatan

Penyusunan proposal bertujuan untuk mempermudah dalam proses izin pelaksanaan program dari berbagai pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program kegiatan. Untuk

mendukung keberhasilan program maka diperlukan penyebaran undangan kepada lembaga-lembaga ataupun orang yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam upaya mewujudkan keberhasilan berjalannya kegiatan.

d) Rapat Panitia

Untuk memastikan segala hal yang diperlukan sudah siap maka diperlukan pertemuan panitia sebagai media kordinasi terakhir sebelum program dilaksanakan. Dengan adanya pertemuan ini panitia dapat menyamakan persepsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan meminimalisir kesalahan ketika program sedang berlangsung.

2) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan program “MANCARAN (Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran)” terdapat kegiatan pelatihan dan simulasi kebakaran kepada masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung dalam upaya penanganan dini kebakaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam wujud kesiapsiagaan apabila terjadi bencana kebakaran di wilayah Kelurahan Kebon Kangkung. Selain itu ada juga penyaluran fasilitas Alat Pemadam Api Ringan (APAR) bagi setiap RT untuk mendukung sarana dan prasaran dalam menciptakan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan dini kebakaran.

Untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan maka dalam kegiatan ini melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung sebagai penyedia narasumber dalam kegiatan sosialisasi.

Adapun susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.33 Tabel Jadwal Kegiatan Program “MANCARAN (Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran)”

No	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Panitia	07.00 – 07.30	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.00 – 08.15	15 Menit	Master of Ceremony
4.	Sambutan	08.15 – 08.35	20 Menit	Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Lurah Kebon Kangkung
5.	Pembacaan Doa	08.35 – 08.40	5 Menit	Panitia

6.	Penyampaian Materi dan praktik tentang penanganan dini bencana kebakaran di pemukiman	08.40 – 10.10	90 Menit	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
7.	Sesi Tanya Jawab	10.10 – 10.30	20 Menit	Peserta dan Pemateri
8.	Kuis Berhadiah	10.30 – 10.45	15 Menit	Peserta dan Pemateri
9.	Pemberian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk 70 RT di Kelurahan Kebon Kankung	10.45 – 10.55	10 Menit	Ketua RT dan Pemateri
10.	Dokumentasi	10.55 – 11.00	5 Menit	Panitia
11.	Penutupan	11.00 – 11.05	5 Menit	Master of Ceremony

3) Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran merupakan tahapan terakhir dalam rangkaian kegiatan dalam sebuah program. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi evaluasi kegiatan dan pelaporan kegiatan.

a) Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan refleksi atau peninjauan antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan berlangsung. Tujuan dilakukannya evaluasi proses ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses berlangsungnya kegiatan dan proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi hasil merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan atau program. Tujuan dilakukannya evaluasi hasil adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan terhadap indikator keberhasilan setelah pelaksanaan program.

b) Pelaporan Program

Pelaporan Program “MANCARAN (Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran)” merupakan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dari pelaksanaan program

kepada pihak yang memiliki otoritas dan yang sudah terlibat dalam pelaksanaan program, yaitu Pemerintahan Kelurahan Kebon Kangkung dan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Pelaporan pertanggungjawaban kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk menyusun program-program yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Praktikum Laboratorium Progra Studi Perlindungan dan Pemberdayaan sosial berjalan selama 10 minggu dari tanggal 8 Februari hingga 15 April 2023 dengan berfokus pada observasi lapangan mengenai capaian profil lulusan diantaranya yaitu Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana. Setelah melaksanakan proses praktikum, praktikan mendapatkan hasil mengenai isu permasalahan dan rencana intervensi yang berkaitan dengan profil lulusan program studi antara lain:

1. Profil Analisis Jaminan Sosial

Dalam profil Analisis Jaminan Sosial, praktikan menemukan isu permasalahan di Kelurahan Kebon Kangkung yaitu terdapatnya pekerja Yayasan Rumah Yatim tidak terdaftar dalam Jaminan Hari Tua. Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pemberi kerja terhadap kesejahteraan pekerjanya, pekerja kurang memahami mekanisme program Jaminan Hari Tua, serta Yayasan Rumah Yatim sebagai pemberi kerja terlalu fokus pada pelayanan anak asuh. Upaya pemecahan masalah ini adalah dengan diadakannya program sosialisasi “Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian Pemberi Kerja dalam Memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” di Yayasan Rumah Yatim yang berlokasi di Kelurahan Kebon Kangkung.

2. Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

Dalam profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, praktikan menemukan isu permasalahan di Kelurahan Kebon Kangkung yaitu kurang meratanya pendistribusian bantuan Set Top Box kepada penerima manfaat. Permasalahan ini disebabkan oleh ketidakjelasan kriteria penerima bantuan, tidak adanya sosialisasi pemberian bantuan, tidak adanya koordinasi antara pemberi bantuan dengan pihak kelurahan, dan tidak adanya verifikasi lapangan terkait calon penerima bantuan. Upaya pemecahan masalah ini adalah dengan diadakannya program “Musyawarah BANTARAN (Bantuan Sosial Tepat Sasaran)” di wilayah Kelurahan Kebon Kangkung.

3. Profil Analisis Pemberdayaan Sosial

Dalam profil Analisis Sumber Pemberdayaan Sosial, praktikan menemukan isu permasalahan di Kelurahan Kebon Kangkung yaitu belum maksimalnya panen peternakan lele pada program Buruan SAE. Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan pengurus dalam pengelolaan peternakan lele, kurangnya pendampingan kepada pengurus, kondisi kolam ternak ikan lele yang kurang terawat, dan keterbatasan media peternakan ikan lele. Upaya penyelesaian masalah ini adalah dengan

diadakannya program “Peningkatan Kapasitas Pengurus Buruan SAE” di Kelurahan Kebon Kangkung.

4. Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

Dalam profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, praktikum menemukan isu permasalahan di Kelurahan Kebon Kangkung yaitu terganggunya akses pejalan kaki pada trotoar jalan Ibrahim Adjie. Permasalahan ini disebabkan oleh belum tertibnya sistem parkir, terdapatnya pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar, dan belum adanya efek jera dari sanksi bagi pelanggar akses trotoar. Upaya pemecahan masalah ini adalah dengan diadakannya program "Trotolover" yaitu program kampanye sosial yang mengajak masyarakat untuk mencintai dan menjaga trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki di Kelurahan Kebon Kangkung.

5. Profil Analisis Penanggulangan Bencana

Dalam profil Analisis Penanggulangan Bencana, praktikum menemukan isu permasalahan di Kelurahan Kebon Kangkung yaitu belum adanya fasilitas pendukung dalam penanganan dini bencana kebakaran. Permasalahan ini disebabkan oleh minimnya kesiapsiagaan warga dalam bencana kebakaran, pengadaan fasilitas pemadam api belum menjadi prioritas, belum adanya pelibatan warga dalam simulasi penanganan dini kebakaran. Upaya penyelesaian masalah ini adalah dengan diadakannya program “MANCARAN (Masyarakat Tangguh Bencana Kebakaran)” untuk masyarakat Kelurahan Kebon Kangkung.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pada pengalaman praktikan selama menjalani Praktikum Laboratorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung di Kelurahan Kebon Kangkung, rekomendasi praktikan bagi perbaikan pelaksanaan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
 - a. Memberikan pembahasan materi pembekalan praktikum sesuai dengan karakteristik kewilayahan tempat praktikum yang dipilih
 - b. Memberikan jadwal khusus untuk pembekalan penyusunan laporan praktikum dan sidang lisan
 - c. Meningkatkan penyesuaian jadwal praktikum dengan bimbingan penulisan laporan praktikum
 - d. Memberikan jadwal khusus bagi praktikan untuk melakukan inisiasi sosial di wilayah tempat praktikum
 - e. Penyusunan buku pedoman praktikum disesuaikan dengan kondisi kewilayahan tempat praktikum yang dipilih
 - f. Penyusunan buku pedoman penulisan praktikum secara terpisah dengan pedoman lapangan praktikum

2. Politeknik Kesejahteraan Sosial
 - a. Menyediakan akomodasi transportasi bagi praktikan dalam mengakses tempat praktikum
 - b. Menyediakan buku pendukung praktikum yang bisa dibagikan kepada setiap praktikan

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dede. (2014). *Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1
- Ali, A. (2011). *Planning Sustainable Cities: An Infrastructure-Based Approach*. Earthscan.
- Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI. (2022). *Perlindungan Sosial*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/22-perlindungan-sosial>
- Barrientos, A., & Niño-Zarazúa, M. (2011). *Social Protection, Poverty and The Post-2015 Agenda*. Development Policy Review, 29(5).
- Beatley, T. (2011). *Planning for Coastal Resilience: Best Practices for Calamitous Times*. Island Press.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2017). *Program-program dalam BPJS Ketenagakerjaan*.
- Calthorpe, P., & Fulton, W. (2001). *The Regional City: Planning for the End of Sprawl*. Island Press.
- Creatormedia. (2022). *Kesejahteraan Karyawan Menurut Para Ahli*. <https://creatormedia.my.id/pengertian-kesejahteraan-karyawan-menurut-para-ahli/>
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. (2020). *Buruan SAE*. <https://buruanSAE.bandung.go.id>
- Farr, D. (2008). *Sustainable Urbanism: Urban Design With Nature*. Wiley.
- Gehl, J. (2010). *Cities for People*. Island Press.
- Healey, P. (1997). *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. University of British Columbia Press.
- Hester, R. T. (2012). *Design for Ecological Democracy*. MIT Press.
- International Labour Organization. *Labour Market Governance and Sosial Protection*. https://www.ilo.org/asia/WCMS_098462/lang--en/index.htm
- Krieger, A. (2013). *Urban Tomographies*. MIT Press.
- Maha, Yurika. (2016). *Sistem Sumber Menurut Allan Pincus and Anne Minahan*. Diakses melalui <http://yurikamaha.blogspot.com/2016/05/sistem-sumbermenurut-allen-pincus-and.html>.
- Martanto, Cahyo. (2017). *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Kebakaran Di Kelurahan Kembangsari Kecamatan Semarang Tengah*. <http://lib.unnes.ac.id/>
- Ministry of Health, Labour and Welfare. (1999). *Overview of Social Security in Japan*. <https://www.mhlw.go.jp/english/wp/wp-hw3/dl/2-001.pdf>
- Nurjanah, dkk. (2012). *Manajemen Bencana*. ALFABETA.
- Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. (2023). *Pedoman Praktikum Laboratorium Tahun 2023*. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

- Rubenstein, D., & Corcoran, P. (1992). *Attention and Stroop Interference in Older Adults*. *Psychology and Aging*, 7 (4).
- Rumah Yatim. <https://rumah-yatim.org>
- Sagala, S., Adhitama, P., Sianturi, D.G. *Analisis Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran di Permukiman Padat Perkotaan Kota Bandung, Studi Kasus Kelurahan Sukahaji*. Working Paper Series, No. 3, 2013.
- Salsabila, Nur Mahdiah. (2021). *Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Rsia Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Cabang Makassar Tahun 2021*. Universitas Hasanuddin.
- Soedarto Gatot. 1983. *Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran*. Jakarta: Yayasan Keselamatan Kesehatan Kerja.
- Suharto, Edi. (2010) *Membangun Masyarakat Memberdayakan: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Refika ADITAMA
- Widianti, Siska. (2016). *Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Kebakaran Pada Permukiman Padat Penduduk Di Kecamatan Bojongloa Kaler*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Perda DKI Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Praktikum Laboratorium



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367, Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
Fax. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, email:humas@poltekesos.ac.id

Nomor : 0141/7.1.8/DL.02.01/01/2023 Bandung, 13 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pemohonan Izin Melaksanakan kegiatan
Praktikum Laboratorium**

**Yth. Lurah Kebon Kangkung
Kecamatan Kiaracondong
Kota Bandung
Jawa Barat
Di
Bandung**

Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dalam proses pembelajarannya, diwajibkan melaksanakan praktik lapangan (praktikum). Kegiatan praktikum laboratorium ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan asesmen dan rencana intervensi pekerjaan sosial di masyarakat sesuai profil lulusan. Pada proses pelaksanaannya mahasiswa akan menerapkan keterampilan dalam melakukan tahapan praktik pekerjaan sosial yang dimulai dengan melakukan pendekatan awal, kemudian asesmen, dan diakhiri dengan penyusunan rencana intervensi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merencanakan menempatkan peserta praktikum mahasiswa Poltekesos Bandung di Kelurahan Kebon Kangkung Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Jawa Barat yang rencana pelaksanaan praktikumnya dimulai tanggal 8 Februari s.d. 15 April 2023 (nama mahasiswa praktikan terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI ;
2. Pertinggal.

Lampiran 2. Surat Izin Memperoleh Data dan Informasi BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367, Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
Fax. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, email:humas@poltekesos.ac.id

Nomor : 2911/7.1.8/DL.02.01/02/2023 Bandung, 23 Februari 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Izin Memperoleh Data dan Informasi**

Yth.
Kepala BPJS Kota Bandung
di-
Bandung

Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung dalam proses pembelajarannya, diwajibkan melaksanakan praktik lapangan (Praktikum). Pada tanggal 8 Februari 2023 s/d 15 April 2023 sedang berlangsung Praktikum Laboratorium pada setting outdoor (di desa/kelurahan di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung).

Kegiatan praktikum ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa pada lima profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penata Lingkungan Sosial dan Analis Penanggulangan Bencana. Dalam pelaksanaan praktikum tersebut, mahasiswa tentunya memerlukan data dan informasi guna pendalaman topik yang akan diangkat pada laporan akhirnya,

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu Kepala BPJS Kota Bandung memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh anak-anak didik kami mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI
2. Pertinggal.

Lampiran 3. Kegiatan Pembekalan Praktikum Laboratorium

Pembekalan Umum	Pembekalan Pra-lapangan Dosen Pembimbing
	
Pembekalan Profil Analisis Jaminan Sosial	Pembekalan Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial
	
Pembekalan Profil Analisis Pemberdayaan Sosial	Pembekalan Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial
	
Pembekalan Profil Analisis Penanggulangan Bencana	Pembekalan Lapangan Dosen Pembimbing
	

Lampiran 4 Kegiatan Lapangan Praktikum Laboratorium Kelurahan Kebon Kangkung

<p>Serah Terima Praktikan</p>	<p>Asesmen Profil Analisis Jaminan Sosial Bersama Pegawai Rumah Yatim</p>
	
<p>Asesmen Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial Bersama Ketua RT dan Warga</p>	<p>Asesmen Profil Analisis Pemberdayaan Sosial Bersama Pengurus Buruan SAE</p>
	
<p>Asesmen Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial Bersama Ketua RW</p>	<p>Asesmen Profil Analisis Penanggulangan Bencana Bersama Ketua RW dan Warga</p>
	
<p>Partisipasi kegiatan Tim Penggerak PKK Kelurahan</p>	<p>Partisipasi dalam kegiatan Karang Taruna</p>
	

<p data-bbox="225 186 511 208">Partisipasi Kegiatan Donor Darah</p> 	<p data-bbox="588 176 843 219">Partisipasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat</p> 
<p data-bbox="211 445 526 489">Partisipasi Kegiatan Bersama Komisi Peduli Aids Kota Bandung</p>	<p data-bbox="578 445 850 489">Partisipasi Kegiatan Monitoring Posyandu RW</p>
	
<p data-bbox="228 725 511 768">Peninjauan Trotoar Jalan Ibrahim Adjie</p>	<p data-bbox="563 725 864 768">Partisipasi Kegiatan P2K2 Bantuan Sosial PKH</p>
	
<p data-bbox="236 1038 501 1059">Peninjauan Media Buruan SAE</p>	<p data-bbox="553 1030 874 1074">Pengajuan Usulan Baru Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>
	

<p>Diskusi Kelompok Praktikum</p>	<p>Partisipasi Kegiatan Asesmen dan Bimbingan Sosial Bersama Dinas Sosial Kota Bandung</p>
	
<p>Lokakarya dan Penutupan Praktikum Laboratorium</p>	
	